

**ANALISIS SPILLOVER EFFECT PERTUMBUHAN EKONOMI DI
WILAYAH KOTA MANADO, KABUPATEN MINAHASA UTARA
DAN KOTA BITUNG PADA ERA PANDEMI**

Refinna C. Jacobus¹, George M.V.Kawung², Tri Oldy Rotinsulu³

*Program Studi Magister Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi*

E-mail: 1refinnajacobus061@student.unsrat.ac.id,
2georgekawung@unsrat.ac.id, 3oldyrotinsulu43257@gmail.com

ABSTRAK

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk mengetahui seberapa besar keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara dan sebagai penentu adanya kebijakan pembangunan selanjutnya. Suatu negara dapat dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi kenaikan pendapatan nasional dan peningkatan output. Pertumbuhan ekonomi dianggap penting karena, pertumbuhan ekonomi pada dasarnya menjelaskan tentang kemajuan ekonomi, perkembangan ekonomi, kesejahteraan ekonomi, serta perubahan fundamental suatu negara dalam jangka relatif panjang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembangunan infrastruktur, kemiskinan dan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Manado. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif.

Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi kausalitas dan *spillover effect* Pertumbuhan Ekonomi pada Era Pandemi di wilayah Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto dari masing-masing wilayah sebagai variabel penelitian dan *Granger Causality Test* sebagai metode penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertumbuhan ekonomi antara Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung selama era pandemi bersifat dua arah dengan efek limpahan yang positif bagi masing-masing daerah, artinya ketika suatu daerah mengalami peningkatan pertumbuhan, maka akan berdampak positif bagi pertumbuhan daerah lain.

Kata Kunci : *Pertumbuhan Ekonomi, PDRB, Spillover Effect dan Granger Causality Test*

ABSTRACT

The economic growth of a region indicates the existence of economic activity in the region in a certain period of time or can be seen from the growth of the sectors that make up the gross domestic product of the region. This economic dynamic occurs, among other things, because of the spillover effect given and received by other regions or areas. As is known, the spillover effect is an impact arising from inter-regional dependence relationships and is complementary due to differences in regional potential and characteristics. In 2019 the whole world experienced a pandemic period caused by the Covid-19 virus. Almost all sectors are affected by the pandemic, including the economic sector.

The purpose of this study is to identify the causality and spillover effect of Economic Growth in the Pandemic Era in the Manado City, North Minahasa Regency and Bitung City areas using the Gross Regional Domestic Product of each region as the research variable and the Granger Causality Test as the research method. The results showed that economic growth between Manado City, North Minahasa Regency and Bitung City during the pandemic era was two-way with a positive spillover effect for each region, meaning that when a region experiences increased growth, it will have a positive impact on the growth of other regions.

Keywords: *Economic Growth, GRDP, Spillover Effect and Granger Causality Test*

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menunjukkan adanya kegiatan perekonomian di wilayah tersebut pada suatu periode waktu tertentu atau dapat dilihat dari pertumbuhan sektor-sektor pembentuk produk domestik bruto wilayah tersebut. Dinamika perekonomian ini terjadi antara lain karena adanya efek limpahan (*spillover effect*) yang diberikan dan diterima oleh wilayah atau wilayah lain. Sebagaimana diketahui, efek limpahan (*spillover effect*) merupakan

dampak yang timbul dari hubungan ketergantungan antar daerah dan bersifat saling melengkapi akibat perbedaan potensi dan karakteristik daerah.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah seluruh nilai tambah yang timbul dari berbagai kegiatan ekonomi di suatu wilayah, tanpa memperhatikan pemilik atas faktor produksinya, apakah milik penduduk wilayah tersebut ataukah milik penduduk wilayah lain (Sukirno,1994). Produk Domestik Regional Bruto ini merupakan penerimaan jumlah balas jasa berdasarkan faktor-faktor produksi serta dalam proses produksi pada suatu daerah yang dapat dijadikan sebagai salah satu indikator dalam menggambarkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang biasanya juga digunakan untuk menilai keberhasilan pembangunan pada suatu daerah dalam periode waktu tertentu dan dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam menentukan arah kebijaksanaan pembangunan yang akan datang.

Pada tahun 2019 seluruh dunia mengalami masa pandemi disebabkan virus Covid-19. Hampir semua sektor terdampak oleh pandemi tak terkecuali pada sektor ekonomi. Produk Domestik Regional Bruto menjadi salah satu bagian terdampak di bidang ekonomi. Dalam penelitian ini akan mengetahui bagaimana Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Era Pandemi di wilayah Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung.

Penelitian ini pun mengenai efek limpahan pertumbuhan ekonomi antar daerah untuk memahami bagaimana pertumbuhan ekonomi di satu daerah dapat mempengaruhi daerah lainnya. Ini penting untuk merancang kebijakan yang dapat mendorong perkembangan ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah. Yang melatar belakangi penelitian ini tentang Analisis *Spillover Effect* Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara, dan Kota Bitung pada Era Pandemi berkaitan dengan keinginan untuk menyelidiki bagaimana pertumbuhan ekonomi di tiga wilayah ini saling berdampak satu sama lain di era pandemi ini.

Wilayah Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung merupakan wilayah tiga daerah di Provinsi Sulawesi Utara yang letak geografis sangat strategis dimana Kota Manado sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan pendidikan jika kota ini mengalami pertumbuhan dalam administrasi pemerintahan dan sektor publik, efek *spillover* mungkin muncul dalam bentuk peningkatan permintaan terhadap layanan jasa seperti konsultasi hukum, akuntansi, atau penyediaan teknologi informasi. Ini dapat berdampak positif pada daerah-daerah sekitarnya yang juga menyediakan layanan serupa. Namun, dampaknya mungkin lebih terbatas pada wilayah-wilayah yang memiliki keterkaitan pemerintahan yang kuat. Kabupaten Minahasa Utara di kenal sebagai daerah Pertanian dan pengembangan Pariwisata, pertumbuhan di sector pertanian dan pariwisata di daerah ini dapat memberikan efek positif *spillover* kepada daerah-daerah tetangga. Ketika kunjungan wisatawan meningkat, permintaan terhadap layanan akomodasi, restoran, transportasi, dan layanan pariwisata lainnya juga dapat meningkat di wilayah-wilayah sekitarnya. Ini berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut. Dan Kota Bitung yang di kenal sebagai Kota Industri dan Perikanan, kota industri dan perikanan yang berkembang dan bisa memberikan efek *spillover* dalam bentuk peningkatan permintaan atas barang dan jasa yang dibutuhkan oleh industri tersebut. Ini bisa mencakup suplai bahan baku, layanan logistik, serta teknologi dan inovasi terkait industri tersebut. Daerah sekitarnya yang menyediakan komponen-komponen ini dapat mengalami pertumbuhan ekonomi yang terpicu oleh industri utama.

Wilayah Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung ini memiliki potensi sumber daya alam yang besar dan mampu memberikan hubungan untuk saling melengkapi atas kegiatan ekonomi. Sebagai wilayah yang secara umum memiliki kemajuan ekonomi yang relatif baik, wilayah ini masih memiliki potensi perbedaan kemajuan antar daerah sebagaimana terlihat dari data Produk Domestik Regional Bruto dan Laju Pertumbuhan dari ketiga daerah, sebagaimana dalam grafik di bawah ini.

Tabel 1
Data Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan di Wilayah Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung (Juta Rupiah) Tahun 2019Q1 – 2022Q2

TAHUN	PDRB ADHK KOTA MANADO	PDRB ADHK KAB.MINUT	PDRB ADHK KOTA BITUNG
2019Q1	6584442	2384532	2798695
2019Q2	6436763	2351981	2791040
2019Q3	6321572	2328531	2789131
2019Q4	6238868	2314183	2792965
2020Q1	6188651	2308937	2802544
2020Q2	6170921	2312791	2817868
2020Q3	6185679	2325748	2838936
2020Q4	6232924	2347806	2865748
2021Q1	6386299	2400168	2907068
2021Q2	6469062	2431947	2941864
2021Q3	6554855	2464347	2978899
2021Q4	6643679	2497368	3018174
2022Q1	6735533	2531009	3059688
2022Q2	6830417	2565270	3103441
2022Q3	6928332	2600152	3149433
2022Q4	7029277	2635654	3197664

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2023 (data diolah)

Dapat dilihat dalam Tabel diatas, Produk Domestik Regional Bruto Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung selama 4 tahun terakhir pada era pandemi per kuartal ini,pada tahun 2019 kuartal 1 hingga tahun 2021 kuartal 2 mengalami penurunan namun pada tahun 2021 kuartal 3 sampai tahun 2022 kuartal 4,PDRB ketiga daerah ini mengalami peningkatan kembali.

Hal yang menyebabkan nilai PDRB ketiga daerah ini menurun pada era pandemi tidak lain karena efek dari kegiatan perekonomian yang tidak berjalan dengan baik yaitu adanya Pembatasan Ekonomi Lockdown dan pembatasan pergerakan yang di terapkan untuk untuk mengendalikan penyebaran virus Covid-19 menghambat aktivitas ekonomi, seperti penutupan bisnis, restoran, dan industri hiburan.Serta adanya Penurunan Konsumsi yaitu banyak konsumen mengurangi pengeluaran mereka karena ketidakpastian ekonomi dan ketakutan terhadap virus. Ini berdampak negatif pada penjualan dan pendapatan perusahaan.Dan juga karena kehilangan lapangan kerja akibat pandemi juga mengurangi daya beli masyarakat, yang berdampak pada konsumsi.Hal-hal itulah yang menyebabkan nilai PDRB menurun di ketiga daerah ini.

Pandemi Covid-19 ini selain berdampak pada nilai PDRB ternyata juga berdampak pada Laju Pertumbuhan Ekonomi di ketiga daerah ini,hal inidapat dilihat dari data Laju Pertumbuhan Ekonomi berikut ini;

Tabel 2
Data Laju Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung (Persen) Tahun 2019Q1 – 2022Q2

TAHUN	LAJU PE MANADO	LAJU PE MINUT	LAJU PE BITUNG
2019Q1	3,33	3,01	1,59
2019Q2	1,94	1,92	1,15
2019Q3	0,81	1,04	0,79
2019Q4	-0,04	0,38	0,53
2020Q1	-0,61	-0,07	0,36
2020Q2	-0,91	-0,32	0,29
2020Q3	-0,94	-0,35	0,30
2020Q4	-0,70	-0,17	0,41
2021Q1	0,81	0,99	0,93
2021Q2	1,21	1,29	1,10
2021Q3	1,49	1,49	1,23
2021Q4	1,64	1,59	1,33
2022Q1	1,67	1,60	1,39
2022Q2	1,58	1,51	1,42
2022Q3	1,36	1,33	1,42
2022Q4	1,03	1,05	1,38

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara, 2023 (data diolah)

Dapat dilihat dalam Tabel diatas, Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung 4 tahun terakhir per kuartal ini, pada tahun 2019 kuartal 1 hingga tahun 2021 kuartal 2 mengalami penurunan dan di ikuti oleh tahun-tahun berikutnya mengalami peningkatan.

Pandemi memiliki dampak signifikan pada laju pertumbuhan ekonomi daerah. Pandemi Covid-19 telah mengganggu aktivitas ekonomi secara luas dan mempengaruhi faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah, seperti PDRB, lapangan kerja, investasi, dan konsumsi. Sebagai akibatnya, penurunan investas karena ketidakpastian ekonomi selama pandemi bisa membuat perusahaan enggan untuk berinvestasi, yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi jangka panjang.Dan dampak sektor-sektor tertentu yaitu beberapa sektor, seperti pariwisata, hiburan, dan perhotelan, mungkin mengalami dampak lebih besar karena pembatasan perjalanan dan sosial. Untuk mengatasi dampak negatif ini, pemerintah telah mengambil langkah-langkah stimulus ekonomi dan dukungan finansial untuk memulihkan pertumbuhan ekonomi daerah khususnya di ketiga daerah ini.

Nilai produk domestik regional bruto dan laju pertumbuhan ekonomi antar daerah di wilayah Kota Manado,Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung cukup bervariasi. Hal ini disebabkan setiap daerah memiliki keunggulan komparatif yang berbeda seperti perbedaan ketersediaan sumber daya alam, faktor produksi, layanan bidang jasa, infrastruktur penunjang, dan sumber daya manusia. Adanya keterkaitan langsung baik dari segi batas wilayah dan ekonomi berpotensi menjadikan daerah-daerah di wilayah tersebut memiliki hubungan kausalitas dan saling memberikan efek limpahan pertumbuhan ekonomi,baik yang bersifat positif/diharapkan maupun negatif/tidak diharapkan.

Yang melatar belakangi mengapa penelitian ini penting untuk di teliti yaitu untuk mengidentifikasi jenis *spillover* yang mungkin terjadi di masing-masing jenis kota dan sektor ekonomi, serta bagaimana dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah-wilayah terkait.Dan juga untuk mengidentifikasi potensi efek positif atau negatif dari pertumbuhan ekonomi di satu wilayah terhadap wilayah lainnya khususnya wilayah Kota Manado,Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung. Diharapkan hasil dari penelitian ini bisa memberikan wawasan yang berguna bagi pengambilan kebijakan di tingkat lokal maupun regional, serta membantu merencanakan strategi pembangunan ekonomi yang lebih terkoordinasi dan berkelanjutan di ketiga wilayah tersebut.

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "Analisis *Spillover Effect* Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung pada Era Pandemi". Untuk mengetahui bagaimana hubungan kausalitas sekaligus efek limpahan pertumbuhan ekonomi antar daerah di era pandemi.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah hubungan kausalitas pertumbuhan ekonomi Kota Manado dengan Kabupaten Minahasa Utara pada Era Pandemi?
2. Bagaimanakah hubungan kausalitas pertumbuhan ekonomi Kota Manado dengan Kota Bitung pada Era Pandemi?
3. Bagaimanakah hubungan kausalitas pertumbuhan ekonomi Kota Bitung dengan Kabupaten Minahasa Utara pada Era Pandemi?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi hubungan kausalitas pertumbuhan ekonomi Kota Manado dengan Kabupaten Minahasa Utara pada Era Pandemi.
2. Untuk mengidentifikasi hubungan kausalitas pertumbuhan ekonomi Kota Manado dengan Kota Bitung pada Era Pandemi.
3. Untuk mengidentifikasi hubungan kausalitas pertumbuhan ekonomi Kota Bitung dengan Kabupaten Minahasa Utara pada Era Pandemi.

Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung untuk kebijakan ekonomi dalam upaya mewujudkan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
2. Bagi Masyarakat
Penelitian ini diharapkan menambah suatu pengetahuan umum yang menarik dan dapat bermanfaat terutama dalam pengetahuan terhadap efek limpahan pertumbuhan ekonomi antar daerah yang saling berkaitan khususnya di wilayah Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung.
3. Bagi Penelitian Selanjutnya
Penelitian ini dapat dijadikan referensi ataupun bahan studi untuk penelitian/pengembangan dalam menguji hubungan kausalitas pertumbuhan ekonomi dengan menambahkan variabel dan metode penelitian sehingga dapat diperoleh informasi yang lebih komprehensif.

Tinjauan Pustaka

Teori Perencanaan Pembangunan Daerah

Masalah pembangunan harus ditegaskan bahwa pembangunan suatu negara harus mampu mengatasi tiga persoalan mendasar yaitu masalah kemiskinan, tingkat pengangguran dan ketimpangan pendapatan. Sehingga dapat di definisikan bahwa pembangunan merupakan suatu proses multidimensi yang mencerminkan perubahan struktur masyarakat secara keseluruhan baik itu struktur nasional, sikap masyarakat dan kelembagaan nasional. Perubahan tersebut bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan pendapatan dan memberantas kemiskinan sehingga diharapkan terwujudnya kondisi kehidupan yang lebih baik secara material maupun spiritual (Todaro, 2000).

Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori Rostow menjelaskan bahwa ada tahap-tahap yang dilewati suatu negara dalam pertumbuhan ekonomi. Salah satu cara untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi adalah dengan memperkuat tabungan nasional. Teori ini diperjelas lagi dengan teori Harrod-Domar yang menyebutkan bahwa semakin banyak porsi PDB yang ditabung akan menambah *capital stock* sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kedua teori tersebut menjelaskan bahwa tingkat tabungan dan *capital stock* yang tinggi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Namun beberapa studi empiris menunjukkan hasil yang berbeda antara negara-negara di Eropa Timur

dan di Afrika. Hal ini menunjukkan adanya faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, seperti kualitas SDM dan infrastruktur pendukung (Todaro, 2006).

Teori Kutub Pertumbuhan Pusat Pertumbuhan (*Growth Pole*)

Menurut Tarigan (2000), pusat pertumbuhan dapat diartikan dengan dua cara yaitu: Secara fungsional, adalah konsentrasi kelompok usaha atau cabang industri yang sifat hubungannya memiliki unsur-unsur dinamis sehingga mampu menstimulasi kehidupan ekonomi baik ke dalam maupun ke luar (daerah belakangnya). Dan Secara geografis, suatu wilayah yang banyak memiliki fasilitas dan kemudahan sehingga menjadi daya tarik yang menyebabkan berbagai macam usaha tertarik berlokasi di suatu tempat tanpa adanya hubungan antara usaha-usaha tersebut.

Efek Limpahan (*Spillover Effect*)

Fingleton (2003), memperlihatkan bahwa terjadinya spillover dapat meningkatkan ketergantungan spasial tentang pertumbuhan suatu daerah. Limpahan aktivitas ekonomi, baik dalam bentuk mobilitas barang, tenaga kerja dan modal maupun eksternalitas spasial, mempengaruhi suatu organisasi tertentu tentang aktivitas ekonomi dalam suatu ruang.

Produk Domestik Regional Bruto

Menurut Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto diseluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul sebagai akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto dapat didefinisikan menurut sudut pandang yang berbeda, yaitu; Menurut pendekatan produksi, Menurut pendekatan pendapatan, dan Menurut pendekatan pengeluaran.

Hubungan Produk Domestik Regional Bruto dan Pertumbuhan Ekonomi

Menurut (Arsyad, 1999) Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Bruto atau Produk Domestik Regional Bruto tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak. Tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi ditunjukkan dengan tingginya nilai Produk Domestik Regional Bruto. Nilai Produk Domestik Regional Bruto yang tinggi menunjukkan aktivitas produksi barang dan jasa di satu daerah yang tinggi. Hal ini akan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja yang melakukan kegiatan produksi sehingga akan berdampak terhadap berkurangnya tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Penelitian Terdahulu

Chandra Saniman, Paulus Kindangen dan Een Walewangko (2023) mengenai Analisis Efek Limpahan Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Bolaang Mongondow Raya. Penelitian ini untuk mengidentifikasi kausalitas pertumbuhan ekonomi yang memberikan efek limpahan kepada kab/kota di Bolaang Mongondow Raya, dengan variabel Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan dengan metode Granger Causality Test. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa di Kota Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terdapat hubungan kausalitas dua arah yang saling memberikan efek limpahan positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Reizard O. Wullur, Rosalina A. M Koleangan, dan Audie O. Niode (2019) berjudul Analisis Kausalitas PAD dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2001-2017. Tujuannya adalah untuk mengetahui hubungan kausalitas antara Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi. Menggunakan Data sekunder dari Badan Pusat Statistik dengan metode penelitian yang digunakan adalah model analisis kausalitas *Granger Causality Test* hasilnya menunjukan bahwa terdapat hubungan dua arah (*bidirectional*) antara PAD dan pertumbuhan ekonomi.

Zicheng Huang (2020) berjudul *The Spatial Spillover Effect of Input and Output of Scientific Progress on Regional Economic Growth: The Case of Guangdong Province*. Tujuannya adalah membuat analisis empiris efek limpahan spasial pertumbuhan ekonomi regional Dengan

metode penelitian yang digunakan adalah *Moran's I and Spatial Durbin Model*. Menggunakan data panel dari tingkat prefektur kota di Provinsi Guangdong dari tahun 2008 sampai 2017. Hasil empiris menunjukkan bahwa terdapat autokorelasi spasial dalam perkembangan ekonomi Provinsi Guangdong, dan baik input maupun output inovasi penelitian ilmiah berpengaruh positif signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Maulana Malik Sebdo Aji1 dan Nuri Nasriyah (2021), Sektor Unggulan Di Era Pandemi Covid 19 Wilayah Regional Sumatera. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sektor-sektor unggulan di wilayah Sumatera. Data metode analisis yang digunakan adalah analisis Location Quotient. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sumatera Daerah secara umum memiliki keunggulan di sektor pertanian dan pertambangan.

Maisi Hasna Mariyatul Qibti dan R. Mulyo Hendarto (2020) berjudul *Analisis Spillover Effect* Pertumbuhan Ekonomi antar Kabupaten/Kota di Kawasan Purwomanggung Jawa Tengah Tahun 1988-2018. Tujuannya adalah mengidentifikasi hubungan kausalitas pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota dan analisa efek limpahan pertumbuhan ekonomi antar kabupaten/kota di kawasan Purwomanggung Variabel yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi dan efek limpahan pertumbuhan, metode penelitian yang digunakan adalah *Granger Causality Test* dan *Vector Error Correction Model* hasilnya menunjukan bahwa hubungan pertumbuhan ekonomi antar daerah sebagian besar bersifat dua arah.

Kerangka Pemikiran



Hipotesa penelitian

1. Diduga terdapat Hubungan Kausalitas antara Produk Domestik Regional Bruto Kota Manado dengan Produk Domestik Regional Bruto Kota Minahasa Utara pada Era Pandemi.
2. Diduga terdapat Hubungan Kausalitas antara Produk Domestik Regional Bruto Kota Manado dengan Produk Domestik Regional Bruto Kota Bitung pada Era Pandemi.
3. Diduga terdapat Hubungan Kausalitas antara Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Minahasa Utara dengan Produk Domestik Regional Bruto Kota Bitung pada Era Pandemi.

2. METODE PENELITIAN

Data dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder dan jenis data yang digunakan adalah *Time Series*. Data *Time series* dari Tahun 2019-2022 Per Kuartal.. Data yang digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto dari Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung pengamatan tahun 2019-2022 Perkuartal. Yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Instansi Pemerintah lainnya.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional dari penelitian ini adalah Pertumbuhan Ekonomi yang dihitung dari Penambahan output yang dihitung dari Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga

Konstan Menurut Lapangan Usaha dalam satuan Jutaan Rupiah dari Kota Bitung, Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Manado.

Metode Analisis

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis hubungan kausalitas pertumbuhan ekonomi antara Kota Bitung, Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Manado menggunakan metode granger (Uji Kausalitas *Granger*) dengan alat bantu Eviews 12.

Menurut Gujarati, D. N., & Porter, D. C., (2003), tahap pengujian kausalitas granger, adalah Uji Stasioneritas Data, Penentuan Nilai Lag, Apabila Lag sudah terpilih, kemudian di uji dengan *Granger Causality* kemudian Membuat interpretasi hasil uji kausalitas.

Uji Stasioneritas Data

Data time series dikatakan stasioner jika rata-rata, varian dan kovarian pada setiap lag adalah tetap sama pada setiap waktu. Terdapat beberapa metode dalam uji stasionaritas. Berkembangnya metode dalam uji stasionaritas ini seiring dengan perhatian ahli ekonometrika terhadap penggunaan data time series. Metode yang banyak digunakan oleh ahli ekonometrika untuk menguji masalah stasioner data adalah dengan menggunakan uji akar unit atau unit root test (Widarjono, 2013).

Penentuan Nilai Lag

Jumlah kelambatan untuk dimasukkan biasanya dipilih dengan menggunakan kriteria informasi, seperti *Akaike* (AIC) atau *Schwarz*. Nilai lagged tertentu dari salah satu variabel dipertahankan dalam regresi jika; Siginifikan menurut Uji t, dan Nilai Lagged lain dari variabel secara bersama-sama menambahkannya daya penjelas ke model sesuai dengan sebuah Uji F. Apabila Lag sudah terpilih, selanjutnya digunakan untuk menguji kausalitas dengan metode *Granger Causality*.

Uji *Granger Causality Test*

Granger Causality Test dalam penelitian ini digunakan untuk melihat adanya hubungan kausalitas pertumbuhan ekonomi antar daerah. Persamaan *Granger Causality* adalah sebagai berikut:

$$\Delta \text{Log(PDRB)}_{it} = \delta + \sum_{k=1}^M \delta_k \Delta \text{Log(PDRB)}_{it-k} + \sum_{h=1}^N \gamma_h \Delta \text{Log(PDRB)}_{jt-h} + u_t$$

$$\Delta \text{Log(PDRB)}_{jt} = \alpha_0 + \sum_{k=1}^M \alpha_k \Delta \text{Log(PDRB)}_{it-k} + \sum_{h=1}^N \beta_h \Delta \text{Log(PDRB)}_{jt-h} + e_t$$

Keterangan :

- Δ : first difference
- LnPDRB_{it} : pertumbuhan ekonomi daerah i di tahun t
- LnPDRB_{jt} : pertumbuhan ekonomi daerah j di tahun t
- u_t dan e_t : dua istilah *error* yang tidak berkorelasi
- k dan h : jumlah *lag*

Kausalitas searah terjadi ketika pertumbuhan ekonomi pada daerah i menyebabkan pertumbuhan ekonomi pada daerah j, namun tidak sebaliknya pertumbuhan ekonomi daerah j tidak menyebabkan pertumbuhan ekonomi pada daerah i. Kausalitas dua arah terjadi ketika pertumbuhan ekonomi daerah I menyebabkan pertumbuhan ekonomi pada daerah j, dan juga sebaliknya pertumbuhan ekonomi daerah j menyebabkan pertumbuhan ekonomi pada daerah i. Hipotesis yang digunakan dalam uji Kausalitas Granger adalah sebagai berikut:

H_0 : Tidak ada hubungan kausalitas

H_1 : Ada hubungan kausalitas

Apabila hasil uji Kausalitas Granger nilai probabilitasnya lebih kecil dari *critical value*, maka H_0 ditolak yang berarti ada hubungan kausalitas yang terjadi antar variabel. Apabila hasil yang muncul nilai probabilitasnya lebih besar dari *critical value*, maka tidak ada hubungan kausalitas yang terjadi antar variabel.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Untuk mengetahui bagaimanakah hubungan pertumbuhan ekonomi di wilayah Kota Manado,Kabupaten Minahasa utara dan Kota Bitung di Era Pandemi,maka dilakukan pengujian dengan metode Granger Causality Test yang dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu Uji Akar Unit (Stasioneritas Data), Penentuan Panjang Lag Optimum, Granger Causality Test, dan terakhir mengintepretasikan hasil pengujian.

Hasil Uji Stasioneritas

Data Time Series umumnya bersifat stokastik atau tren yang tidak stasioner, artinya data tersebut memiliki akar unit. Data yang tidak stasioner akan menyebabkan regresi lancung (Spurious Regression), dan beresiko pada hasil perhitungan yang tidak akurat. Uji Stasioneritas Data dilakukan pada semua variabel menggunakan metode Levin, Lin, &Chu Test, Im, Pesaran, Shin Test, Augmented Dickey-Fuller Test, dan Philips Perron Test. Amri, (2017).Jika nilai probabilitasnya < a (0.05) maka tidak terdapat akar unit atau data stasioner.

Tabel 3 Stasioner Data

Metode	Level	1 st Difference	2 nd Difference
Levin,Lin & Chu	0,9360	0,0042	0,0000
Augmented Dickey Fuller	0,9753	0,2557	0,0002

Sumber : Data di olah Eviews 12

Berdasarkan hasil uji root tabel 3 dengan menggunakan metode Augmented Dickey Fuller dapat di ketahui bahwa data Produk Domestik Regional Bruto dari ketiga daerah merupakan data-data yang mengandung akar unit pada tingkat Level, First Difference (orde 0 dan orde 1) atau data tidak stasioner dimana nilai Probabilitasnya masih di atas a (0.05) artinya menerima hipotesis H0 yaitu terdapat akar unit pada data atau data tidak stasioner. Sehingga perlu dilakukan diferensiasi lanjutan pada tingkat Second Difference (orde II). berdasarkan hasil diferensiasi pada orde II diperoleh nilai probabilitas sebesar 0.0002 artinya a (0.05) sehingga menolak Hipotesis H0 yaitu tidak terdapat akar unit pada data atau data sudah stasioner.

Penentuan Panjang Lag Optimum

Penentuan Lag digunakan untuk mengetahui panjang Log optimal yang akan digunakan dalam analisis selanjutnya. Hal ini dilakukan karena estimasi hubungan kausalitas sangat peka terhadap panjang Log. Lag optimal merupakan panjang Lag yang memberikan pengaruh signifikan sehingga perlu untuk melihat data, dan kemudian menentukan ketepatan panjang Lag.Jika nilai lag yang dimasukkan terlalu pendek maka dikhawatirkan tidak dapat menjelaskan kedinamisan secara menyeluruh.Dalam menggunakan metode Granger Causality, juga dilakukan penentuan panjang lag yang ada dalam variabel penelitian. Jika panjang Log yang digunakan terlalu banyak dalam model, maka dapat mengurangi kemampuan hipotesis nol (H0) ditolak karena tambahan parameter yang terlalu banyak akan mengurangi derajat bebas (Maria Alvyonita, 2012). Dalam menentukan nilai lag yang dilakukan pertama kali adalah melakukan uji Vector Autoregression Estimates,selanjutnya dilakukan Vector Autoregression Log Order Selection Criteria. Dan karena data stasioner pada orde II (second difference), maka pada setiap variabel di tambahkan D.

Tabel 4 Hasil Penentuan Lag

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	-469.3656	NA	4.00e+33	85.88466	85.99318	85.81626
1	-438.4736	39.31718*	8.29e+31	81.90429	82.33835	81.63067
2	-422.2468	11.80130	4.02e+31*	80.59033*	81.34994*	80.11149*

Sumber : Data di olah Eviews 12

Dari tabel 4 dapat dilihat bahwa Lag optimal dengan nilai Akaike Information Criterion terkecil terdapat pada angka 2.Artinya pengaruh optimal variabel terhadap variabel lain terjadi

dalam horizon waktu 1 periode,Hal ini menunjukkan bahwa Lag 2 yang ideal untuk proses estimasi.

Hasil Granger Causality Test

Uji ini bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat masing-masing variabel, taraf uji yang digunakan adalah pada tingkat kepercayaan $\alpha = 0.10$ (10%) dan panjang Lag 2. Dapat disimpulkan jika nilai probabilitas lebih besar dari α 0.1 maka tidak terjadi kausalitas antar variabel. Sebaliknya jika nilai probabilitas lebih kecil dari α 0.1 maka terjadi kausalitas antar variabel.Sedangkan,untuk pengujian dengan menggunakan nilai F-Tabel adalah jika nilai F-Statistik lebih besar dari nilai F-Tabel maka kedua variabel tersebut memiliki kausalitas dua arah. Sebaliknya jika nilai F-Statistik lebih kecil dari nilai F-Tabel maka kedua variabel tersebut tidak memiliki kausalitas dua arah.Jika sebuah kejadian x terjadi sebelum y, maka terdapat kemungkinan bahwa x mempengaruhi y namun tidak mungkin sebaliknya. Inilah ide dalam penerapan Uji Kausalitas Granger (Gujarati, 2003)

Tabel 5 Penentuan Nilai F-Tabel

Nilai F-Tabel :
Yang di peroleh dari rumus : $F.INV.RT(p,df1,df2)$

Probability	Df1(k-1)	Df2(n-k)	N	K
0,10	2	13	16	3

Dimana :
n adalah Jumlah Observasi
k adalah Jumlah variable

Hasil Uji Granger Causality			
Tabel 6			
Interpertasi Berdasarkan Nilai Probabilitas $\alpha=0,10$			
Variabel	PDRB _{MANADO}	PDRB _{MINUT}	PDRB _{BITUNG}
PDRB _{MANADO}		0,0661	0,0662
PDRB _{MINUT}	0,0604		0,0605
PDRB _{BITUNG}	0,0442	0,0442	
Signifikan dalam taraf nyata < 0,10			
Tabel 7			
Interpertasi Nilai F-Tabel 3,806			
Variabel	PDRB _{MANADO}	PDRB _{MINUT}	PDRB _{BITUNG}
PDRB _{MANADO}		3,92817	3,92603
PDRB _{MINUT}	3,99496		3,99234
PDRB _{BITUNG}	4,49907	4,49860	
Apabila Nilai F-Statistik < Nilai F-Tabel,maka H0 di terima Apabila Nilai F-Statistik > Nilai F-Tabel,maka H0 di tolak			

Sumber : Data di olah program EvIEWS 12

- Berdasarkan hasil pengujian,dapat di interpertasikan hal-hal sebagai berikut:
1. Nilai probabilitas Produk Domestik Regional Bruto Kota Manado terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Minahasa Utara sebesar 0,0661 artinya $\leq 0,1$ dan F-Statistik sebesar 3,92817 artinya lebih besar dari nilai F-Tabel 3,806.
 2. Nilai probabilitas Produk Domestik Regional Bruto Kota Manado terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kota Bitung sebesar 0,0662 artinya $\leq 0,1$ dan F-Statistik sebesar 3,92603 artinya lebih besar dari nilai F-Tabel 3,806.
 3. Nilai probabilitas Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Minahasa Utara terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kota Manado sebesar 0,0604 artinya $\leq 0,1$ dan F-Statistik sebesar 3,99496 artinya lebih besar dari nilai F-Tabel 3,806.
 4. Nilai probabilitas Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Minahasa Utara terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kota Bitung sebesar 0,0605 artinya $\leq 0,1$ dan F-Statistik sebesar 3,99234 artinya lebih besar dari nilai F-Tabel 3,806.

5. Nilai probabilitas Produk Domestik Regional Bruto Kota Bitung terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kota Manado sebesar 0,0442 artinya $\leq 0,1$ dan F-Statistik sebesar 4,49907 artinya lebih besar dari nilai F-Tabel 3,806.
6. Nilai probabilitas Produk Domestik Regional Bruto Kota Bitung terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Minahasa Utara sebesar 0,0442 artinya $\leq 0,1$ dan F-Statistik sebesar 4,49860 artinya lebih besar dari nilai F-Tabel 3,806.

Pembahasan

Hasil *Granger Causality Test* menunjukkan bahwa Produk Domestik Regional Bruto dari ketiga daerah memiliki hubungan kausalitas dua arah dan efek limpahan positif bagi masing-masing daerah yaitu antara Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung. Produk Domestik Regional Bruto Kota Manado berhubungan dengan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Minahasa Utara. Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Minahasa Utara berhubungan dengan Produk Domestik Regional Bruto Kota Manado. Dan Produk Domestik Regional Bruto Kota Manado berhubungan dengan Produk Domestik Regional Bruto Kota Bitung. Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto Kota Bitung berhubungan dengan Produk Domestik Regional Bruto Kota Manado. Demikian juga untuk Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Minahasa Utara berhubungan dengan Produk Domestik Regional Bruto Kota Bitung. Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto Kota Bitung berhubungan dengan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Minahasa Utara. Dengan demikian keputusannya adalah pertumbuhan ekonomi Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara dan Kabupaten Kota Bitung memiliki hubungan dua arah (*bidirectional*) serta saling memberikan efek limpahan positif (*spread effect*).

Hubungan kausalitas dan efek limpahan pertumbuhan antara ketiga daerah terjadi karena adanya komplementer dan substitusi atas barang dan jasa, adanya keterkaitan spasial yang didukung oleh infrastruktur yang baik dan saling terkoneksi. Efek limpahan dari ketiga daerah ini yaitu yang pertama hubungan efek limpahan antara Kota Manado dan Kabupaten Minahasa Utara pada Era Pandemi ini yaitu saling melengkapi seperti Kota Manado yang unggul di bidang perdagangan dan Kabupaten Minahasa Utara yang unggul di bidang pertanian yang artinya kedua daerah ini dapat saling memberi efek limpahan yaitu Kabupaten Minahasa Utara dapat menjual hasil pertaniannya di Kota Manado dan Kota Manado juga mendapat efek limpahan yang positif di karena adanya pasokan hasil pertanian dari kabupaten Minahasa Utara yang dapat membantu memenuhi kebutuhan di daerah itu. Efek limpahan berikutnya antara Kota Manado dan Kota Bitung pada Era Pandemi ini yaitu saling melengkapi seperti Kota Manado yang unggul di bidang perdagangan dan Kota Bitung yang unggul di bidang industri pengolahan yang artinya kedua daerah ini dapat saling memberi efek limpahan yaitu Kota Bitung dapat menjual hasil olahannya seperti makanan Ikan Tuna Kaleng dan sebagainya yang telah di olah di Kota Manado dan Kota Manado juga mendapat efek limpahan yang positif di karena adanya pasokan hasil olahan makanan instan dari Kota Bitung yang dapat membantu memenuhi kebutuhan di daerah itu. Efek limpahan terakhir yaitu antara daerah Kabupaten Minahasa utara dan Kota Bitung pada Era Pandemi ini yaitu saling melengkapi seperti Kota Bitung yang unggul di bidang perdagangan dan transportasi dan Kabupaten Minahasa Utara yang unggul di bidang pertanian yang artinya kedua daerah ini dapat saling memberikan efek limpahan yaitu Kabupaten Minahasa Utara dapat menjual hasil pertaniannya di Kota Bitung dan Kota Bitung juga mendapat efek limpahan yang positif di karena adanya pasokan hasil pertanian dari Kabupaten Minahasa Utara yang dapat membantu memenuhi kebutuhan di daerah itu. Hal ini sesuai dengan pendapat Capello (2009) bahwa terdapat tiga jenis efek limpahan, yaitu efek limpahan teknologi, efek limpahan industri, dan efek limpahan pertumbuhan.

Sifat hubungan yang bersifat dua arah dan efek limpahan positif (*spread effect*) dari ketiga daerah, sesuai dengan pendapat Myrdal (1957) menyatakan bahwa spillover effect ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu *spread effect* serta *backwash effect*. *Spread effect* adalah sebuah konsep yang menyatakan bahwa output perekonomian pada sebuah kutub pertumbuhan akan memencar keluar dan memasuki ruang hinterland-nya, sehingga secara langsung pertumbuhan ekonomi di wilayah pertumbuhan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya. Sedangkan *backwash effect* adalah efek buruk yang dihasilkan dari munculnya kutub pertumbuhan, dimana terdapat polarisasi kegiatan ekonomi akibat munculnya aglomeras.

Dikaitkan dengan hasil uji kausalitas yang telah dilakukan dapat dikatakan bahwa di wilayah ini tidak terjadi polarisasi kegiatan ekonomi akibat munculnya aglomerus selain itu output perekonomian dari pusat pertumbuhan yaitu Kota Manado dapat masuk dan keluar ke ruang *hinterland*-nya.

Secara makro pertumbuhan ekonomi Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung di era pandemi tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 sempat terjadi pelambatan di tahun 2020 akibat pandemi covid-19 namun demikian daerah-daerah ini mampu untuk kembali pulih di tahun 2021, dimana laju pertumbuhan ekonomi Kota Manado dari -3,16 % menjadi 5,15%, Kabupaten Minahasa Utara dari -0,9% menjadi 5,36%, dan Kota Bitung dari 1,37% menjadi 4,6 %. Hal ini sesuai dengan pendapat Sukirno (2000) bahwa perekonomian suatu negara dikatakan berhasil apabila kegiatan ekonominya lebih tinggi dari yang dicapai pada masa sebelumnya, serta perkembangan kegiatan perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah.

Hasil penelitian ini sesuai juga dengan hasil penelitian dari Chandra Saniman (2023) mengenai efek limpahan pertumbuhan ekonomi di daerah Bolaang Mongondow Raya yang memperlihatkan bahwa di Kota Kotamubagu, Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terdapat hubungan kausalitas dua arah yang saling memberikan efek limpahan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Di daerah-daerah tersebut hubungan kausalitas serta efek limpahan disebabkan oleh perbedaan-perbedaan potensi sumber daya alam, karakteristik wilayah, sektor unggulan. Selain itu faktor keterkaitan wilayah (ketetanggaan) dan komplementaritas atas barang dan jasa serta kondisi infrastruktur yang baik dan saling terkoneksi juga turut mempengaruhi kegiatan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi tersebut tidak terlepas dari dinamika ekonomi masing-masing daerah yaitu Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung yang dapat mempengaruhi daerah lainnya melalui efek limpahan yang diberikan, efek limpahan tersebut merupakan dampak yang muncul karena adanya hubungan ketergantungan dan keterkaitan antar daerah. Saling ketergantungan dan keterkaitan yang dialami daerah-daerah ini terjadi karena adanya perbedaan dari segi sumber daya alam, sumber daya manusia, luas tanah dan stok modal sebagaimana pendapat ekonomi klasik (Sukirno (2000). Adanya ketergantungan karena perbedaan sumber daya, keterkaitan spasial dan dukungan infrastruktur yang baik dan terkoneksi akan memberikan hubungan dan efek limpahan positif pada pertumbuhan ekonomi.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi antara Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung selama era pandemi bersifat dua arah dengan efek limpahan yang positif bagi masing-masing daerah, artinya ketika suatu daerah mengalami peningkatan pertumbuhan, maka akan berdampak positif bagi pertumbuhan daerah lain.
2. Perbedaan potensi dan karakteristik sumber daya setiap daerah tidak selalu berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi regional, perbedaan tersebut dapat memunculkan komplementaritas dan substitusi atas barang dan jasa dan merangsang munculnya supply dan demand dalam rangka memenuhi kebutuhan.
3. Adanya hubungan kausalitas dua arah dan efek limpahan pertumbuhan ekonomi antar Kota Manado dengan Kabupaten Minahasa Utara, begitu juga antar Kota Manado dengan Kota Bitung, dan Kota Bitung dengan Kabupaten Minahasa Utara pada era pandemi.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, maka rekomendasi kebijakan yang dapat diberikan oleh penulis dari penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Adanya efek limpahan positif yang diberikan antar ketiga daerah ini yaitu Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara dan Kota Bitung pada era pandemi, menjadi isyarat bahwa

pemerintah harus mempertahankan fokus dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada ketiga daerah ini agar terus tercipta pembangunan antar daerah satu dengan daerah lainnya.

2. Pemerintah daerah dalam kebijakan pembangunannya harus memperhatikan pembentukan kutub pertumbuhan dan pemberdayaan sektor produksi primer, sekunder, dan tersier. Dengan mengalokasikan anggaran untuk pemberdayaan, investasi atau dukungan peralatan dan mengidentifikasi kawasan industri dalam penataan ruang.
3. Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi anggaran untuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur pendukung industri dan perdagangan (jalan dan bangunan), sehingga barang dan jasa dapat mengalir dengan lancar dan bermanfaat dalam kegiatan perekonomian antar sektor atau antar daerah.
4. Pemerintah daerah harus mengambil kebijakan strategis yang diarahkan pada penanaman modal, baik dalam bentuk penanaman modal dalam negeri maupun asing, yang difasilitasi oleh pemerintah provinsi dan kerjasama pembangunan (kerja sama tata ruang lintas batas).
5. Penulis sangat berharap penelitian ini dapat terus dikembangkan dengan memodifikasi atau menambah variabel dan metode yang digunakan. Untuk mendapatkan hasil yang lebih lengkap dapat dijadikan acuan dan bahan perbandingan dalam proses membangun kebijakan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln, 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*, Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistika – Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota Di Sulawesi Utara
- Fingleton, B. 2003. Externalities, Economic Geography, and Spatial Econometrics: Conceptual and Modeling Developments. *International Regional Science Review*. Vol. 26, No. 2, h. 197–207.
- Gujarati, D.N. & D.C. Porter, (2009), “Basic Econometrics”, 5th edition, McGraw-Hill, New York, (terjemahan: Mardanugraha, dkk., 2010, *Dasardasar Ekonometrika*”, Salemba Empat).
- Huang, Z. (2020). The spatial spillover effect of input and output of scientific Progress on regional economic growth: the case of Guangdong Province. *Open Journal of Statistics*, 10(03), 540.
- Myrdal, G. (1957). *Economic Theory and Under-development Regions* (1 ed.). London: G. Duckwort.
- Qibti, M. H. M., & Hendarto, R. M. (2020). Analisis Spillover Effect Pertumbuhan Ekonomi Antar Kabupaten/Kota Di Kawasan Purwomanggung Jawa Tengah Tahun 1988-2018. *Diponegoro Journal of Economics*, 9(4).
- Saniman, C., Kindangen, P., & Walewangko, E. N. (2023). Analisis Efek Limpaan Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Bolaang Mongondow Raya. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 24(1), 95-106.
- Sukirno, Sadono. 2014. *Ekonomi Pembangunan: Proses, masalah, dan dasar Kebijakan* (edisi ke kedua). Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.
- Tarigan, Robinson. 2004. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Todaro P. Michael. 2000. *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga Jilid I*, Jakarta Penerbit : Erlangga
- Todaro, M.P. 2006. *Economic Development. Seventh Edition*, New York, Addition Wesley Longman, Inc.
- Widarjono, Agus, 2018. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews Edisi Kelima*. Cetakan pertama, Oktober.
- Widarjono, Agus. (2013). *Ekonometrika: Pengantar dan aplikasinya*, Ekonosia, Jakarta.
- Widodo, 2019. *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*. Edisi Pertama. Cetakan Ketiga, Januari.
- Wullur, R. O., Koleangan, R. A., & Niode, A. O. (2019). Analisis Kausalitas Pendapatan Asli Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2001-2017. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(03).

ANALISIS PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO UNTUK MENINGKATKAN EASE OF DOING BUSINESS PADA KOTA MANADO

Honny David Kansil¹, Een N Walewangko², Vecky A.J Masinambow³

Program Studi Magister Ilmu Ekonomi,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Sam Ratulangi

E-mail: honnykansil@gmail.com, eenwalewangko@unsrat.ac.id, vajmasinambow@unsrat.ac.id

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia melakukan banyak perubahan dari segi kemudahan untuk berusaha dalam rangka peningkatan serta menciptakan iklim investasi yang semakin baik dan mampu merangsang usaha baru untuk tumbuh dan lebih berkembang di Indonesia. Untuk meningkatkan investasi dan mempercepat pertumbuhan Ekonomi serta memperbaiki sistem Good Governance yang lebih baik. Dengan terbentuknya Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, maka Pemerintah Indonesia telah meluncurkan OSS-RBA untuk mempermudah pembuatan izin usaha. Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbedaan dari pelayanan pengajuan izin usaha sebelum dan sesudah OSS-RBA. Dengan harapan dapat memudahkan usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah dalam berusaha serta meningkatkan kepercayaan investor untuk membuka lapangan kerja. Sumber data penelitian ini adalah data primer dengan lokasi penelitian di DPMPTS Kota Manado. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Uji beda T-Test dan Regresi Linear Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan pelayanan perizinan sebelum dan sesudah OSS-RBA, dilihat secara bersama-sama atau simultan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan perizinan berusaha berbasis risiko terhadap prosedur, waktu dan biaya. Namun secara parsial biaya tidak berpengaruh signifikan terhadap perizinan berusaha berbasis risiko dikarenakan adanya biaya yang timbul sebagai persyaratan dasar dari perizinan usaha tersebut. Untuk itu diperlukan penyesuaian regulasi serta sosialisasi oleh DPMPTSP Kota Manado untuk meningkatkan kemudahan berusaha (Ease of Doing Business) di Kota Manado.

Kata Kunci : Perizinan berusaha berbasis risiko, OSS-RBA, Ease of Doing Business

ABSTRACT

The Indonesian government has made many changes in terms of ease of doing business in order to improve and create a better investment climate and be able to stimulate new businesses to grow and develop more in Indonesia. To increase investment and accelerate economic growth and improve a better Good Governance system. With the formation of Government Regulation No. 5 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing, the Government of Indonesia has launched OSS-RBA to facilitate the issuance of business licenses. This study aims to see the differences in business license application services before and after OSS-RBA. With the hope that it can facilitate micro, small and medium enterprises in doing business and increase investor confidence to open as many jobs as possible. The data source of this research is primary data with the research location at DPMPTS Manado City. The research methods used are T-Test and Multiple Linear Regression methods. The results showed that there were differences in licensing services before and after OSS-RBA, seen together or simultaneously that there was a positive and significant effect of risk-based business licensing on procedures, time and costs. However, partially, costs do not have a significant effect on risk-based business licensing due to the costs incurred as a basic requirement of the business license. For this reason, regulatory adjustments and socialization are needed by DPMPTSP Manado City to improve the ease of doing business in Manado City..

Keywords : Risk-Based Business Licensing, OSS-RBA, Ease of Doing Business

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintah Pusat melakukan reformasi tentang perizinan berusaha karena dinilai tidak ada kepastian waktu dalam mengurus izin, serta kurang transparansi dalam pengurusan izin dan

tidak efisiensi. Berjalannya waktu Pemerintah Indonesia memangkas birokrasi perizinan guna peningkatan investasi, karena tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan kemudahan berusaha (ease of doing business) di Indonesia. Pemerintah Indonesia melakukan banyak perubahan dari segi kemudahan untuk berusaha dalam rangka peningkatan serta menciptakan iklim investasi yang semakin baik dan mampu merangsang usaha baru untuk tumbuh dan lebih berkembang di Indonesia, maka secara yuridis meluncurkan Sistem OSS (Online Single Submission) versi 1.0 pada tanggal 21 Juni 2018 oleh Pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. OSS diimplementasikan kurang lebih setahun namun ternyata masih banyak pihak yang berpendapat bahwa sistem ini masih terdapat kekurangan dalam praktiknya.

Oleh karena itu, Pemerintah senantiasa memperbaiki Sistem OSS demi terciptanya akan suatu iklim Investasi yang semakin baik. Maka BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) mengumumkan akan terjadi migrasi data perusahaan dari OSS versi 1.0 ke OSS versi 1.1 pada hari Jumat tanggal 01 November 2019 sampai dengan hari Minggu tanggal 03 November 2019. Dan selama tiga hari tersebut maka layanan OSS dihentikan untuk sementara. Sistem OSS versi 1.1 bukan sebuah pengembangan dari sistem OSS versi 1.0 akan tetapi merupakan suatu upaya Pemerintah membangun sistem baru berdasarkan hasil evaluasi segala permasalahan dan kelemahan yang ada pada sistem OSS versi 1.0 sehingga dilakukan penyempurnaan struktur database dan melengkapi berbagai validasi.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat resiko kegiatan usaha. Dengan adanya penyesuaian pelaksanaan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja agar dapat mendorong lebih kuat lagi semangat penyederhanaan (pengurangan izin) melalui penetapan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) yang berbasis risiko dan Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal pengganti dari Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan persyaratan di Bidang Penanaman Modal (DNI) sebagai basis dalam penetapan izin. Maka terbentuklah Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan harapan terjadi iklim usaha yang lebih kondusif yang artinya memudahkan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah untuk berusaha, serta meningkatkan kepercayaan Investor untuk membuka lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya.

Sistem OSS Berbasis Risiko ini merupakan pembaruan dari sistem OSS versi 1.1 yang dibangun sejak bulan Maret 2021 dengan mengintegrasikan sistem di lingkup kabupaten/kota, lingkup Provinsi, Lingkup Kementerian/Lembaga dengan sistem OSS yang ada di pusat Kementerian Investasi/BKPM, sehingga pada tanggal 09 Agustus 2021 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo didampingi Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan Sri Mulyani meluncurkan sistem OSS Berbasis Risiko. Sejak saat itu perizinan berusaha yang ada di Indonesia diarahkan dengan sistem OSS RBA.

Tabel 1 Perkembangan Jenis Perizinan Berusaha

No	Tahun	Jenis Perizinan untuk Memulai Berusaha (Starting a business)
1	2016	- SITU (Surat Izin Tempat Usaha) - HO (Hinder Ordinary)/Izin Gangguan - TDP (Tanda Daftar Perusahaan) - SIUP (Surat izin Usaha Perdagangan) - IMB
2	2017	- SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) - TDP (Tanda Daftar Perusahaan) - TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) - Izin Operasional Rumah Sakit & Klinik - Izin Operasional Sekolah - Izin LPK - IMB
3	2018	- SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) - TDP (Tanda Daftar Perusahaan) - TDUP (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) - Izin Operasional Rumah Sakit & Klinik - Izin Operasional Sekolah - Izin LPK - IMB - Peralihan ke OSS versi 1.0
4	2019	- Izin Usaha OSS versi 1.0 - Izin Operasional/Komersial - Izin Lokasi - Izin Lingkungan - IMB - Izin Peralihan ke OSS versi 1.1
5	2020	- Izin Usaha OSS versi 1.1 - Izin Operasional/Komersial - Izin Lokasi - Izin Lingkungan - IMB
6	2021 s/d sekarang	- Izin OSS RBA - PBUMKU (Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha) - PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) - Persetujuan Lingkungan - PBG (Persetujuan Bangunan Gedung)

Sumber Data DPMPTSP Kota Manado

Adam Jose Sihombing, Kadek Agus Sudiarawan, (2022) dengan jurnal berjudul “Efektifitas Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) Dalam Perizinan Berusaha di Kota Denpasar” dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan OSS-RBA sudah dijalankan dan masuk dalam taraf efektif sebagai upaya mempercepat proses perizinan di Kota Denpasar sesuai dengan landasan peraturan yakni Peraturan Pemerintah No.5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, kemudian (Satriyo Rahman Nur Pambudi, 2023) dalam jurnalnya berjudul “Kebijakan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single Submission Berbasis Good Governance di Kota Surakarta” mengemukakan hasil penelitian bahwa kebijakan perizinan sistem OSS pada DPMPTSP Kota Surakarta berbasis good governance sudah cukup baik dengan memberikan wadah bagi masyarakat.

Hadirnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dapat kita lihat mekanisme mulai dari segi Prosedur Pelaku Usaha tidak diwajibkan untuk mendatangi Dinas Perizinan setempat oleh karena semua dokumen dan registrasi dapat dilakukan lewat online dengan mengunjungi website oss.go.id. Dari segi waktu tentunya terjadi pemangkasan dari lama menjadi cepat, serta dari segi biaya tidak dipungut alias gratis, bahkan tidak ada biaya transportasi yang digunakan. Untuk itu sangatlah penting Perizinan Berusaha berbasis Risiko hadir ditengah-tengah era globalisasi akan perubahan pelayanan kepada masyarakat terlebih khusus di Kota Manado, sehingga pada awal bulan Januari pada tahun 2019 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado langsung menerapkan metode perizinan berusaha online yang baru ini dengan membuka tempat layanan yang ada di dalam kompleks Manado Town Square dengan sebutan

PTSP on Mall selain pelayanan perizinan berusaha online yang ada di lokasi kompleks Kantor Walikota Manado yang berada di Jalan Balai Kota No. 1.

Ease of Doing Business sering juga disebut dengan istilah indeks kemudahan berbisnis yang dibuat oleh Bank Dunia (World Bank) untuk melakukan penentuan peringkat kemudahan berbisnis disebuah negara. Di dunia tampaknya indeks kemudahan bisnis ini disusun ke dalam bentuk peringkat sehingga bisa diketahui secara lebih lanjut mengenai kemampuan sebuah negara dalam menjalankan bisnis. Kemudahan suatu wilayah negara dalam menjalankan bisnis tentu saja turut dipengaruhi oleh peraturan dan kebijakan yang berlaku di area tersebut.

Penelitian oleh (George M.V. Kawung, Christoffel M.O Mintardjo, Wensy I. Rompas, Christoffel Kojo, Imelda J Ogi, 2019) judul "*Ease of Doing Business in East Indonesia Region : Starting a Business Study in North Sulawesi Province SMEs*" dengan hasil penelitian bahwa studi yang dilakukan oleh Bank Dunia mengenai Ease of Doing Business untuk memulai bisnis menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan positif dalam kemudahan berusaha khususnya di wilayah 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara.

Pemerintah Indonesia sendiri berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan serta tata kelola yang ada dan terus melakukan perbaikan disetiap indikator yang menjadi prioritas. Indonesia terus menunjukkan prestasinya dalam memperoleh predikat sebagai negara yang ramah untuk berbisnis. Hal ini terlihat dari peringkat Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia yang terus membaik. Pada tahun 2018 tercatat EoDB di Indonesia berada di peringkat 72 dunia, bahkan lebih baik dari China yang menempati posisi ke-78. Pada Tahun 2020, tercatat EoDB Indonesia berada di peringkat 73 dunia dengan tujuan penilaian tersebut adalah untuk memberikan dasar yang objektif kepada para pelaku pasar tentang kemudahan berusaha di suatu negara.

Semakin baiknya EoDB ini secara langsung menunjukkan upaya pemerintah dalam menciptakan iklim yang kondusif untuk memulai suatu usaha. Peringkat kemudahan bisnis yang membaik menunjukkan keadaan ekonomi dan sosial yang juga membaik. Setidaknya ada empat upaya pemerintah untuk menggenjot kemudahan berbisnis di Indonesia. Pertama dengan adanya perbaikan regulasi di berbagai sektor. Kedua, adanya upaya mempercepat standar waktu pelayanan dengan menyederhanakan prosedur. Ketiga, melakukan sosialisasi lebih efektif terhadap regulasi yang dianggap dapat mendorong kemudahan berusaha di Indonesia. Dan keempat adalah peningkatan pelayanan melalui sistem online, seperti menerapkan Online Single Submission (OSS).

Tabel 2 Peringkat Negara dalam Kemudahan Berusaha (*Ease of Doing Business*)

Klasifikasi	Negara	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Sangat Mudah	Selandia Baru	1	1	1	1	2	2	3	3	3	3
Sangat Mudah	Singapura	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1
Sangat Mudah	Hongkong	3	4	5	4	5	3	2	2	2	2
Sangat Mudah	Denmark	4	3	3	3	3	4	5	5	5	6
Sangat Mudah	Korea Selatan	5	5	5	4	5	4	5	7	8	8
Sangat Mudah	Amerika Serikat	6	8	6	8	7	7	4	4	4	5
Sangat Mudah	Georgia	7	6	9	16	24	15	8	9	16	12
Sangat Mudah	Britania Raya	8	9	7	7	6	8	10	7	7	4
Sangat Mudah	Norwegia	9	7	8	6	9	6	9	6	6	8
Sangat Mudah	Swedia	10	12	10	9	8	11	14	13	14	14
Sangat Mudah	Malaysia	12	15	24	23	18	18	6	12	18	21
Sangat Mudah	Australia	14	18	14	15	13	10	11	10	15	10
Sangat Mudah	Rusia	28	31	35	40	51	62	92	112	120	123
Sangat Mudah	Jepang	29	39	34	34	34	29	27	24	20	18
Sangat Mudah	China	31	46	78	78	84	90	96	91	91	79
Sangat Mudah	Belanda	42	36	32	28	28	27	28	31	31	30
Mudah	Italia	58	51	46	50	45	56	65	73	87	80
Mudah	Brunai Darussalam	66	55	56	72	84	101	59	79	83	112
Mudah	Indonesia	73	73	72	91	109	114	120	128	129	121
Mudah	Afrika Selatan	84	82	82	74	73	43	41	39	35	34
Sedang	Mesir	114	120	128	122	131	112	128	109	110	94
Sedang	Brasil	124	109	125	123	116	120	116	130	126	127
Dibawah rata-rata	Irak	172	171	168	165	161	156	151	165	164	166
Dibawah rata-rata	Somalia	190	190	190	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Sumber Data Doing Business 2020

Berdasarkan dari penjelasan latar belakang dan masalah, penelitian ini sangat menarik untuk diteliti dikaitkan dengan minat investasi di Kota Manado dalam hal kemudahan berusaha. Maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan mengangkat judul “ *Analisis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk Meningkatkan Ease of Doing Business pada Kota Manado*”.

Perumusan Masalah

- 1. Apakah ada perbedaan Implementasi Perizinan Berusaha sebelum dan sesudah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko?
- 2. Apakah Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dapat memiliki pengaruh ditinjau dari sisi Prosedur?

3. Apakah Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dapat memiliki pengaruh ditinjau dari sisi Waktu?
4. Apakah Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dapat memiliki pengaruh ditinjau dari sisi Biaya?
5. Apakah Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dapat memiliki pengaruh secara bersama-sama ditinjau dari sisi Prosedur, Waktu, dan Biaya?

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui perbedaan Implementasi Perizinan Berusaha sebelum dan sesudah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
2. Mengetahui Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dapat memiliki pengaruh ditinjau dari sisi Prosedur.
3. Mengetahui Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dapat memiliki pengaruh ditinjau dari sisi Waktu.
4. Mengetahui Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dapat memiliki pengaruh ditinjau dari sisi Biaya.
5. Mengetahui Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dapat memiliki pengaruh secara bersama-sama ditinjau dari sisi Prosedur, Waktu dan Biaya

Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis dapat mengetahui masalah yang sering terjadi dalam proses untuk mendapatkan Perizinan Berusaha yang ada di Kota Manado.
2. Bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado adalah sebagai bahan acuan untuk meningkatkan peringkat *Ease of Doing Business* dunia .
3. Bagi masyarakat, agar mengetahui kemudahan pelayanan yang dilakukan pemerintah melalui Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

TINJAUAN PUSTAKA

Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah

Perencanaan pembangunan ekonomi daerah adalah upaya untuk merencanakan penggunaan sumber daya publik yang tersedia disuatu wilayah menjadi lebih dari sebelumnya melalui perbaikan kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumber daya secara bertanggung jawab.

Pembangunan Ekonomi Daerah adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 1999). Secara umum tujuan pembangunan ekonomi adalah sebagai berikut : pertama, mengembangkan lapangan kerja bagi penduduk yang ada sekarang. Kedua, mencapai peningkatan ekonomi daerah. Ketiga, mengembangkan basis ekonomi dan kesempatan kerja yang beragam.

Definisi dasar dari sebuah perencanaan dipastikan sebagai suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu (Tjokroamidjojo, 1984), sama halnya dengan definisi dari perencanaan pembangunan. Selanjutnya Tjokroamidjojo, mengartikan perencanaan pembangunan (termasuk sumber-sumber ekonomi) yang terbatas adanya, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu berdasarkan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara efektif dan efisien.

Investasi

Investasi sangat berperan penting pada tercapainya kesejahteraan dan kemakmuran bangsa yang tujuannya Pembangunan Nasional. Investasi dilakukan dengan tujuan utama untuk mendapatkan keuntungan, pendapatan, atau peningkatan nilai objek investasi. Menurut Susilo (2009) Investasi dapat diartikan sebagai komitmen untuk mengalokasikan sejumlah dana pada satu atau lebih aset (pada saat ini) yang diharapkan akan mampu memberikan return (keuntungan) dimasa yang akan datang. Investasi yaitu penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan memiliki jangka waktu yang panjang dengan harapan mendapatkan

laba di masa yang akan datang. Keputusan penanaman modal tersebut dapat dilakukan oleh individu atau suatu entitas yang mempunyai kelebihan dana (Sunariyah, 2011).

Investasi merupakan suatu usaha yang dilakukan dengan mengorbankan sejumlah dana yang digunakan untuk penanaman modal suatu aktiva untuk jangka panjang dengan tujuan tertentu yaitu memperoleh keuntungan dari hasil pengorbanan tersebut. Investasi yang lazim disebut juga dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal merupakan salah satu komponen yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Menurut Rahardja dan Manurung (2008) mengemukakan pengertian investasi adalah keputusan menunda konsumsi sumber daya atau bagian dari penghasilan saat ini demi meningkatkan kemampuan menambah/menciptakan nilai hidup (penghasilan dan atau kekayaan) dimasa mendatang.

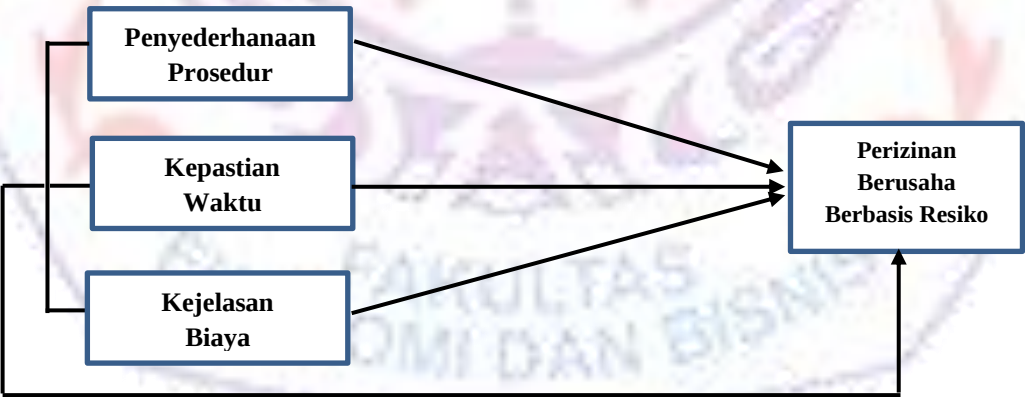
Perizinan

Pengertian dari izin (vergunning) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin dapat juga diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Ateng Syafrudin mengatakan bahwa izin bertujuan dan berarti menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh, atau Als opheffing van een algemene verbodsregel in het concrete geval, (sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret).

Perizinan adalah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan yang bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat (Adrian Sutedi, 2011). Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan suatu usaha yang harus dimiliki atau diperoleh suatu perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan tindakan. Perizinan secara sederhana adalah legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

Kerangka Konseptual

Gambar Kerangka Pikir



Hipotesis

1. Diduga ada perbedaan Implementasi Perizinan Berusaha sebelum dan sesudah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2. Diduga Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko memiliki pengaruh ditinjau dari sisi Prosedur.
3. Diduga Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko memiliki pengaruh ditinjau dari sisi Waktu.
4. Diduga Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko memiliki pengaruh ditinjau dari sisi Biaya.
5. Diduga Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dari sisi Prosedur, Waktu dan Biaya secara bersama-sama dapat meningkatkan Ease of Doing Business di Kota Manado

3. METODE PENELITIAN

Data dan Sumber Data

Data yang digunakan adalah data sekunder untuk peringkat *eodb* diperoleh melalui media elektronik dan data primer yang diperoleh melalui wawancara pada 50 responden (40 persen ASN, 34 persen Swasta, 22 persen wirausaha dan 4 persen dengan pekerjaan lainnya. Unit analisa penelitian adalah Kota Manado (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado).

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha, diukur dalam skala linkert dengan bobot 1-5.
2. Prosedur Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah penilaian terhadap proses, langkah-langkah atau tahapan-tahapan dari serangkaian kegiatan dari permohonan perizinan berusaha sampai pemberian perizinan berusaha, diukur dalam skala linkert dengan bobot 1-5.
3. Waktu Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah penilaian terhadap lamanya penyelesaian administrasi dari permohonan perizinan berusaha sampai pemberian perizinan berusaha, diukur dalam skala linkert dengan bobot 1-5.
4. Biaya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah penilaian terhadap pengeluaran dari permohonan perizinan berusaha sampai pemberian perizinan berusaha, diukur dalam skala linkert dengan bobot 1-5.

Metode Analisis

- Analisis Uji Beda T-test

Metode Uji Neda T-Test merupakan uji beda dua sampel berpasangan. sampel berpasangan merupakan subjek yang sama, tapi mengalami perlakuan yang berbeda. Model uji bed aini digunakan untuk menganalisis model penelitian sebelum dan sesudah. Menurut Widiyanto (2013:35), paired sample t-test merupakan salah satu metode pengujian yang digunakan untuk mengkaji keefektifan perlakuan, ditandai adanya perbedaan rata-rata sebelum dan rata-rata sesudah diberikan perlakuan.

Asumsi dasar penggunaan uji ini adalah observasi atau penelitian untuk masing-masing pasangan harus dalam kondisi yang sama. Perbedaan rata-rata harus berdistribusi normal. Varian masing-masing variable dapat sama atau tidak. Untuk melakukan uji ini, diperlukan data yang berskala interval atau ratio. Yang dimaksud dengan sampel berpasangan adalah kita menggunakan sampel yang sama, tetapi pengujian yang dilakukan pada sampel tersebut dua kali dalam waktu yang berbeda atau dengan interval waktu tertentu. Pengujian dilakukan dengan menggunakan significant 0.05 ($\alpha=5\%$) antar variabel independent dengan variabel dependen.

- Analisis Regresi Berganda

Metode analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (X_1 , X_2 , dan X_3) terhadap variabel terikat (Y) dengan model penelitian :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e_i$$

Keterangan :

Y	= Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
X_1	= Prosedur Perizinan
X_2	= Waktu Perizinan
X_3	= Biaya Perizinan
β_0	= Intersep Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	= Koefisien regresi
e	= Standar error

Penelitian ini menggunakan data survey dalam bentuk skala linkert maka perlu dilakukan uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas) dan *confirmability* (objektivitas).

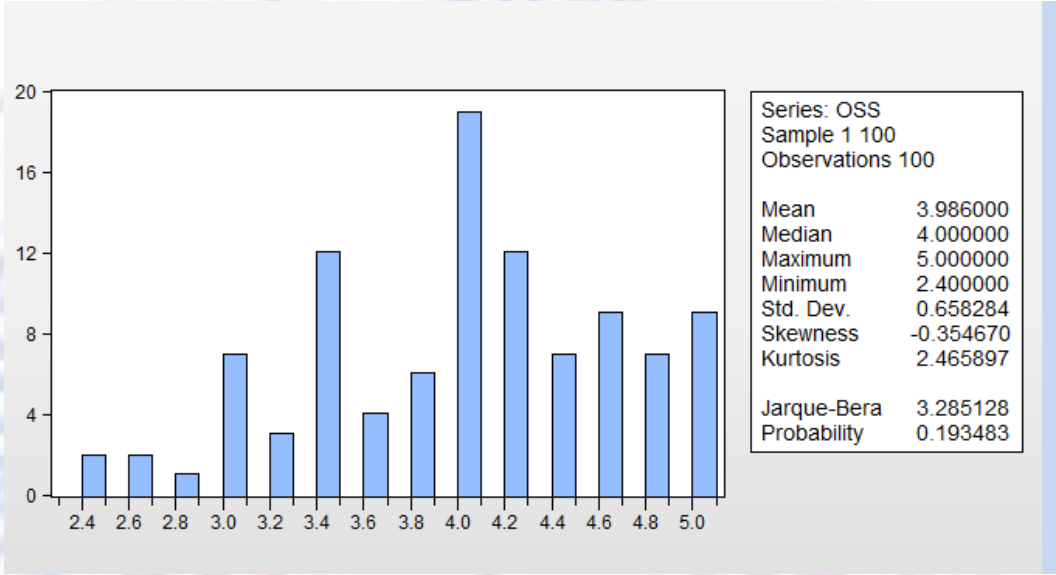
Juga melakukan Uji Asumsi Klasik untuk kelayakan model regresi linear berganda memenuhi asumsi dasar BLUE (Best Linier Unbiased Estimator).

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian
Analisis Uji Beda

Terdapat perbedaan perijinan berusaha sebelum OSS dan setelah OSS dilakukan uji beda T-Test data berpasangan dimana terdapat 50 responden yang menanggapi kondisi perijinan berusaha sebelum dan setelah OSS baik dilihat dari aspek prosedur perijinan, waktu perijinan dan biaya perijinan.

Gambar 1 Data Terdistribusi Normal



Sumber: Hasil Olahan Eviews 12.0

Gambar diatas menunjukkan bahwa data terdistribusi normal karena probabilita adalah 0,193483 atau > 0,05, dengan nilai Jarque Bera 3,285128.

Hasil penelitian uji beda T-test untuk perijinan berusaha sebelum OSS dan sesudah OSS menunjukkan nilai probabilitas t-test adalah 0,000 atau < 0,05, artinya terdapat perbedaan yang signifikan perijinan berusaha sebelum OSS dan setelah OSS.

Tabel 3 Hasil T – Test Data OSS RBA

Test for Equality of Means of OSS
Categorized by values of KODE
Date: 09/24/23 Time: 23:20
Sample: 1 100
Included observations: 100

Method	df	Value	Probability
t-test	98	-8.758135	0.0000
Satterthwaite-Welch t-test*	92.92338	-8.758135	0.0000
Anova F-test	(1, 98)	76.70493	0.0000
Welch F-test*	(1, 92.9234)	76.70493	0.0000

*Test allows for unequal cell variances

Analysis of Variance

Source of Variation	df	Sum of Sq.	Mean Sq.
Between	1	18.83560	18.83560
Within	98	24.06480	0.245559
Total	99	42.90040	0.433337

Category Statistics

KODE	Count	Mean	Std. Dev.	Std. Err. of Mean
0	50	3.552000	0.550414	0.077840
1	50	4.420000	0.433778	0.061345
All	100	3.986000	0.658284	0.065828

Sumber: Hasil Olahan Eviews 12.0

Analisis varians menunjukkan deviasi rata-rata kelompok dengan rata-rata keseluruhan adalah 18,83, sedangkan deviasi rata-rata nilai masing-masing dengan kelompoknya adalah 0,24. Rata-rata deviasi masing-masing dengan keseluruhan perijinan usaha adalah 0,43 lebih kecil dari deviasi rata-rata statistik 0,65 artinya deviasi perijinan berusaha dengan OSS lebih baik.

Hasil penelitian uji beda T-test untuk prosedur perijinan berusaha sebelum OSS dan sesudah OSS menunjukkan nilai probabilitas t-test adalah 0,000 atau $< 0,05$, artinya terdapat perbedaan yang signifikan prosedur perijinan berusaha sebelum OSS dan setelah OSS

Tabel 4 Hasil T – Test Data Prosedur Perijinan Berusaha

Test for Equality of Means of PROSEDUR
Categorized by values of KODE
Date: 09/24/23 Time: 23:21
Sample: 1 100
Included observations: 100

Method	df	Value	Probability
t-test	98	-9.922443	0.0000
Satterthwaite-Welch t-test*	95.31980	-9.922443	0.0000
Anova F-test	(1, 98)	98.45488	0.0000
Welch F-test*	(1, 95.3198)	98.45488	0.0000

*Test allows for unequal cell variances

Analysis of Variance

Source of Variation	df	Sum of Sq.	Mean Sq.
Between	1	26.69444	26.69444
Within	98	26.57111	0.271134
Total	99	53.26556	0.538036

Category Statistics

KODE	Count	Mean	Std. Dev.	Std. Err. of Mean
0	50	3.420000	0.562671	0.079574
1	50	4.453333	0.475046	0.067182
All	100	3.936667	0.733509	0.073351

Sumber: Hasil Olahan Eviews 12.0

Analisis varians menunjukkan deviasi rata-rata kelompok dengan rata-rata keseluruhan adalah 26,69, sedangkan deviasi rata-rata nilai masing-masing dengan kelompoknya adalah 0,27. Rata-rata deviasi masing-masing dengan keseluruhan prosedur perijinan usaha adalah 0,53 lebih kecil dari deviasi rata-rata statistik 0,73 artinya deviasi prosedur perijinan usaha dengan OSS lebih baik.

Tabel 5 Hasil T – Test Data Waktu Perijinan Berusaha

Test for Equality of Means of WAKTU
Categorized by values of KODE
Date: 09/24/23 Time: 23:22
Sample: 1 100
Included observations: 100

Method	df	Value	Probability
t-test	98	-10.46563	0.0000
Satterthwaite-Welch t-test*	89.73907	-10.46563	0.0000
Anova F-test	(1, 98)	109.5294	0.0000
Welch F-test*	(1, 89.7391)	109.5294	0.0000

*Test allows for unequal cell variances

Analysis of Variance

Source of Variation	df	Sum of Sq.	Mean Sq.
Between	1	57.76000	57.76000
Within	98	51.68000	0.527347
Total	99	109.4400	1.105455

Category Statistics

KODE	Count	Mean	Std. Dev.	Std. Err. of Mean
0	50	3.080000	0.829064	0.117247
1	50	4.600000	0.606092	0.085714
All	100	3.840000	1.051406	0.105141

Sumber: Hasil Olahan Eviews 12.0

Hasil penelitian uji beda T-test untuk waktu perijinan berusaha sebelum OSS dan sesudah OSS menunjukkan nilai probabilitas t-test adalah 0,000 atau < 0,05, artinya terdapat perbedaan yang signifikan waktu perijinan berusaha sebelum OSS dan setelah OSS.

Analisis varians menunjukkan deviasi rata-rata kelompok dengan rata-rata keseluruhan adalah 57,76, sedangkan deviasi rata-rata nilai masing-masing dengan kelompoknya adalah 0,52. Rata-rata deviasi masing-masing dengan keseluruhan waktu perijinan usaha adalah 1,105 lebih besar dari deviasi rata-rata statistik 1,05 artinya deviasi waktu perijinan usaha dengan OSS harus lebih dioptimalkan.

Hasil penelitian uji beda T-test untuk biaya perijinan berusaha sebelum OSS dan sesudah OSS menunjukkan nilai probabilitas t-test adalah 0,000 atau < 0,05, artinya terdapat perbedaan yang signifikan biaya perijinan berusaha sebelum OSS dan setelah OSS.

Tabel 6 Hasil T – Test Data Biaya Perijinan Berusaha

Test for Equality of Means of BIAYA				
Categorized by values of KODE				
Date: 09/24/23 Time: 23:23				
Sample: 1 100				
Included observations: 100				
Method	df	Value	Probability	
t-test	98	-9.737787	0.0000	
Satterthwaite-Welch t-test*	84.06560	-9.737787	0.0000	
Anova F-test	(1, 98)	94.82450	0.0000	
Welch F-test*	(1, 84.0656)	94.82450	0.0000	
*Test allows for unequal cell variances				
Analysis of Variance				
Source of Variation	df	Sum of Sq.	Mean Sq.	
Between	1	62.41000	62.41000	
Within	98	64.50000	0.658163	
Total	99	126.9100	1.281919	
Category Statistics				
KODE	Count	Mean	Std. Dev.	Std. Err. of Mean
0	50	3.180000	0.962353	0.136097
1	50	4.760000	0.624663	0.088341
All	100	3.970000	1.132219	0.113222

Sumber: Hasil Olahan Eviews 12.0

Analisis varians menunjukkan deviasi rata-rata kelompok dengan rata-rata keseluruhan adalah 62,41, sedangkan deviasi rata-rata nilai masing-masing dengan kelompoknya adalah 0,65. Rata-rata deviasi masing-masing dengan keseluruhan waktu perijinan usaha adalah 1,28 lebih besar dari deviasi rata-rata statistik 1,132 artinya deviasi biaya perijinan usaha dengan OSS harus lebih ditinjau kembali.

Analisis Regresi Berganda

Adapun teknik estimasi variabel dependen yang digunakan adalah *Ordinary Least Square (OLS)* memiliki persamaan regresi yang terbentuk dari hasil pengolahan data menggunakan Eviews 12.0 adalah sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3X_3 +e$$
$$Y = 1,765021 + 0,282653 X_1 + 0,324882 X_2 - 0.020636 X_3 +e$$

Tabel 7 Hasil Regresi Linear Berganda

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 09/28/23 Time: 21:16
Sample: 1 50
Included observations: 50

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.765021	0.497197	3.549943	0.0009
X1	0.282653	0.129155	2.188480	0.0337
X2	0.324882	0.096297	3.373763	0.0015
X3	-0.020636	0.085497	-0.241360	0.8103

R-squared0.446279

Adjusted R-squared0.410167

S.E. of regression0.333144

Sum squared resid5.105306

Log likelihood-13.90336

F-statistic12.35812

Prob(F-statistic)0.000005

Mean dependent var4.420000

S.D. dependent var0.433778

Akaike info criterion0.716135

Schwarz criterion0.869096

Hannan-Quinn criter0.774383

Durbin-Watson stat1.625392

Sumber : Hasil Olahan Eviews 12.0

Koefisien Determinasi

Dari hasil pengolahan data menunjukkan bahwa koefisien determinasi (Adj. R²) sebesar 0.410167 atau 41,016 % . Hal ini menunjukkan bahwa variabel – variabel independent dalam hal ini prosedur perijinan berusaha (X₁), waktu perijinan berusaha (X₂) dan biaya perijinan berusaha (X₃) secara bersama – sama memiliki pengaruh 41,016 % terhadap perijinan berusaha dengan OSS di Kota Manado. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Uji Statistik F

Uji F digunakan untuk melihat apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan atau bersama – sama terhadap variabel terikat. Dari hasil pengolahan menggunakan Eviews 12 dapat dilihat Prob (F-statistik) 0,00005. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$, Prob (F-statistik) $0,00005 < \alpha = 0.05$,

Ha: $b_1 \neq b_2 \neq \dots \neq b_k \neq 0$

Yang artinya semua variabel bebas (X₁, X₂, X₃) secara bersama – sama atau simultan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y.

Uji Statistik t

Berdasarkan hasil t pada tabel analisis regresi berganda dengan aplikasi Eviews 12 menunjukkan adanya tingkat signifikansi Variabel Bebas (X₁, dan X₂) terhadap perijinan berusaha dengan OSS (Y) di Kota Manado. Sedangkan X₃ secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Y.

1. Variabel Prosedur Perijinan Berusaha (X₁) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0337. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$, Nilai probabilitas X₁ $0,0337 < 0,05$, berarti Ho ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa Variabel Prosedur Perijinan Berusaha (X₁) berpengaruh secara signifikan dan berhubungan positif terhadap perijinan berusaha dengan OSS di Kota Manado.
2. Variabel Waktu Perijinan Berusaha (X₂) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0015 . Pada tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$, Nilai probabilitas X₂ $0,0015 < 0,05$, berarti Ho ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa Variabel Waktu Perijinan Berusaha (X₂) berpengaruh secara signifikan dan berhubungan positif terhadap perijinan berusaha dengan OSS di Kota Manado.
3. Variabel Biaya Perijinan Berusaha (X₃) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,8103 . Pada tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$, nilai probabilitas X₃ $0,8103 > 0,05$, berarti Ho diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa Variabel Biaya Perijinan Berusaha (X₃) tidak berpengaruh signifikan terhadap perijinan berusaha dengan OSS di Kota Manado.

Pembahasan

Pengaruh secara parsial Prosedur terhadap Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Hadirnya Perizinan Berusaha Berbasis Risiko maka dilihat dari segi prosedurnya sudah sangat jelas bahwa pelaku usaha tidak diwajibkan untuk mendatangi akan Dinas Perizinan oleh karena semua dokumen dan registrasi dapat dilakukan secara online dengan website oss.go.id supaya mendapatkan akses masuk dengan membuat nama pengguna (perorangan/badan usaha) dan kata sandi. Dengan syarat adalah memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta memiliki surel (surat elektronik) atau Nomor Whatsapp untuk membuat akun platform OSS RBA, sedangkan untuk badan usaha menyediakan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan usaha, nomor pengesahan akte badan usaha dari kemenkumham.

Langkah selanjutnya adalah memasukkan bidang usaha dan nilai investasi, setelah semua data dilengkapi maka sistem akan mengeluarkan NIB (Nomor Induk Berusaha). Pemberitahuan akan diberikan kepada setiap Lembaga pemerintah yang berwenang sebagai penerbit izin usaha. Jika verifikasi diperlukan, Lembaga pemerintah yang berwenang akan memverifikasi kesesuaian usaha. Sistem OSS RBA kemudian akan memverifikasi pengajuan dengan status disetujui, kurang lengkap, atau ditolak. Sistem juga akan mengirimkan permintaan untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan jika statusnya kurang lengkap dari dashboard masing-masing dinas teknis terkait.

Pelaku usaha dengan risiko skala rendah dan skala menengah rendah dapat menyelesaikan pengurusan izin usahanya melalui OSS RBA setelah persyaratan dasarnya terpenuhi. Undang-undang mengatur bahwa kegiatan usaha yang tidak berdampak signifikan pada lingkungan dan sumber daya alam atau mudah untuk dijalankan dapat memulai kegiatannya langsung setelah memperoleh NIB. Sementara itu, kegiatan usaha berisiko skala menengah tinggi dan skala tinggi wajib memiliki NIB, lalu kementerian/Lembaga/pemerintah daerah akan memverifikasi persyaratan/standar dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha tersebut. OSS RBA merupakan sistem satu pintu, karena itu pelaku usaha tidak perlu mengunjungi banyak tempat untuk mengurus izin karena telah terintegrasi dengan kementerian/Lembaga/pemerintah daerah dalam hal ini DPMPTSP dan Dinas/Badan sebagai instansi teknis. Sehingga menciptakan pelayanan perizinan berusaha yang mudah dan cepat. Maka dapat disimpulkan dari segi prosedur sudah sangat jelas berhubungan erat dan berpengaruh secara signifikan terhadap Perizinan Berusaha karena dengan cara ini dapat memberikan kemudahan bagi semua pelaku usaha.

Hasil penelitian ini sangat sesuai dengan hasil penelitian oleh Imam Sucahyo, Husni Mubaraq, Robbiyatul Adawiyah (2022) dengan judul Implementasi Program Online Single Submission dalam Pelayanan Perizinan Usaha Mikro pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Probolinggo di Era New Nasional, dengan menggunakan data primer dan sekunder serta teknik pengumpulan data tertulis, observasi dan wawancara. Dimana hasil penelitian ini menunjukkan proses implementasi pelayanan perizinan usaha mikro berbasis OSS RBA telah dilaksanakan dengan sangat baik dan berlandaskan teori untuk mengukur keberhasilan implementasi oleh Van Meter dan Van Horn (Augustino, 2016).

Hasil penelitian ini sangat bertentangan dengan hasil penelitian oleh Liatosa Yundrina (2023) dengan judul Implementasi Kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach di Kecamatan Kalidoni Kota Palembang dengan metode penelitian deskriptif kualitatif. Dimana hasil penelitian menunjukkan ketidaklengkapan substansi pengaturan dalam sejumlah Peraturan Pemerintah, belum terbitnya ketentuan teknis (yang masih didelegasikan ke peraturan menteri), dan proses integrasi antar sistem belum optimal menjadi hambatan bagi daerah untuk menindaklanjuti dan menerapkan OSS RBA secara cepat.

Pengaruh secara parsial Waktu terhadap Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Mekanisme pada perizinan berusaha berbasis risiko dilihat dari segi jangka waktu penyelesaian tergantung pada setiap tahapan proses berdasarkan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)/aturan teknis masing-masing kementerian terkait. Seperti contoh untuk tingkat risiko rendah maka dibutuhkan hanya NIB (Nomor Induk Berusaha) saja dan untuk tingkat risiko menengah rendah secara otomatis mengeluarkan sertifikat standar oleh sistem OSS. Dalam hal ini jangka waktu yang diperlukan untuk tingkat risiko rendah dan menengah rendah sangatlah cepat. Banyak pelaku usaha yang merasa dengan adanya perizinan berusaha berbasis risiko

membuat banyak perubahan yang membantu bagi pelaku usaha yang ada. Kemudian contoh untuk risiko menengah tinggi dan tinggi memerlukan adanya tahapan verifikasi dari masing-masing kementerian yang berhubungan dengan kegiatan usahanya masing-masing.

Hasil penelitian ini sangat sesuai dengan hasil penelitian oleh Syafrial, Surya Wahyuni latief, Novi Yusniati (2021) dengan judul Efektifitas Online Single Submission di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dipaparkan secara deksriptif. Dimana hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan publik untuk perizinan usaha berjalan efektif melalui program online single submission karena lebih memudahkan pemerintah untuk mendata pelaku usaha yang ada di Kota Jambi secara cepat, efisien dan transparan.

Hasil penelitian ini sangat bertentangan dengan hasil penelitian oleh Muhammad Fazar (2023) dengan judul Inovasi Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single Submission oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda dengan teknik analisis data berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Dan hasil penelitian menunjukkan jumlah pengunjung layanan OSS baik MPP atau kecamatan dari tahun 2021-2022 mengalami penurunan karena sistem sering gangguan serta kurangnya sosialisasi dan kurangnya kepastian waktu serta metode yang digunakan untuk menghubungi kembali masyarakat.

Pengaruh secara parsial Biaya terhadap Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Dari segi biaya pada perizinan berusaha berbasis risiko sudah tidak dipungut biaya alias gratis. dan jikalau pun ada, pada OSS RBA semua biaya dibayarkan secara online melalui sistem berdasarkan ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang akan ditemui ketika akan mengurus persyaratan dasar KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) atau Retribusi yang akan ditemukan pada saat mengurus PBG (Persetujuan Bangunan Gedung Bersama SLF (Sertifikat Laik Fungsi)). Tetapi ada juga biaya yang dikeluarkan untuk pihak ketiga dalam hal ini biaya konsultan yang terjadi sebagai biaya jasa keahlian yang ditekukan ketika mengurus persyaratan dasar Persetujuan Lingkungan. Dan biaya inilah yang menjadi pengeluaran dari pelaku usaha yang ada ketika melakukan pengurusan pada persyaratan dasar dari izin usaha yang akan diterbitkan dikarenakan nominalnya bervariasi dan tidak ada standar penetapan harga yang ada.

Hasil penelitian ini sangat sesuai dengan hasil penelitian oleh Nana Rahdiana, Afif Hakim, Muhammad Revan Koesno, Nur Rahma Anwar dengan judul Pendampingan Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Para Pelaku UMKM Desa Jayamukti Karawang yang memakai metode community development maka hasil penelitian ini mengatakan bahwa penerbitan NIB cukup sederhana dan mudah, tidak membutuhkan waktu yang panjang dan dipastikan tidak ada biaya (gratis).

Hasil penelitian ini sangat bertentangan dengan hasil penelitian oleh Reziana Dian Islami, Ida Farida, Hikmatul Maulida dengan judul Analisis Pelaksana Online Single Submission Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tegal yang memakai metode deskriptif kualitatif menemukan hasil penelitian bahwa terdapat kendala dalam perizinan melalui sistem OSS ini yaitu para pelaku usaha perseorangan yang telah mendaftarkan usahanya, telah mendapatkan izin usaha namun belum efektif, agar izin usaha tersebut berlaku efektif maka pelaku usaha diharuskan untuk memenuhi komitmen. Pemenuhan komitmen inilah dianggap memberatkan beban pelaku usaha karena harus melibatkan pihak ketiga dan mengeluarkan biaya.

Pengaruh secara bersama-sama atau secara simultan variabel bebas Prosedur, Waktu, dan Biaya terhadap variabel terikat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Berdasarkan hasil uji hipotesis pengaruh variabel bebas prosedur, waktu, dan biaya secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kota Manado.

Hasil penelitian ini sangat sesuai dengan hasil penelitian oleh Rohma Rizki (2021) dengan judul penelitian Efektifitas sistem Online Single Submission (OSS) dalam pelayanan perizinan berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Provinsi Sumatera Selatan dengan metode penelitian observasi,

wawancara dan dokumentasi mengemukakan hasil penelitian bahwa OSS meningkatkan jumlah perizinan, prosedur yang jelas melalui SOP, membutuhkan sumber daya yang kecil dengan IKM meningkat, berkurangnya beban kerja dengan adanya insentif, pelayanan menjadi lebih cepat, mudah dan murah.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Terdapat perbedaan dalam pelayanan Perizinan Berusaha Sebelum dan sesudah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilihat dari aspek Prosedur Perizinan, Waktu Perizinan dan Biaya Perizinan.
2. Variabel Prosedur secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kota Manado.
3. Variabel Waktu secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kota Manado.
4. Variabel Biaya secara parsial berpengaruh positif terhadap Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, namun tidak berpengaruh signifikan terhadap Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kota Manado.
5. Variabel Prosedur, Waktu dan Biaya secara Bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kota Manado.

Saran

1. Pemerintah Kota Manado diharapkan dapat melakukan penyesuaian regulasi yang dikeluarkan oleh Peraturan Pemerintah, Kementerian/Lembaga yang bersinggungan dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan melihat dari aspek Prosedur, Waktu dan Biaya agar supaya setiap persyaratan yang ada dapat memudahkan para pelaku usaha dengan melihat konsekuensi yang ada agar tidak disalahgunakan dalam memulakan/melaksanakan kegiatan usahanya nanti.
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Manado sebagai dinas yang membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintah dalam bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang didalamnya mempunyai fungsi sebagai pengawasan diharapkan agar meningkatkan sosialisasi terkait perizinan berusaha kepada masyarakat atau pelaku usaha yang berinvestasi khususnya di Kota Manado. Sosialisasi yang terus menerus dan berkesinambungan buat pelaku-pelaku usaha yang ada sehingga boleh meningkatkan perekonomian yang ada terlebih di Kota Manado.
3. Penulis berharap penelitian ini dapat dilanjutkan oleh peneliti lain sehingga dapat mengetahui perkembangan-perkembangan mengenai sistem mekanisme perizinan berusaha yang ada di tahun-tahun mendatang untuk meningkatkan investasi yang ada di Indonesia terlebih khusus di Kota Manado

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi. 2011. Good Corporate Governance. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arsyad, Lincolin. 1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. BPFE. Yogyakarta.
- Agus, Susilo, 2009. "Pengaruh Kebijakan Deviden Terhadap Harga Saham". Jurnal. Fakultas Ekonomi. Universitas Surakarta.
- Adam Jose Sihombing, Kadek Agus Sudiarwan, 2022. Efektifitas Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) dalam Perizinan Berusaha di Kota Denpasar.
- Bintoro Tjokroamidjojo, Pengantar Administrasi pembangunan, LP3ES, Jakarta, 1984.

- Erlangga Hikmah Budhyatma, Achmad Nurmandi, Isnaini Mualilidin & Danang Kurniawan, 2022. Application of Online Single Submission in Increasing Investment (Case Study in the Special Region of Yogyakarta)
- George M.V. Kawung, Christoffel M. O. Mintardjo, Wensy I. Rompas, Christoffel Kojo, Imelda. J. Ogi, 2019. Ease of Doing Business in East Indonesian Region : Starting a Business Study in North Sulawesi Province SMEs.
- Liatosa Yundrina, 2023. Implementasi Kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) di Kecamatan Kalidoni Kota Palembang
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
- Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
- Satriyo Rahman Nur Pambudi Absori, 2023. Kebijakan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui Sistem Online Single Submission Berbasis Good Governance di Kota Surakarta
- Sunariyah. 2011. Pengantar Pengetahuan Pasar Modal, Edisi ke empat. Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN.
- Tandelilin, Eduardus. 2010. Portofolio dan Investasi: Teori dan Aplikasi. Edisi 1. Kanisius. Yogyakarta.

ANALISIS KREDIT PERBANKAN, JUMLAH PENDUDUK, DAN UPAH MINIMUM PROVINSI TERHADAP JUMLAH PENDUDUK MISKIN DI KABUPATEN MINAHASA UTARA

Aldy A. Lolowang¹, Agnes Ch. P. Lopian², Een Novritha Walewangko³

Program Studi Magister Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi

E-mail: aldyolowang061@student.unsrat.ac.id, agneslopiant@unsrat.ac.id, eenwalewangko@unsrat.ac.id

ABSTRAK

Berbagai program pemerintah baik bantuan sosial maupun permodalan usaha bahkan kebijakan terkait jumlah penduduk dan upah minimum provinsi sudah dilakukan tapi nyatanya kurang optimal dalam menurunkan jumlah penduduk miskin. Perlunya sinergitas pemerintah, masyarakat, dan perbankan untuk mengevaluasi dan memperbaiki kebijakan yang ada khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai upaya nyata bersama untuk mengurangi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Minahasa Utara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kredit perbankan, jumlah penduduk, dan upah minimum provinsi terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Minahasa Utara. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder tahunan dengan jangka waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2022. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan kredit usaha rakyat, jumlah penduduk, dan upah minimum provinsi berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Secara parsial kredit perbankan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin dan jumlah penduduk tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap jumlah penduduk miskin. Sedangkan upah minimum provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin.

Kata Kunci : Kredit Usaha Rakyat, Jumlah Penduduk, Upah Minimum Provinsi, Jumlah Penduduk Miskin

ABSTRACT

Various government programs, both social assistance and business capital, even policies related to population and provincial minimum wages, have been carried out but in fact are not optimal in reducing the number of poor people. The need for synergy between the government, community, and banks to evaluate and improve existing policies, especially the People's Business Credit (KUR) as a joint real effort to reduce the number of poor people in North Minahasa Regency. This study aims to determine the effect of bank credit, population, and provincial minimum wage on the number of poor people in North Minahasa Regency. As for the data used in this research was secondary data with a period from 2009 to 2022. The analysis method used is multiple linear regression analysis. The results showed that simultaneously people's business credit, population, and provincial minimum wage have a significant affect the number of poor people. Partially, bank credit has a negative and significant effect on the number of poor people and population has no significant and negative effect on the number of poor people. Meanwhile, the provincial minimum wage has a positive and significant effect on the number of poor people.

Keywords: People's Business Credit, Population, Provincial Minimum Wage, Number of Poor People

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kemiskinan adalah salah satu problem sangat mendasar yang selalu mengiringi sejarah dalam perkembangan pembangunan terjadi di berbagai macam negara terlebih khusus negara

berkembang (Walewangko, 2015). Dalam *Millenium Development Goals* (MDGs), kemiskinan menjadi salah satu sasaran utama untuk diperangi negara-negara dunia (Sachs, 2012). Selama ini, pemerintah Indonesia baik di tingkat pusat hingga daerah sudah gencar meluncurkan berbagai program untuk mengurangi kemiskinan, anggaran yang besar digulirkan untuk mengentaskan kemiskinan (Bhinadi, 2017).

Pembangunan adalah suatu proses perubahan yang dilakukan dengan terus menerus untuk menuju suatu kondisi atau keadaan yang lebih baik dengan berdasarkan norma tertentu. (Riyadi & Bratakusumah, 2005).

Perbankan memang tidak pernah bisa luput dalam perannya sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri, bagaimana tidak perbankan sebagai lembaga intermediasi dikatakan menjadi salah satu faktor pemicu pergerakan ekonomi di seluruh sektor. Penjelasan singkatnya, kenaikan permintaan kredit perbankan baik kredit konsumsi, modal kerja, ataupun investasi tentu akan mendorong daya beli, pertumbuhan usaha, sampai dengan peningkatan investasi (Rumbayan, Rotinsulu, dan Maramis, 2022). Menurut Tambunan bila kemiskinan terjadi karena rendahnya pendapatan dan rendahnya produktifitas, maka pengurangan kemiskinan dibutuhkan investasi pada sumber daya manusia dan investasi modal fisik untuk meningkatkan produktifitas pekerja. Jadi jalan terbaik untuk mengurangi kemiskinan dengan menyediakan kredit mikro kepada penduduk miskin guna menciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan mereka.

Menyalurkan kredit modal kerja bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, pemerintah membuat program KUR (Kredit usaha Rakyat) yang berkerja sama dengan bank-bank pemerintah seperti Bank BRI dan bank pemerintah lainnya, bank pembangunan daerah, dan lembaga keuangan selain bank. KUR ini merupakan skema pembiayaan yang khusus diperuntukkan bagi para pelaku usaha UMKM dan Koperasi yang usahanya layak (*feasible*) namun tidak memiliki agunan yang cukup sesuai dengan syarat perbankan (*bankable*) (Prayoga, 2014).

Jumlah penduduk miskin merupakan salah satu Indikator kemiskinan dimana jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan pada suatu periode tertentu. Bagi pemerintah jumlah penduduk miskin merupakan target pembangunan yang perlu ditekan setiap tahun sampai dengan angka terendah. Apabila jumlah penduduk semakin banyak maka akan meningkatkan jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk yang meningkat akan menimbulkan banyaknya jumlah angkatan kerja. Banyaknya angkatan kerja tetapi tidak diimbangi dengan jumlah lapangan pekerjaan mengakibatkan banyak angkatan kerja yang menganggur sehingga menyebabkan pengangguran yang menimbulkan kemiskinan (Siregar dan Wahyuniarti, 2008).

Hal yang lain jika kita melihat dari faktor upah minimum terutama dalam upah minimum provinsi (UMP) yang memiliki hubungan terhadap kemiskinan di Indonesia dan berdampak pada kesejahteraan pekerja. Di dalam PP Nomor 78 mengenai Pengupahan Tahun 2015, upah minimum yang dimaksud pada Pasal 41 ayat 2 adalah upah minimum bulanan yang terdiri dari upah tanpa tunjangan serta upah pokok salah satunya tunjangan tetap. Kemiskinan yang terjadi di daerah seperti Kabupaten Minahasa Utara cenderung berkurang dengan adanya perkembangan faktor-faktor seperti Upah Minimum, karena semakin meningkatnya upah maka pendapatan masing-masing keluarga atau perseorangan semakin meningkat dan semakin meningkatnya pendapatan maka akan berdampak dalam mengurangi kemiskinan, didalam penelitian terdahulu oleh Vinni Alvionita (2014) menyatakan bahwa tingkat upah minimum provinsi mampu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kemiskinan.

Kabupaten Minahasa Utara (sering disingkat Minut) dengan pusat pemerintahan dan ibu kota di Airmadidi, terletak di Provinsi Sulawesi Utara. Kabupaten ini memiliki lokasi yang strategis karena berada di antara dua kota, yaitu Manado dan kota pelabuhan Bitung. Dengan

jarak dari pusat kota Manado ke Airmadidi sekitar 12 km yang dapat ditempuh dalam waktu 30 menit. Sebagian dari kawasan Bandar Udara Sam Ratulangi terletak di wilayah Minahasa Utara.

Tabel 1
KUR Tahun 2015 – 2022

No	Tahun	Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kabupaten Minahasa Utara (Juta Rp)
1	2015	238.297
2	2016	303.517
3	2017	393.410
4	2018	524.952
5	2019	561.345
6	2020	475.033
7	2021	649.835
8	2022	654.354

Sumber: Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara (2015-2022)

Berdasarkan data Statistik Ekonomi Dan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara pada delapan tahun terakhir yaitu tahun 2015 – 2022 terlihat bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kabupaten Minahasa Utara terus mengalami perkembangan dari tahun ke tahun. Tahun 2015 penyaluran KUR sebesar Rp. 238.297.000 terus meningkat sampai dengan penyaluran tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 654.354.000. Peningkatan penyaluran KUR terjadi seiring adanya peningkatan jumlah pelaku UMKM dan saat ini ada sekitar 13 ribu UMKM menurut data Pemkab Minahasa Utara. KUR sangat penting bagi pelaku UMKM yang ingin mengembangkan usaha tetapi memiliki modal terbatas. Akses layanan jasa keuangan dapat menjadi kunci untuk mengentaskan kemiskinan Masyarakat Indonesia, khususnya di Kabupaten Minahasa Utara dengan mempercepat akselerasi pemberian modal kerja kepada pelaku UMKM dan program lainnya sehingga perekonomian bisa tetap tumbuh. Ini didukung dengan hasil penelitian dari Jalilian & Kirk Patrick (2001), Honohan (2004), Zhuang, Juzhong et.al. (2009), dan Pradhan, Rudra P (2010) yang menyatakan bahwa Kredit Perbankan dengan Tingkat Kemiskinan mempunyai hubungan negatif dan signifikan.

Tabel 2
Jumlah Penduduk Tahun 2015 – 2022

No	Tahun	Jumlah Penduduk Kabupaten Minahasa Utara (Jiwa)
1	2015	198.084
2	2016	199.498
3	2017	200.985
4	2018	202.317
5	2019	203.624
6	2020	224.993
7	2021	226.915
8	2022	229.368

Sumber: BPS.go.id (2023)

Jumlah penduduk di Kabupaten Minahasa Utara untuk delapan tahun terakhir yaitu periode 2015 – 2022 mengalami peningkatan secara terus-menerus. Pada tahun 2015 jumlah penduduk Kabupaten Minahasa Utara sebesar 198.084 jiwa kemudian terus terjadi peningkatan

hingga pada tahun 2022 menjadi sebesar 229.368 jiwa. Hal ini karena adanya peningkatan persentase Angka Harapan Hidup (AHH) yang merupakan salah satu komponen penyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Minahasa Utara dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022 AHH Minahasa Utara mencapai 7,38% sesuai data BPS Kab. Minahasa Utara 2023.

Tabel 3
Upah Minimum Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2015 – 2022

No	Tahun	Upah Minimum Regional/Provinsi Sulawesi Utara (Rupiah)
1	2015	2.150.000
2	2016	2.400.000
3	2017	2.598.000
4	2018	2.824.286
5	2019	3.051.076
6	2020	3.310.723
7	2021	3.310.723
8	2022	3.310.723

Sumber: BPS.go.id (2023)

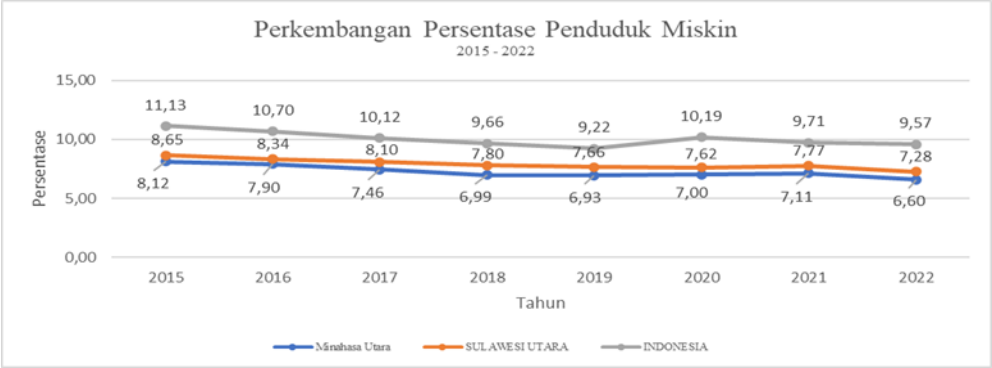
Berdasarkan tabel Upah Minimum Provinsi Sulawesi Utara di delapan tahun terakhir yaitu periode 2015 – 2022 mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 upah minimum Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp. 2.150.000 terus meningkat sampai dengan tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 3.310.723. Sementara pada periode tahun 2020 – 2022 UMP Sulut tidak mengalami perubahan atau tetap sebesar Rp. 3.310.723 dikarenakan UMP Sulut 2020 – 2022 lebih tinggi dari batas atas upah minimum dan sesuai Keputusan Pjs Gubernur Sulut Nomor 330 Tahun 2020 Tanggal 31 Oktober 2020 dengan mempertimbangkan rekomendasi dewan pengupahan provinsi sesuai dengan pasal 45 ayat 3 peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan, Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/11/HK.04/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 tentang penetapan upah minimum tahun 2021 pada masa pandemi Covid-19, dan Keputusan Gubernur Sulut No. 375, tanggal 16 november 2021 dengan mempertimbangkan “force majeure” (kejadian di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan) yaitu pandemi covid-19 yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan investasi yang ada di provinsi Sulawesi Utara.

Grafik 1
Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2015 – 2022



Sumber: BPS.go.id (2023)

Grafik 2
Persentase Penduduk Miskin Tahun 2015 – 2022



Sumber: BPS.go.id (2023)

Dapat dilihat bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten Minahasa Utara pada delapan tahun terakhir yaitu periode 2015 – 2022 berada di bawah Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional. Peningkatan tertinggi tingkat kemiskinan di Minahasa Utara terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 8,12%. Kemudian di tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 turun secara drastis mencapai 6,93 % dan di tahun 2020 sampai 2021 cenderung mengalami kenaikan Kembali mencapai 7,11 % atau sekitar 14,49 ribu jiwa penduduk miskin. Upaya menurunkan angka kemiskinan telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dengan berbagai program perlindungan sosial dan jasa keuangan antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Program Beras Sejahtera (Rastra), Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Indonesia Pintar (PIP), Program Indonesia Sehat (PIS), Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tetapi upaya ini belum optimal untuk meningkatkan pendapatan sehingga belum berkontribusi secara maksimal untuk menurunkan jumlah penduduk miskin.

Penelitian ini menjadi menarik karena Kabupaten Minahasa Utara yang berada diantara Kota Manado dan Kota Bitung yang tentunya memiliki banyak akses untuk berbagai program pemerintah dalam percepatan penanggulangan kemiskinan. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis akan melakukan penelitian mengenai **“Analisis Kredit Perbankan, Jumlah Penduduk, Dan Upah Minimum Provinsi terhadap Jumlah Penduduk Miskin Di Kabupaten Minahasa Utara”**.

Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana kredit usaha rakyat (KUR) mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Minahasa Utara?
- 2. Bagaimana jumlah penduduk mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Minahasa Utara?
- 3. Bagaimana upah minimum provinsi (UMP) mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Minahasa Utara?
- 4. Bagaimana Kredit perbankan, jumlah penduduk, Dan upah minimum provinsi (UMP) mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Minahasa Utara?

Tujuan Penelitian

- 1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kredit usaha rakyat berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Minahasa Utara.
- 2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh jumlah penduduk berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Minahasa Utara.
- 3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh upah minimum provinsi (UMP) berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Minahasa Utara.
- 4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kredit usaha rakyat, jumlah penduduk, dan upah minimum provinsi (UMP) terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Minahasa Utara.

Manfaat Penelitian

1. Bagi Perbankan dan BPS Kabupaten Minahasa Utara

Dapat memberikan pengetahuan bahkan masukan yang bermanfaat dalam pengambilan kebijakan kedepan agar dapat membantu dan mendukung Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam menurunkan tingkat kemiskinan.

2. Bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara

Dapat memberikan sumbangan ide, gagasan pemikiran dan saran bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara untuk kebijakan yang tepat mengenai jumlah penduduk dan upah minimum provinsi (UMP) sehingga berdampak pada pendapatan meningkat, mengurangi pengangguran, dan kemiskinan.

3. Bagi Masyarakat Kabupaten Minahasa Utara

Memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan keuangan terlebih modal usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) agar masyarakat Kabupaten Minahasa Utara khususnya masyarakat miskin dapat memilih bank sebagai tempat melakukan peminjaman dana yang mudah, cepat, dan legal sehingga berdampak pada penurunan jumlah penduduk miskin.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Memberikan informasi dan pengembangan ilmu ekonomi pembangunan melalui pengujian empiris tentang analisis kredit perbankan, jumlah penduduk, dan upah minimum provinsi (UMP) terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Minahasa Utara serta mendapat pengalaman yang berguna bahkan menjadi referensi untuk membantu penelitian di masa yang akan datang.

Tinjauan Pustaka

Perencanaan Pembangunan Daerah

Menurut M. L. Jhingan (Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan, 2016), perencanaan pembangunan dimaksudkan untuk membangun perekonomian secara keseluruhan. Ia mencakup penerapan sistem pemilihan yang rasional terhadap sejumlah bidang investasi dan kekuatan pembangunan lainnya yang layak. Di perencanaan pembangunan, pemerintah merumuskan pembangunan bagi perekonomian secara keseluruhan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017, perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Kemiskinan

Menurut Muhadjir (2005) kemiskinan kultural merupakan akibat dari ketidakmampuan menghadapi kemiskinan yang berkepanjangan. Kemiskinan sumber daya ekonomi menunjukkan bahwa akar kemiskinan itu pada ketidakpunyaan sumber daya ekonomi, seperti tanah dan modal, pendidikan dan keterampilan, karena pertambahan penduduk yang sangat pesat tidak seiring dengan sumber daya ekonomi yang tersedia. Sedangkan kemiskinan struktural merupakan kemiskinan yang dibuat oleh manusia yang memiliki kekuasaan ekonomi dan politik.

Perbankan

Bank adalah suatu lembaga keuangan, yaitu suatu badan yang berfungsi sebagai *financial intermediary* atau perantara keuangan dari dua pihak, yakni pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Karena demikian eratnya kaitan antara bank dan uang, maka bank disebut juga sebagai suatu lembaga yang berniaga uang. Bank menerima simpanan uang dari masyarakat (*to receive deposits*) dalam bentuk giro, deposito, dan tabungan. Kemudian uang

tersebut dikembalikan lagi kepada masyarakat dalam bentuk kredit (*to make loans*) (Sinungan, 2000).

Kredit

Kredit adalah penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak (kreditur/pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasabah atau pengutang/ borrower) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak (Rivai, Veithzal dan Andria, 2007: 4).

Penduduk

Badan Pusat Statistik (2023) mendefinisikan penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama enam bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari enam bulan tetapi bertujuan menetap.

Upah Minimum

Menurut pasal 23 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan (PP 36/2021), upah minimum sebagaimana dimaksud merupakan Upah bulanan terendah, terdiri atas:

1. Upah tanpa tunjangan; atau
2. Upah pokok dan tunjangan tetap; atau
3. Dalam hal komponen Upah di perusahaan terdiri atas upah pokok dan tunjangan tidak tetap, upah pokok paling sedikit sebesar upah minimum.

Pasal 25 ayat (1) PP 36 tahun 2021 menyebut upah minimum terdiri atas upah minimum provinsi, dan upah minimum Kabupaten/Kota dengan syarat tertentu. Berikut penjelasan jenis upah minimum:

1. Upah Minimum Provinsi (UMP) adalah Upah Minimum yang berlaku untuk seluruh Kabupaten/Kota di satu Provinsi, yang wajib ditetapkan oleh Gubernur setiap tahunnya (pasal 27 ayat (1) PP 36/2021).
2. Upah Minimum Kabupaten/Kota adalah Upah Minimum yang berlaku di Daerah Kabupaten/Kota. PP 36/2021 menyebut Gubernur dapat menetapkan Upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu (pasal 30 ayat (1) PP 36/2021).

Syarat tertentu yang dimaksud sehubungan dengan :

- a. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota yang bersangkutan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang sama, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi; atau
- b. Nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi Kabupaten/Kota yang bersangkutan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang sama, selalu positif, dan lebih tinggi dari nilai Provinsi.

Dalam hal syarat tertentu sebagaimana dimaksud diatas tidak terpenuhi, atau dengan kata lain upah minimum Kabupaten/kota tidak lebih tinggi dari upah minimum Provinsi maka Gubernur tidak dapat menerapkan upah minimum bagi Kabupaten/kota. Jadi UMP dan UMK dapat sama nilainya.

Penelitian Terdahulu

Tiara F. Rizkiyah dan Nunung Nurhayati (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Peningkatan Kredit BPR, PDRB dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan” dengan menggunakan metode analisis data yaitu analisis regresi berganda membuktikan bahwa kredit BPR (X_1) memiliki pengaruh yang signifikan dan bertanda negatif terhadap kemiskinan (Y). Produk domestik regional bruto (X_2) tidak memiliki pengaruh yang signifikan dan bertanda negatif terhadap kemiskinan. Tingkat pengangguran terbuka berpengaruh yang signifikan dan bertanda positif terhadap kemiskinan.

Wita Utami dan Tianovida Siregar (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh UMR Dan Penduduk Jiwa terhadap Tingkat Kemiskinan Sumatera Utara Periode 2000-2016” dengan menggunakan metode analisis data yaitu analisis regresi data panel membuktikan bahwa variabel UMR dan Penduduk Jiwa tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Sumatera Utara dan hasil uji simultan (uji F) juga menunjukkan bahwa UMR dan Penduduk Jiwa secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di provinsi Sumatera Utara.

Saharuddin Didu & Ferri Fauzi (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan Dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Kabupaten Lebak” dengan menggunakan metode analisis data yaitu analisis regresi berganda OLS membuktikan bahwa variabel populasi, variabel pendidikan dan variabel pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten Lebak. Secara simultan, ketiga variabel independen mempunyai hubungan yang signifikan terhadap kemiskinan di kabupaten Lebak. Selanjutnya, koefisien R kuadrat menunjukkan nilai 0,947 atau 94,7%, yang berarti bahwa variasi kemiskinan di Kabupaten Lebak dapat dijelaskan oleh ketiga independent variabel tersebut.

Satria Yuda Anggriawan, Aris Soelistyo, dan Dwi Susilowati (2015), dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Upah Minimum Dan Distribusi Pendapatan terhadap Jumlah Penduduk Miskin Jawa Timur” dengan menggunakan metode analisis data yaitu analisis regresi linier data panel dengan metode Common Effect digunakan alat bantu software Eviews 6 membuktikan bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota di Jawa Timur dari tahun 2010 – 2014 mengalami penurunan dengan rata-rata sebesar 5,088.144, variabel upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin dan distribusi pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

Tito Saputra, Een N. Walewangko, dan George M.V. Kawung (2022), dalam penelitiannya berjudul “Analisis Program Dana Kelurahan di Kota Kotamobagu (Studi Kelurahan di Kecamatan Kotamobagu Barat)” dengan menggunakan metode analisis data yaitu uji asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda membuktikan bahwa secara simultan dana kelurahan dan alokasi dana kelurahan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan kecamatan kotamobagu barat, secara parsial dana kelurahan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan Kecamatan Kotamobagu Barat. Sedangkan alokasi dana kelurahan berpengaruh tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kecamatan Kotamobagu Barat.

Kerangka Pemikiran

Gambar 1
Kerangka Pemikiran

Sumber: Kajian Teori Diolah Penulis (2023)

Hipotesis

1. Diduga Kredit Usaha Rakyat berpengaruh negatif terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Minahasa Utara.
2. Diduga Jumlah Penduduk berpengaruh positif terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Minahasa Utara.
3. Diduga Upah Minimum Provinsi (UMP) berpengaruh negatif terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Minahasa Utara.
4. Diduga bahwa Kredit Perbankan, Jumlah penduduk dan Upah Minimum Provinsi (UMP) berpengaruh secara bersama-sama terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Minahasa Utara.

2. METODE PENELITIAN

Data dan Sumber Data

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif (*quantitative research*). Penelitian ini meliputi Kredit Perbankan, Jumlah Penduduk dan Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan tujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruhnya terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Minahasa Utara. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Minahasa Utara dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data time series periode 2009 – 2022.

Teknik Pengumpulan Data

1. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu (Sugiyono, 2017). Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, kriteria, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain sebagainya. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder yang diperoleh dari website BPS Minahasa Utara dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara

yang terkait dengan Kredit Perbankan untuk Masyarakat Kabupaten Minahasa Utara, Jumlah Penduduk Kabupaten Minahasa Utara, dan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Utara.

2. Studi Pustaka

Menurut Sugiyono (2017), studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian teoritis dan referensi yang terkait dengan penelitian yang dilakukan. Selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian. Hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah, Studi pustaka merupakan metode pegumpulan data yang dilakukan dengan membaca buku-buku, literatur, jurnal-jurnal, referensi yang berkaitan dengan penelitian ini dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1. Jumlah penduduk miskin (Y) adalah Jumlah orang miskin yang bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Utara setiap tahunnya diukur dalam satuan jiwa.
2. Kredit usaha rakyat (X₁) adalah kredit atau pinjaman yang diberikan pihak perbankan kepada masyarakat Kabupaten Minahasa Utara yang diukur dalam rupiah.
3. Jumlah penduduk (X₂) adalah jumlah orang yang bertempat tinggal di Kabupaten Minahasa Utara setiap tahunnya yang diukur dalam satuan jiwa.
4. Upah minimum provinsi (UMP) (X₃) adalah upah minimum tanpa tunjangan yang diterima oleh pekerja yang bekerja di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Utara dengan nilai upah minimum kabupaten/kota (UMK) sama dengan UMP dengan syarat tertentu tidak terpenuhi yaitu Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota yang bersangkutan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang sama, lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi; atau Nilai pertumbuhan ekonomi dikurangi inflasi Kabupaten/Kota yang bersangkutan selama 3 (tiga) tahun terakhir dari data yang tersedia pada periode yang sama, selalu positif, dan lebih tinggi dari nilai Provinsi. Jadi UMK akan mengikuti besaran UMP yang telah ditetapkan oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Utara yang diukur dalam rupiah.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Regresi linear Berganda yang digunakan untuk mengetahui Pengaruh Variabel Independen Kredit Perbankan, Jumlah Penduduk dan Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap Variabel Dependen Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Minahasa Utara untuk tahun 2009 – 2022. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Pengelolahan data dalam penelitian ini menggunakan program Microsoft Excel 2021 dan Eviews 0.8.

Model regresi yang dimana variabel dependen (*regresan*) Y dipengaruhi oleh dua atau lebih variabel penjelas (*Regresor*) X dikenal dengan analisis regresi majemuk atau model regresi linier berganda (Gujarati, 2011). Model dasar regresi linier berganda dapat ditulis sebagai berikut:

$$Y = f (X_1, X_2, X_3) \dots\dots\dots (1.1)$$

Berdasarkan model dasar di atas kemudian diubah ke dalam model logaritma natural (ln) dengan persamaan sebagai berikut:

$$\log Y = b_0 + b_1\log X_1 + b_2\log X_2 + b_3\log X_3 + e\dots\dots\dots (1.2)$$

Keterangan

- Y = Jumlah Penduduk Miskin
- X₁ = Kredit Usaha Rakyat (KUR)
- X₂ = Jumlah Penduduk
- X₃ = Upah Minimum Provinsi (UMP)

- b_0 = Konstanta
 b_1, b_2, b_3 = koefisien regresi parsial untuk masing-masing X_1, X_2, X_3
 e = *error term*

Sebelum memulai cara menginterpretasikannya, akan diperkenalkan beberapa model yang menggunakan transformasi logaritma sebagai berikut:

1. Model Linier-Log: $Y_i = a + \beta \log X_i + \varepsilon_i$
2. Model Log-Linier: $\log Y_i = a + \beta X_i + \varepsilon_i$
3. Model Log-log: $\log Y_i = a + \beta \log X_i + \varepsilon_i$

Ketiga model tersebut mempunyai cara yang berbeda dalam menginterpretasikan nilai koefisien regresi dalam bentuk logaritma. Interpretasi tiga model tersebut sebagai berikut:

1. Model Linier-Log

Interpretasi langsung dapat dilakukan dengan menyebutkan bahwa peningkatan nilai log X sebesar satu satuan akan meningkatkan nilai Y sebesar satu. Tentu ini akan sulit dimengerti, maka kita dapat melakukan interpretasi dengan cara yang lain, yaitu peningkatan X sebesar satu persen akan meningkatkan Y sebesar 0.01. Dapat dilihat bahwa nilai β dikalikan dengan 0.01, untuk pembuktiannya dapat dilihat pada (Gujarati, 2003, hal 181-182) atau (Benoit, 2011, hal 3-4).

2. Model Log-Linier

Sama halnya dengan model linier-log, interpretasi langsung dapat diungkapkan seperti peningkatan nilai X sebesar satu satuan akan meningkatkan nilai log Y sebesar β satuan. Interpretasi yang lebih bermakna dapat dilakukan sebagai berikut, peningkatan X sebesar satu satuan akan meningkatkan nilai Y sebesar 100 β persen. Dapat dilihat bahwa nilai dari β dikali 100 sehingga bentuk peningkatannya dalam persen atau pertumbuhan, pembuktiannya dapat dilihat pada (Gujarati, 2003, hal 179-180) atau (Benoit, 2011, hal 4).

3. Model Log-Log

Model ini dapat diinterpretasikan langsung dimana keduanya dalam bentuk persen. Peningkatan X sebesar satu persen akan meningkatkan nilai Y sebesar β satuan. Pembuktiannya dapat dilihat pada (Gujarati, 2003, hal 176) atau (Benoit, 2011, hal 4).

Uji Statistik

1. Uji t-Statistik (Uji Parsial)

Menurut Ghazali (2009) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria:

- a. Jika $t_{hitung} < t_{tabel}$, maka H_0 diterima. Berarti variabel independen tersebut secara individu tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
- b. jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak. Berarti variabel independen tersebut secara individu berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

2. Uji F-Statistik (Uji Simultan)

Uji F ini dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi variabel Kredit BPR, LPP, dan UMK secara simultan berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan di Kabupaten Minahasa Utara. dilakukan pengujian hipotesis secara serentak dengan menggunakan uji F Hipotesis:

$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 \dots \beta_n = 0$, berarti variabel bebas (X) tidak memiliki pengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel terikat (Y).

$H_a: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 \dots \beta_n \neq 0$, berarti variabel bebas (X) memiliki pengaruh signifikan secara simultan terhadap variabel terikat (Y).

Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, dan jika $F_{hitung} > F_{tabel}$, maka

H_1 diterima dan H_0 ditolak.

Uji determinasi (R^2)

Uji determinasi (R^2) yaitu mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan 1. Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat amat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Secara umum koefisien determinasi untuk data silang (*cross section*) relatif rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan (Ghozali, 2009).

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2018: 145) uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel independen dan variabel dependen atau keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji *Jarque-Bera* dan probabilitasnya yang mendeteksi data terdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas dengan menggunakan Uji *Jarque-Bera* ini dalam program *Econometric Views* (Eviews). Untuk melihat apakah data sudah terdistribusi normal atau tidak:

- Jika nilai probabilitas *Jarque-Bera* > nilai signifikan 0,05 maka data berdistribusi normal.
- Jika nilai probabilitas *Jarque-Bera* < nilai signifikan 0,05 maka data tidak berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2016:103) Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas yaitu dengan melihat nilai *tolerance* dan VIF (*variance inflation factor*). Semakin kecil nilai *tolerance* dan semakin besar nilai VIF maka semakin mendekati terjadinya masalah multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas

Suatu model dikatakan memiliki *problem* heterokedastisitas itu berarti ada atau terdapat varian variabel dalam model yang tidak sama. Gejala ini dapat pula diartikan bahwa dalam model terjadi ketidaksamaan varian dari residual pada pengamatan model regresi tersebut. Uji heterokedastisitas diperlukan untuk menguji ada tidaknya gejala ini. Untuk melakukan uji tersebut ada beberapa metode yang dapat digunakan, misalnya model barlet dan rank *spearman* atau uji *spearman's*, metode grafik park gleyser. (Agus Widarjono 2013, Hal 113).

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk suatu tujuan yaitu mengetahui ada tidaknya korelasi antar anggota serangkaian data yang diobservasi dan analisis menurut ruang atau menurut waktu, *cross section* atau *time series*. Uji ini bertujuan untuk melihat ada tidaknya korelasi antara residual pada suatu pengamatan dengan pengamatan yang lain pada model. Beberapa cara untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi menurut (Gujarati 2019), dapat diketahui dengan metode grafik, metode *durbin-watson*, metode *runtest*, dan uji *statistic non paramtrik*. Ada juga cara lain untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dilakukan uji *Lagrange Multiplier (LM Test)* dimana apabila probabilitas f hitung > α (5 %), maka bebas dari autokorelasi.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Linear Berganda

Adapun Teknik estimasi variabel dependen yang digunakan adalah *Ordinary Least Square* (OLS) yang ditransformasi menjadi model *full* logaritma memiliki model persamaan dalam penelitian ini dituliskan sebagai berikut:

$$\text{Log Y} = \beta_0 + \beta_1 \log X_1 + \beta_2 \log X_2 + \beta_3 \log X_3 + e$$

Tabel 4
Hasil Regresi Linear Berganda

Log Y = β_0	+ $\beta_1 \log X_1$	+ $\beta_2 \log X_2$	+ $\beta_3 \log X_3 + e$
Y	= 6,32	+ - 0,1608X ₁	+ - 0,6559X ₂ + 0,4361X ₃
SE	= (4,19)	(0,6653)	(0,4023) (0,1673)
tstat	= (1,50)	(- 2,4171)	(- 1,6304) (2,6062)
Prob	= (0,16)	(0,0362)	(0,1341) (0,0262)
R ²	= 0,433198		
Adjust R-Squared	= 0,263158		
Fstat	= 2,547619		
Prob (Fstat)	= 0,014727		

Sumber: Hasil Olahan Eviews 8

Persamaan regresi yang terbentuk dari hasil pengolahan data menggunakan *EViews* 8 adalah sebagai berikut :

$$\text{Log Y} = \beta_0 + \beta_1 \log X_1 + \beta_2 \log X_2 + \beta_3 \log X_3 + e$$

$$\text{Log Y} = 6,327516 - 0,160818 \log X_1 - 0,655945 \log X_2 + 0.436125 \log X_3 + e$$

Koefisien Determinasi

Dari hasil pengolahan data menunjukkan bahwa koefisien determinasi (Adj. R²) sebesar 0.263158 atau 26,32 %. Hal ini menunjukkan bahwa variabel – variabel independen dalam hal ini KUR (X₁), jumlah penduduk (X₂) dan UMP (X₃) secara bersama-sama memiliki pengaruh sebesar 26,32 % terhadap naik turunnya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Minahasa Utara. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Uji Statistik F

Uji F digunakan untuk melihat apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan atau bersama – sama terhadap variabel terikat. Dari hasil pengolahan menggunakan *eviews* 8 dapat dilihat Prob (F-statistik) 0,014727. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$, Prob (F-statistik) $0,014727 < \alpha = 0.05$,

$$H_a: b_1 \neq b_2 \neq \dots \neq b_k \neq 0$$

Yang artinya semua variabel bebas (X₁, X₂, dan X₃) secara bersama – sama atau simultan berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y.

Uji Statistik t

Berdasarkan hasil t pada tabel analisis regresi berganda dengan aplikasi *eviews* 8 menunjukkan adanya tingkat signifikansi Variabel Bebas (X₁ dan X₃) terhadap jumlah penduduk

miskin (Y) di Kabupaten Minahasa Utara. Sedangkan X_2 secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Y.

1. Variabel Kredit Usaha Rakyat (X_1) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0362. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$, Nilai probabilitas X_1 $0,0362 < 0,05$, berarti H_0 ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa Variabel Kredit Usaha Rakyat (X_1) berpengaruh secara signifikan dan berhubungan negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Minahasa Utara. Ini berarti sesuai dengan hipotesis pertama yaitu diduga kredit usaha rakyat berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Minahasa Utara.
2. Variabel jumlah penduduk (X_2) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,1341. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$, Nilai probabilitas X_2 $0,1341 > 0,05$, berarti H_0 diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa Variabel jumlah penduduk (X_2) tidak berpengaruh dan berhubungan negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Minahasa Utara. Ini berarti hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesis kedua yaitu diduga jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Minahasa Utara.
3. Variabel upah minimum provinsi (X_3) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0262. Pada tingkat signifikansi $\alpha = 0.05$, nilai probabilitas X_3 $0,0262 < 0,05$, berarti H_0 ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa Variabel upah minimum provinsi (X_3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Minahasa Utara. Hasil penelitian ini berarti tidak sesuai dengan hipotesis ketiga yaitu diduga upah minimum provinsi (UMP) berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Minahasa Utara.

Pengujian Model dengan Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas untuk mengetahui normal tidaknya distribusi faktor gangguan (residual). Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan uji statistik. Untuk menguji data pada penelitian ini terdistribusi normal atau tidak, dapat dilakukan dengan menggunakan uji *Jarque Bera test* (J-B).

Gambar 2
Hasil Uji Normalitas

Jarque-Bera	Probability
1,536137	0,463908

Sumber: Hasil Olahan Eviews 8

Berdasarkan tabel uji normalitas di atas, nilai probabilitas Jargue-Bera $(0,463908) > \alpha$ $(0,05)$ maka H_0 diterima. Karena H_0 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa residual data berdistribusi normal.

Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas atau tidak. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas.

Tabel 5 Uji Multikolinearitas

Variabel	Koefisien	Centered VIF
C	17,62134	NA
LOG (X_1)	0,004427	21,98776
LOG (X_2)	0,161848	3,750942
LOG (X_3)	0,028003	26,76876

Sumber: Hasil Olahan Eviews 8

Untuk melihat apakah model mengalami masalah multikolinearitas, jika nilai varian inflation faktor (VIF) lebih besar dari 10 maka variabel bebas tersebut memiliki persoalan multikolinieritas. Dari hasil uji multikolinearitas pada model ini, *variance inflation faktor* (VIF) pada X_1 (0,004427), X_2 (0,161848) dan X_3 (0,028003) < 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model ini tidak mengalami masalah multikolinearitas.

Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya.

Tabel 6

Uji Breusch Pagan Godfrey

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic	0.736487	Prob. F(3,10)	0.5538
Obs*R-squared	2.533482	Prob. Chi-Square(3)	0.4693
Scaled explained SS	0.829816	Prob. Chi-Square(3)	0.8423

Sumber: Hasil Olahan Eviews 8

Dari hasil uji Heteroskedastisitas dengan uji *Breusch Pagan Godfrey* menggunakan *Eviews 8* dapat dilihat bahwa nilai probabilitas observasi *R-squared* sebesar 0,4693 jika dibandingkan dengan tingkat resiko kesalahan yang diambil (digunakan $\alpha = 5\%$), $0,4693 > 0,05$ artinya residual digolongkan homoskedastisitas.

Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan melalui Uji *Breusch Godfrey Serial Correlation LM TEST* untuk mengetahui ada atau tidaknya autokorelasi.

Tabel 7.

Uji Breusch Godfrey Serial Correlation LM TEST

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.640257	Prob. F(2,8)	0.5522
Obs*R-squared	1.931704	Prob. Chi-Square(2)	0.3807

Sumber: Hasil Olahan Eviews 8

Hasil olahan data menunjukkan nilai Probabilitas *Chi Square* yang merupakan nilai *p value Breusch Godfrey Serial Correlation LM* adalah sebesar $0,3807 > 0,05$. Ini berarti H_0 diterima atau tidak ada masalah autokorelasi.

Berdasarkan persamaan dan hasil pengujian-pengujian di atas, dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 6.327516 menyatakan bahwa jika variabel KUR (X_1), variabel Jumlah Penduduk (X_2) dan Upah Minimum Provinsi (X_3) nilainya 0 (nol) atau konstan, maka nilai Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Minahasa Utara (Y) adalah sebesar 6.327516.
2. Secara parsial, Kredit Usaha Rakyat (KUR) (X_1) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Minahasa Utara. Nilai koefisien regresi kredit usaha rakyat sebesar -0.160818, yang artinya jika KUR mengalami kenaikan 1 %, maka diperkirakan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Minahasa Utara akan menurun sebesar 0.160818, dengan asumsi jumlah penduduk dan upah minimum provinsi tetap (konstan).

3. Secara parsial, jumlah penduduk (X_2) tidak berpengaruh dan bertanda negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Minahasa Utara. Nilai koefisien jumlah penduduk sebesar -0.655945.
4. Secara parsial, upah minimum provinsi (X_3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Minahasa Utara. Nilai koefisien upah minimum provinsi sebesar 0.436125, yang artinya jika upah minimum provinsi mengalami kenaikan 1 %, maka diperkirakan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Minahasa Utara akan meningkat sebesar 0.436125, dengan asumsi KUR dan jumlah penduduk tetap (konstan).
5. Secara simultan, ditampilkan nilai prob (F-statistik) $0,014727 < \alpha = 0.05$ yang berarti KUR, jumlah penduduk, dan upah minimum provinsi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Minahasa Utara.
6. Dari hasil penelitian menyatakan bahwa naik turunnya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Minahasa Utara dipengaruhi sebesar 26,32 % oleh naik turunnya KUR, jumlah penduduk, dan upah minimum provinsi sedangkan sisanya dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Pembahasan

1. Pengaruh Kredit Usaha Rakyat terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Minahasa Utara

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan Kredit Perbankan dalam hal ini Kredit Usaha Rakyat (KUR) berpengaruh terhadap penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Minahasa Utara. Hal ini menggambarkan bahwa KUR yang disalurkan oleh perbankan kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Minahasa Utara tepat sasaran karena dapat diberikan dan dimanfaatkan masyarakat miskin yang memiliki keterbatasan modal usaha untuk mengembangkan usaha sehingga meningkatkan pendapatan. Dengan adanya skala usaha masyarakat menjadi lebih besar maka sangat dibutuhkan banyak tenaga kerja karena adanya permintaan yang meningkat dan membuat semua aktivitas perekonomian masyarakat bergerak serta masyarakat Kabupaten Minahasa Utara yang termasuk usia angkatan kerja terserap dengan baik sehingga berdampak pada angka pengangguran berkurang, pemerataan pendapatan, kesejahteraan masyarakat meningkat yang tercermin dari taraf hidup masyarakat mengalami perubahan, dan hasil akhirnya jumlah penduduk miskin Kabupaten Minahasa Utara mengalami penurunan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Tiara F. Rizkiyah dan Nunung Nurhayati (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Peningkatan Kredit BPR, PDRB dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan” dengan hasil penelitian menjelaskan bahwa variabel kredit BPR menunjukkan tanda negatif dan berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di provinsi Jawa Barat. Kredit yang diberikan oleh BPR telah menyentuh masyarakat yang marginal (*poor people*). Kredit yang diberikan telah tepat sasaran, dilihat dari peruntukannya kredit yang di salurkan kepada masyarakat menengah ke bawah dan mikro digunakan untuk tujuan produktif yang tentunya akan meningkatkan pendapatan, sehingga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh BPR berdampak pada penurunan tingkat kemiskinan di Jawa Barat.

Pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Minahasa Utara

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh dan berhubungan negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Minahasa Utara. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Salsabilla (2022) berjudul “Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kesehatan terhadap Kemiskinan di Kabupaten Malang” dan

penelitian Utami (2021) berjudul “Pengaruh UMR dan Penduduk Jiwa terhadap Tingkat Kemiskinan Sumatera Utara Periode 2000-2016”, yang menyatakan bahwa jumlah penduduk secara parsial tidak berpengaruh signifikan dan berhubungan negatif terhadap kemiskinan yang berarti bahwa bahwa peningkatan jumlah penduduk yang terjadi belum dapat mempengaruhi kemiskinan. Hal ini dikarenakan komposisi penduduk berdasarkan kelompok umur di Kabupaten Minahasa Utara termasuk penduduk *intermediate* yaitu *median* yang berarti bahwa umur penduduk berada di rentang usia 20-30 tahun. Ini menunjukkan mayoritas komposisi umur produktif (15-64 tahun) menjadi sumber tenaga kerja yang sangat potensial untuk mendukung pembangunan daerah. Pada tahun 2022 kelompok usia produktif (15-64 tahun) mendominasi komposisi jumlah penduduk kabupaten Minahasa Utara sebesar 69,32 % atau 159.003 jiwa dari jumlah keseluruhan penduduknya 229.368 jiwa dengan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 58.82 %.

Tinggi atau rendahnya jumlah penduduk usia produktif tidak dapat mempengaruhi kenaikan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Minahasa Utara, sebab peningkatan kualitas pendidikan, keterampilan, pelatihan kerja, dan ekonomi ruang lingkup keluarga, daerah, dan nasional yang baik akan menciptakan sekaligus memanfaatkan peluang yang lebih besar untuk meningkatkan kesejahteraan atau setidaknya mempertahankan taraf hidup layak.

Pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Minahasa Utara

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upah minimum Provinsi berpengaruh signifikan dan positif terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Minahasa Utara. Hasil ini sejalan dengan penelitian Anggriawan (2015), berjudul “Pengaruh Upah Minimum dan Distribusi Pendapatan terhadap Jumlah Penduduk Miskin Jawa Timur” yang menyatakan upah minimum provinsi berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap jumlah penduduk miskin, berarti bahwa setiap kenaikan upah minimum provinsi dapat berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Minahasa Utara. Ini terjadi akibat upah yang menurut perusahaan akan dianggap beban, lantaran upah adalah pengeluaran yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada para pekerja sebagai salah satu input produksi. Oleh karena itu apabila upah semakin tinggi maka akan berdampak pada semakin kecilnya perusahaan dapat memperoleh keuntungan. Maka dari itu upah yang semakin tinggi akan berdampak negatif pada perusahaan, sehingga apabila ada kebijakan pemerintah untuk menaikkan upah maka *demand* tenaga kerja akan turun.

Berdasarkan teori pasar tenaga kerja dijelaskan bahwa apabila ada kenaikan upah maka akan terjadi penurunan tenaga kerja dan begitupun sebaliknya sehingga menyebabkan peningkatan pengangguran yang mengakibatkan kenaikan jumlah penduduk miskin (Pamungkas, 2017) dan Boediono Ekonomi Makro, 2014).

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka kesimpulan penelitian ini sebagai berikut:

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kredit Usaha Rakyat (KUR) berpengaruh signifikan dan berhubungan negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Minahasa Utara.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penduduk tidak berpengaruh dan berhubungan negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Minahasa Utara.

3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upah minimum provinsi berpengaruh signifikan dan berhubungan positif terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Minahasa Utara.
4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kredit perbankan, jumlah penduduk, dan upah minimum provinsi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin di Kabupaten Minahasa Utara.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka saran yang semestinya dapat diberikan adalah :

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara berperan aktif dalam mendorong dan mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dengan memfasilitasi bersama pihak perbankan dalam bentuk sosialisasi pendanaan KUR secara berkala bahkan pendampingan dengan memberikan pelatihan dan penghargaan yang memotivasi pelaku UMKM.
2. Bagi pemerintah Kabupaten Minahasa Utara mengevaluasi kebijakan yang telah ada terkait jumlah penduduk dan jumlah penduduk miskin, dengan penyediaan banyak lapangan kerja baru dan mengutamakan penduduk Kabupaten Minahasa Utara dalam proses rekrutmennya.
3. Bagi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara bersama Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara berhati-hati dan serius menyikapi dalam mengambil kebijakan penetapan Upah Minimum Provinsi di tahun-tahun mendatang dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap kemiskinan.
4. Bagi perbankan atau lembaga keuangan di Kabupaten Minahasa Utara mendorong percepatan dan memperluas akses penyaluran KUR dengan prinsip kredit serta mendorong pelaku UMKM memanfaatkan KUR semaksimal mungkin.
5. Bagi Masyarakat Kabupaten Minahasa Utara menempatkan KUR sebagai pilihan satu-satunya untuk memperoleh modal usaha di bank umum dan bank swasta.
6. Penulis berharap peneliti-peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lanjutan untuk tahun-tahun kedepan demi penyempurnaan penelitian ini dengan menambah jumlah sampel data dan juga dapat menambah variabel lain jika diperlukan agar dapat menjelaskan secara utuh dan komprehensif tentang pengaruh kredit perbankan, jumlah penduduk, dan upah minimum provinsi terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Minahasa Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggriawan, S. Y., Aris Soelistyo, & Dwi Susilowati 2016. *Pengaruh Upah Minimum Dan Distribusi Pendapatan terhadap Jumlah Penduduk Miskin Jawa Timur*. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol. 14 No. 2 Hal. 219-231.
- Badan Pusat Statistik. 2023. *Penduduk*. Jakarta Pusat : Badan Pusat Statistik
- Benoit, Kenneth. 2011. *Linear Regression Models with Logarithmic Transformations*. London: Methodology Institute, London School of Economics.
- Bhinadi, Ardito. 2017. *PENANGGULANGAN KEMISKINAN & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi Kasus Daerah Istimewa Yogyakarta)*. Permasalahan dan Kesejahteraan Sosial. Yogyakarta: Penerbit Deepublish
- Boediono. 2014. *Ekonomi Makro*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Costa, Prayoga Willem da. 2014. *Peran Pembiayaan Kur Bri Terhadap Perkembangan Umkm Di Kota Malang Dan Tingkat Kemampulabaan Bank Bri Di Unit Sawojajar (Studi Pada Unit BRI Sawojajar)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya, Vol. 3, No. 1, Hal 1-13
- Darwin, Muhadjir M., 2005. *Memanusiakan Rakyat Penanggulangan Kemiskinan Sebagai Arus Utama Pembangunan*. Yogyakarta: Benang Merah.

- Didu, Saharuddin & Ferri Fauzi. *Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan di Kabupaten Lebak. Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan*, Vol. 6, No. 1, Hal. 100 – 114.
- Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: UNDIP.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: UNDIP.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: UNDIP.
- Gujarati, D. N. 2003. *Basic Econometrics* (4th ed.). New York: The McGraw-Hill Companies.
- Gujarati, Damodar N. & Dawn C. Porter. 2011. *Dasar-Dasar Ekonometrika Edisi 5 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Gujarati D. N., 2019. *Ekonometrika Dasar*. Jakarta: Erlangga.
- Honohan, Patric. 2004. *Financial Development. Growth and Poverty: How Close are the Links?. World Bank Policy Research Working Paper 3203*. February 2004.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan*. Pemerintah Pusat Indonesia. Jakarta.
- Jalilian, Hossein dan Colin Kirkpatrick. 2001. *Financial Development and Poverty Reduction in Developing Countries. Finance and Development Research Programme. Working Paper. Paper No. 30. Institute for Development Policy and Management. University of Manchester*.
- Jhingan, M. L. 2016. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pamungkas, P. A., & Agus Suman (2017), *Pengaruh Upah Minimum terhadap Pengangguran dan Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2011 – 2016. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. 5 (2). Hal 1-20.
- Riyadi & Deddy Supriyadi Bratakusumah. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah (Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rumbayan, Meisye Ella J., Tri Oldy Rotinsulu & Mauna Theodore Beatrix Maramis. 2022. *Analisis Tingkat Penyaluran Kredit Bank Sulutgo. Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, Vol. 23, No. 4, Hal. 489 – 504.
- Sachs, J.D. 2012. *From Millennium Development Goals to Sustainable Development Goals. The Lancet*, 379, 2206-2211.
- Muchdarsyah, Sinungan. 2000. *Manajemen Dana Bank*. Edisi kedua. Cetakan Keempat. Jakarta : PT.Bumi Aksara.
- Pradhan, Rudra P. 2010. *The Nexus Between Finance. Growth and Poverty in India: The Cointegration and Causality Approach. Asian Social Science*. 6 (9):114.
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan*. Pemerintah Pusat Indonesia. Jakarta
- Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan Pemerintah Pusat Indonesia*. Jakarta
- Rivai Veithzal, Andria P. Veithzal & Ferry N Idroes. 2007. *Bank and Financial Institution Management*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Rizkiyah, Tiara F. & Nunung Nurhayati. 2020. *Pengaruh Peningkatan Kredit BPR, Produk Domestik regional Bruto (PDRB) Dan Tingkat Pengangguran terbuka Terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan. Jurnal Gema Wiralodra*, Vol. 11, No. 2, Hal 311 – 326.
- Salsabilla, Amadea. 2022. *Pengaruh Jumlah Penduduk, Tingkat Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kesehatan terhadap Kemiskinan di Kabupaten Malang. Jurnal Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 10, No. 1. Hal. 10 – 20.
- Saputra, Tito., Een N. Walewangko & George M.V. Kawung. 2022. *Analisis Program Dana Kelurahan di Kota Kotamobagu (Studi Kelurahan di Kecamatan Kotamobagu Barat)*. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, Vol. 23, No. 4, Hal. 351 – 374.
- Siregar, H. & Wahyuniarti, D. 2008. *Dampak pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan jumlah penduduk miskin. Jurnal Ilmiah*, 24 – 40.

- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tambunan, T. T. 2012. *Peran usaha mikro dan kecil dalam pengentasan kemiskinan di daerah. Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 4(2), 73 – 92.
- Utami, Wita & Tianovida Siregar. 2021. *Pengaruh UMR Dan Penduduk Jiwa Terhadap Tingkat Kemiskinan Sumatera Utara Periode 2000-2016. Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, Vol. 7, No. 1, Hal 254 – 264.
- Vinny A., Denny S. & Hainim K. 2014. *Pengaruh Tingkat Pengangguran dan Tingkat Upah Minimum Provinsi terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Riau. JOM FEKON* Vol 1, No. 2, Oktober 2014.
- Walewangko, E. N. 2015. *Analisis Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Upaya Penanggulangan Kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara. Jurnal Berkala Efisiensi*, Vol.15, No.4, Hal. 222 – 233.
- Widarjono, Agus. 2016. *Ekonometrika: Teori dan Aplikasi Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Yogyakarta: Ekonisia FE Universitas Islam Indonesia.
- Zhuang, Juzhong. Et.al. 2009. *Financial Sector evelopment. Economic Growth. and Poverty Reduction: A Literature Review. ADB Economics Working Paper Series* No. 137.



ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH, PENDIDIKAN
DAN KESEHATAN TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN
DI PROVINSI SULAWESI UTARA

Roulinta Sinaga¹, Anderson G. Kumenaung², Ita Pingkan Rorong³

Program Studi Magister Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail: 1roulintasina061@student.unsrat.ac.id, 2andersongkumenaung@unsrat.ac.id,
3Itapingkan@unsrat.ac.id

ABSTRAK

Kemiskinan adalah salah satu masalah makro ekonomi. Tinggi rendahnya tingkat kemiskinan dalam satu wilayah berkaitan erat dengan keberhasilan pembangunan ekonomi di wilayah tersebut. Kemiskinan merupakan fenomena yang terjadi hampir di semua negara sedang berkembang. Kemiskinan muncul karena ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Kondisi ini menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya manusia, sehingga produktivitas dan pendapatan yang diperolehnya rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara parsial dan simultan pengeluaran pemerintah, pendidikan dan kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan periode pengamatan 12 tahun yaitu tahun 2011-2022. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini ada regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, Pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan, Kesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan dan secara bersama-sama variabel pengeluaran pemerintah, pendidikan dan kesehatan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara.

Kata Kunci- Pengeluaran Pemerintah, Pendidikan, Kesehatan, Tingkat Kemiskinan

ABSTRACT

Poverty is a macroeconomic problem. The high or low level of poverty in a region is closely related to the success of economic development in that region. Poverty is a phenomenon that occurs in almost all developing countries. Poverty arises from the inability of some people to meet their living needs to a level that is considered humane. This condition causes a decline in the quality of human resources, resulting in low productivity and income. This research aims to determine the partial and simultaneous influence of government expenditure, education and health on poverty levels in North Sulawesi Province. The data used in this research is secondary data with an observation period of 12 years, namely 2011-2022. The analytical method used in this research is panel data regression. The research results show that government expenditure has a positive and significant effect on poverty levels. Education has a negative and significant effect on poverty levels. Health has a negative and insignificant effect on poverty levels and together the variables of government spending, education and health have an effect on poverty levels in North Sulawesi Province.

Keyword - Government Expenditure, Education, Health, Poverty Levels

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Kemiskinan adalah salah satu masalah makro ekonomi. Tinggi rendahnya tingkat kemiskinan dalam satu wilayah berkaitan erat dengan keberhasilan pembangunan ekonomi di wilayah tersebut. Kemiskinan merupakan fenomena yang terjadi hampir di semua negara sedang berkembang. Kemiskinan muncul karena ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Kondisi ini menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya manusia, sehingga produktivitas dan pendapatan yang diperolehnya rendah.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah utama yang dihadapi hampir seluruh Negara di dunia, terbukti PBB telah menetapkan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Salah satu tujuannya adalah pemberantasan kemiskinan. Dimana pada tahun 2030 proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan harus dikurangi hingga 50 persen dari kondisi capaian *Millenium Development Goals* (MDGs). Dengan kata lain permasalahan kemiskinan menjadi “Tulang punggung” di dalam agenda pembangunan berkelanjutan (Ah Maftuchan, 2015).

Pembangunan ekonomi di Indonesia saat ini sedang dihadapkan terhadap masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan ini sangatlah kompleks dan bersifat multidimensional, dimana berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya. Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal di belahan dunia, karena sifatnya yang multidimensional maka kemiskinan juga memerlukan solusi yang multidimensional pula. Berbagai program baik dari pemerintah pusat maupun daerah sudah diusahakan untuk mengurangi tingkat kemiskinan (Jacobus, 2018).

Menurut Arfiani (2009:6), kemiskinan merupakan masalah global. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dimiliki seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum. Hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan. Menurut Todaro (2011), kemiskinan merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi oleh negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan ini juga merupakan masalah kompleks yang dihadapi dari generasi ke generasi. Kemiskinan dapat dibedakan berdasarkan sifatnya yakni kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut merupakan kemiskinan yang dilihat dari jumlah masyarakat yang hidup dibawah tingkat pendapatan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal. Maka apabila individu tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya maka ia dikatakan miskin. Sedangkan kemiskinan relatif adalah distribusi pendapatan yang tidak merata sehingga timbul kesenjangan, meskipun pendapatan seseorang sudah bisa memenuhi kebutuhan dasarnya akan tetapi jumlah pendapatannya masih dibawah rata-rata pendapatan masyarakat disekitarnya maka orang tersebut juga dikatakan miskin.

Kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan ketimpangan pendapatan, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya yang terbatas dengan kualitas yang rendah, selain itu kemiskinan muncul karena perbedaan kualitas sumber daya manusia, dimana kualitas sumber daya manusia yang rendah maka produktifitas yang dihasilkan juga rendah. Kemiskinan muncul karena adanya perbedaan akses modal (Kuncoro, 2000). Tingkat kemiskinan yang tinggi membuat individu tidak mempunyai alokasi dana dalam rangka memenuhi kebutuhan dasarnya.

Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan merupakan 5 Kabupaten yang ada di Sulawesi Utara, ke 5 Kabupaten tersebut juga tidak lepas dari yang namanya kemiskinan, sehingga dapat kita lihat dari tabel yang ada di bawah ini bahwa tingkat kemiskinan 5 Kabupaten di Sulawesi Utara masih tergolong tinggi dan membutuhkan perhatian pemerintah dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan.

Tabel 1
Data Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara Tahun 2011-2022 (Persen)

Kabupaten / Kota	Tingkat Kemiskinan/Tahun											
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Bolaang Mongondow	8.60	7.68	8.91	8.59	8.63	8.34	8.03	7.67	7.47	7.27	7.58	7.04
Minahasa	7.93	7.16	8.81	8.53	8.80	8.36	7.90	7.30	7.18	7.30	7.67	7.05
Kepulauan Sangihe	11.69	10.66	12.19	11.84	12.27	12.28	11.80	11.82	11.15	11.14	11.02	10.50
Kepulauan Talaud	10.05	9.06	10.27	9.92	10.09	10.29	9.77	9.50	9.86	9.49	9.00	8.25
Minahasa Selatan	9.48	8.61	10.08	9.85	10.22	9.92	9.78	9.34	9.26	9.14	9.37	9.00
Minahasa Utara	7.38	6.69	8.02	7.75	8.12	7.90	7.46	6.99	6.93	7.00	7.11	6.60
Bolaang Mongondow Utara	8.98	8.01	9.61	9.27	9.72	9.38	8.89	8.64	8.45	8.41	8.03	7.31
Kep. Siau, Tagulandang, Biaro	10.38	9.48	11.36	11.03	10.93	10.58	10.33	9.87	9.56	8.94	8.94	8.20
Minahasa Tenggara	15.35	14.24	16.10	15.76	15.88	14.71	14.08	13.29	12.78	12.30	12.47	11.78
Bolaang Mongondow Selatan	16.57	15.07	15.28	15.00	15.17	14.85	14.16	13.60	13.27	12.77	12.85	11.92
Bolaang Mongondow Timur	6.93	6.20	6.92	6.61	6.90	6.77	6.20	6.03	6.10	5.88	6.10	5.85
Kota Manado	5.40	4.91	4.88	4.81	5.63	5.24	5.46	5.38	5.51	5.86	6.19	5.85
Kota Bitung	8.46	7.45	6.45	6.34	6.87	6.57	6.62	6.67	6.49	6.41	6.43	6.20
Kota Tomohon	6.56	5.82	6.57	6.32	6.78	6.56	6.47	5.95	5.62	5.60	5.69	5.26
Kota Kotamobagu	6.64	5.85	5.98	5.75	5.85	6.01	5.90	5.96	5.71	5.42	5.74	5.19
Sulawesi Utara	8.46	7.63	8.50	8.26	8.65	8.34	8.10	7.80	7.66	7.62	7.77	7.28

Sumber : Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara, 2023 (data diolah)

Berdasarkan tabel 1 di atas, dapat disimpulkan bahwa data tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan selalu mengalami fluktuasi setiap tahunnya baik itu naik atau turun. Jika kita memperhatikan data tingkat kemiskinan di atas dapat dilihat jika tingkat kemiskinan di 5 Kabupaten memiliki nilai yang tinggi jika di dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya atau jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara. Data tingkat kemiskinan pada 5 Kabupaten tersebut masih tergolong tinggi. Dengan demikian, maka diperlukan adanya langkah-langkah konkrit dan kebijakan-kebijakan khusus berkaitan dengan sektor atau bidang yang dapat memberikan dampak efektif terhadap penurunan tingkat kemiskinan.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan yaitu pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk, tingkat pengangguran, indeks pembangunan manusia, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan dan lain sebagainya. Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah pengeluaran pemerintah. Pengeluaran pemerintah adalah pajak yang diterima oleh negara yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pengembangan sarana dan prasarana sehingga semakin baik dan lengkap prasarana dan layanan pemerintah yang berkaitan dengan pembangunan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur ekonomi akan berakibat pada percepatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Sebaliknya semakin berkurangnya kepedulian pemerintah daerah terhadap perbaikan kualitas sarana dan layanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur ekonomi akan berdampak pada penurunan kinerja pembangunan manusia dan akan berdampak pada peningkatan tingkat kemiskinan.

Hubungan antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang negatif karena jika pengeluaran pemerintah mengalami kenaikan maka tingkat kemiskinan akan mengalami penurunan, begitupun sebaliknya jika pengeluaran pemerintah mengalami penurunan maka tingkat kemiskinan akan mengalami kenaikan. Permasalahan utama dari kemiskinan adalah kemampuan masyarakat miskin untuk memperoleh pelayanan dari taraf kebutuhan hidup mereka. Seperti halnya dapat memperoleh pelayanan kesehatan maupun pendidikan, maka disinilah peran pemerintah melalui pengeluarannya untuk masyarakat miskin dapat memberikan jalan yang lebih mudah untuk mendapatkan pelayanan umum.

Pengeluaran pemerintah sendiri merupakan alat intervensi pemerintah terhadap perekonomian yang dianggap paling efektif. Selama ini, tingkat efektifitas pengeluaran pemerintah dapat diukur melalui seberapa besar pertumbuhan ekonomi dicapai. Dalam perkembangannya alat indikator ini tidak saja berdasar pertumbuhan ekonomi tetapi juga melibatkan seberapa tinggi tingkat pengangguran serta tingkat kemiskinan. Ini menjelaskan mengapa pemerintah sering hanya menekankan tercapainya tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi mengabaikan indikator pembangunan lainnya, terlebih fakta yang terjadi di masyarakat. (Sri Budhi, 2014)

Faktor lainnya yang mempengaruhi tingkat kemiskinan adalah pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, pengetahuan seseorang akan bertambah dan bermanfaat untuk digunakan di dunia kerja. Pendidikan menjadi pondasi utama untuk mendapatkan pekerjaan. Semakin tinggi jenjang pendidikan yang ditempuh oleh seseorang, maka akan semakin besar peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih layak karena selama menempuh jenjang pendidikan mereka diberikan keterampilan, ilmu pengetahuan dan wawasan yang lebih luas. Apabila seseorang hanya memiliki tingkat pendidikan yang rendah, maka ilmu pengetahuan, keterampilan dan wawasannya pun juga rendah sehingga tidak mampu untuk bersaing mendapatkan pekerjaan yang pada akhirnya berujung pada pengangguran dan peningkatan kemiskinan karena tidak memperoleh pendapatan (Tjiabrata, 2021).

Hubungan antara pendidikan dan tingkat kemiskinan memiliki hubungan yang negatif, yaitu jika pendidikan mengalami penurunan maka tingkat kemiskinan akan mengalami kenaikan, begitupun sebaliknya. Pendidikan formal dan non formal merupakan peran penting dalam mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang, baik secara tidak langsung melalui perbaikan serta peningkatan produktivitas dan efisiensi secara umum, maupun secara langsung melalui pelatihan golongan miskin dengan keterampilan yang dibutuhkan serta diajarkan untuk meningkatkan produktivitas mereka dan pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan mereka (Lincoln, 1999). Manusia memerlukan pengetahuan, keterampilan, penguasaan teknologi, dan dapat mandiri melalui pendidikan. Produktivitas kerja memerlukan pengetahuan, keterampilan dan penguasaan teknologi. Sehingga dengan adanya pendidikan yang tinggi maka banyak masyarakat akan memperoleh pekerjaan, karena memenuhi kualifikasi pekerjaan yang dibutuhkan dari segi pendidikan, sehingga dengan demikian, semakin banyak orang akan memperoleh pendapatan dan tingkat kemiskinan dapat mengalami penurunan.

Kesehatan merupakan variabel lainnya yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Kesehatan merupakan salah faktor penting dalam menyukseskan pembangunan, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Masyarakat yang memiliki tingkat kesehatan yang baik akan memiliki tingkat produktivitas kerja yang tinggi, tingkat pendapatan yang tinggi, tingkat pendidikan yang tinggi dan sejumlah hal positif lainnya. Kesehatan merupakan kebutuhan yang

mendasar bagi tiap manusia, karena tanpa adanya kesehatan yang layak masyarakat tidak dapat menghasilkan produktivitas optimal.

Todaro (2011) menyatakan bahwa *human capital* dapat diukur melalui kesehatan, karena kesadaran akan kesehatan memiliki keterkaitan dengan produktivitas seseorang dalam melakukan aktivitasnya. Dalam pengukuran *human capital*, kesehatan dapat menggunakan nilai Angka Harapan Hidup (AHH), dimana semakin tinggi angka harapan hidup seseorang maka semakin berkualitas parameter kesehatannya, dan begitupun sebaliknya. Semakin tinggi tingkat kesehatan seseorang maka produktivitasnya juga akan semakin tinggi dalam pekerjaannya dan kemiskinan pun dapat menurun.

Topik ini menarik untuk diteliti karena penting untuk mengetahui keterkaitan antara tingkat kemiskinan dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya, yaitu tentang bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah, pendidikan dan kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara khususnya di 5 kabupaten. Dengan demikian, pemerintah yang ada di 5 kabupaten tersebut dapat mengambil kebijakan yang dapat menekan angka tingkat kemiskinan.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian tentang pengaruh pengeluaran pemerintah, pendidikan dan Kesehatan terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian ini akan dilakukan di Provinsi Sulawesi Utara pada Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud dan Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara?
2. Bagaimana pengaruh pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara?
3. Bagaimana pengaruh kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara?
4. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah, pendidikan dan kesehatan secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara.
2. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara.
3. Untuk mengetahui pengaruh kesehatan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara.
4. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah, pendidikan dan kesehatan secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara.

Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan ilmu bagi pemerintah untuk terus menekan angka kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara terlebih khusus di 5 Kabupaten melalui peningkatan pengeluaran pemerintah, peningkatan pendidikan dan peningkatan kesehatan.
2. Bagi Masyarakat
Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi yang dapat bermanfaat bagi masyarakat sehingga dapat mengetahui variabel apa saja yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara terlebih khusus di 5 Kabupaten.
3. Bagi Peneliti
Diharapkan penelitian ini dapat menjadi informasi penting dan referensi untuk penelitian terkait di masa depan.

Tinjauan Pustaka

Teori Ekonomi Perencanaan Pembangunan

Menurut Jhingan (1984), seorang ahli perencanaan pembangunan bangsa india memberikan definisi yang lebih konkret tentang perencanaan pembangunan tersebut, menurut

pendapat Jhingan, perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu pengusaha (pemerintah) pusat untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu di dalam jangka waktu tertentu pula. Ilmu perencanaan pembangunan sebenarnya berasal dari perencanaan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Perencanaan pada dasarnya merupakan cara, teknik atau metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat, terarah dan efisien sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Dengan demikian, secara umum perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah bersangkutan. Sedangkan tujuan pembangunan pada umumnya adalah mendorong proses pembangunan secara lebih cepat guna mewujudkan masyarakat yang maju, makmur dan sejahtera (Sjafrizal, 2017:7-24).

Teori Tingkat Kemiskinan

Menurut Arfiani (2009:5), kemiskinan berasal dari kata dasar miskin yang berarti mampu bekerja atau berusaha namun tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dimiliki seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, air minum dan lain sebagainya. Hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak ada akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara. Menurut Chambers, kemiskinan sangat tergantung pada siapa yang bertanya, bagaimana hal itu dipahami serta siapa yang meresponnya. Perspektif ini mengelompokkan makna kemiskinan menjadi beberapa kelompok dan beberapa diantaranya : kelompok pertama, yang memandang kemiskinan dari sisi pendapatan (*income-poverty*), kelompok kedua, yang memaknai kemiskinan dari kekurangan materi dan kelompok ketiga, mengacu pada pendapatan (Kotambunan, 2016:928).

Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah semua pembelian barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah-pemerintah daerah (Boediono, 2014:50). Pajak yang diterima pemerintah akan digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan pemerintah. Sebagian dari pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintahan dan sebagian lainnya adalah untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan. Membayar gaji pegawai-pegawai pemerintah, membiayai sistem pendidikan dan kesehatan rakyat, membiayai perbelanjaan untuk angkatan bersenjata, dan membiayai berbagai jenis infrastruktur yang penting, artinya dalam pembangunan ada beberapa bidang penting yang akan dibiayai pemerintah. Perbelanjaan-perbelanjaan tersebut akan meningkatkan pengeluaran agregat dan mempertinggi tingkat kegiatan ekonomi negara (Sukirno, 2019:168).

Teori Pendidikan

Menurut Susanto dan Pangesti, pendidikan merupakan kebutuhan paling asasi bagi semua orang karena masyarakat yang berpendidikan setidaknya dapat memiliki kemampuan untuk membebaskan diri dari kemiskinan (Netri, 2023). Faktor yang mempengaruhi tingkat pendidikan menurut Hasbullah (2003) adalah Ideologi, sosial ekonomi, sosial budaya, perkembangan IPTEK dan Psikologi. Menurut Badan Pusat Statistik (2023) Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal (tidak termasuk tahun untuk mengulang). Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk usia 25 tahun keatas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Tingginya angka rata-rata lama sekolah menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang

Teori Kesehatan

Dalam undang-undang No. 36 tahun 2009, kesehatan didefinisikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Kesehatan merupakan salah satu variabel kesejahteraan rakyat yang dapat menggambarkan tingkat kesehatan masyarakat sehubungan dengan kualitas hidupnya. Menurut Angka Harapan Hidup (AHH) atau Umur

Harapan Hidup dijadikan indikator dalam mengukur kesehatan suatu individu di suatu daerah. Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang selama hidup. Angka Harapan Hidup (AHH) diartikan sebagai umur yang mungkin dicapai seseorang yang lahir pada tahun tertentu. Angka harapan hidup dihitung menggunakan pendekatan tak langsung (*indirect estimation*). Ada dua jenis data yang digunakan dalam penghitungan Angka Harapan Hidup (AHH) yaitu Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH) (Badan Pusat Statistik, 2023)

Penelitian Terdahulu

Penelitian Yolanda Pateda, Vecky A.J.Masinambouw dan Tri Oldy Rotinsulu (2016) berjudul Pengaruh Investasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan di Gorontalo. Metode penelitian adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian, investasi memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Gorontalo, sementara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Gorontalo.

Penelitian Yuyun Telau, Daisy S.M Engka dan Wensy I.F Rompas (2021) berjudul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Maluku Utara Tahun 2005-2020. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh positif terhadap kemiskinan, pengangguran tidak memiliki pengaruh dengan kemiskinan, pendidikan berpengaruh secara negatif dan signifikan dan kesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan.

Penelitian Alessandro Tjiabrata, Daisy S.M. Engka dan Wensy F.I. Rompas (2021) berjudul Analisis Pengaruh Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi dan Kesehatan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Sulawesi Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara, pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara, Kesehatan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara.

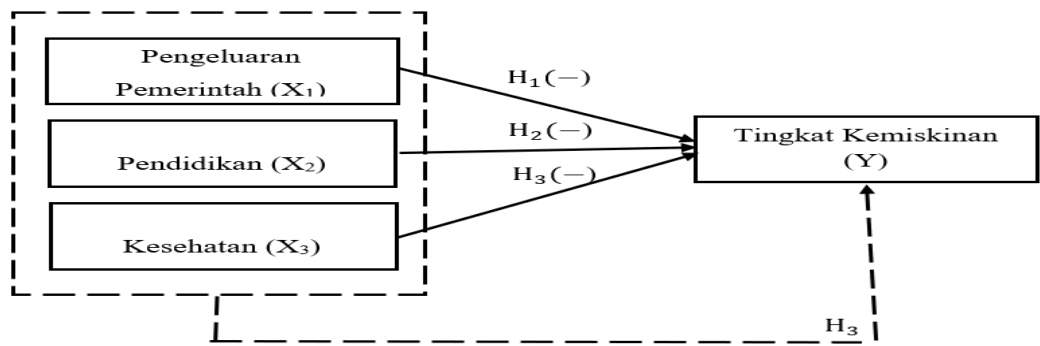
Penelitian Nila Isroviyah (2020) Analisis Pengaruh Pendidikan Dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2016-2020. Penelitian ini menggunakan metode regresi data panel dengan tahun penelitiannya adalah 2016-2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan dan kesehatan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia.

Penelitian Ade Marsinta Arsani, Bugi Ario dan Al Fitra Ramadhan (2020) berjudul *Impact of Education on Poverty and Health: Evidence From Indonesia*. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi 2 sls. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan secara signifikan mempengaruhi status kekayaan rumah tangga dan kesehatan. Dalam bentuk terpilah, pengembalian dari pendidikan tinggi memiliki signifikan lebih tinggi dari pengembalian dari tingkat primer dan sekunder. Variabel kontrol lainnya seperti usia, jenis kelamin, jumlah anak, dan tempat tinggal, juga memiliki dampak yang signifikan terhadap kemiskinan dan rumah tangga status kesehatan.

Penelitian Risky Soleman (2022) berjudul *Determinants Of Poverty Rate in Eastern Indonesia*. Metode Analisis data menggunakan regresi data panel dengan Common Effect Model (CEM), Fixed Effect Model (FEM), dan Pendekatan Random Effect Model (REM) yang diolah E-Views 10. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model estimasi yang terpilih yaitu Random Effect Model (REM) dilanjutkan dengan uji LM menunjukkan hasil variabel Pembiayaan Perbankan Syariah, TPAK, RLS, UHH, dan Inflasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Variabel PDRB memiliki pengaruh simultan terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan UHH berkorelasi negatif dan signifikan. Sedangkan pada uji simultan nilai prob F-Statistik sebesar $0.000000 < 0.05$ yang berarti ke enam variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di kawasan Timur Indonesia.

Kerangka Pemikiran

Gambar 1 Kerangka Pemikiran



Sumber: Kajian diolah Penulis

Hipotesis

1. Diduga bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara.
2. Diduga bahwa pendidikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara.
3. Diduga bahwa kesehatan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara.
4. Diduga bahwa pengeluaran pemerintah, pendidikan dan kesehatan secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara.

2. METODE PENELITIAN

Data dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang didapat dari buku, catatan dan majalah berupa laporan pemerintah, artikel, buku-buku sebagai teori dan lain sebagainya. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tingkat kemiskinan, pengeluaran pemerintah, pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Kepulauan Talaud, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Dengan periode pengamatan tahun 2011-2022 (dua belas tahun) yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka. Studi pustaka adalah kegiatan mempelajari, mendalami dan mengutip teori-teori atau konsep-konsep dari sejumlah literatur baik buku, jurnal, majalah atau karya tulis lainnya yang relevan dengan topik, fokus atau variabel penelitian (Widodo, 2019:75).

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Untuk menghindari perbedaan penafsiran maka akan dijelaskan definisi masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Definisi operasional masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengeluaran Pemerintah adalah realisasi seluruh belanja pemerintah di Provinsi Sulawesi Utara yang diukur dengan satuan jutaan rupiah per tahun.
2. Pendidikan adalah rata-rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas dalam menempuh pendidikan formal di Provinsi Sulawesi Utara yang diukur dengan satuan tahun.
3. Kesehatan adalah Umur Harapan Hidup yaitu rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang sejak lahir di Provinsi Sulawesi Utara yang dikur dengan satuan tahun
4. Tingkat kemiskinan adalah persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara yang diukur dengan satuan persen per tahun.

Metode Analisis Data

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh variabel pengeluaran pemerintah, pendidikan dan kesehatan terhadap tingkat kemiskinan, di 5 Kabupaten Provinsi Sulawesi Utara dengan menggunakan teknik analisis regresi data panel yang diolah menggunakan *Eviews 13*. Model penelitian dirumuskan sebagai berikut :

$$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan :

- Y = Tingkat Kemiskinan
- X₁ = Pengeluaran Pemerintah
- X₂ = Pendidikan
- X₃ = Kesehatan
- β₀ = Konstanta
- β₁₋₃ = Koefisien Parsial dari variabel X₁, X₂ dan X₃
- ε_{it} = *Error Term* di waktu t untuk unit *cross section*
- i = 1,2,3,4,5 (data *cross section* 5 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara)
- t = 1,2,3,...,12 (data *time series* 2011-2022)

Estimasi Regresi Data Panel

Ada beberapa metode yang biasa digunakan dalam untuk mengestimasi model regresi dengan data panel yaitu Metode *Common effect*, Metode *Fixed effect* dan Metode *Random effect*.

Metode Common Effect

Metode *common effect* adalah teknik yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel adalah hanya dengan mengkombinasikan data *time series* dan data *cross section* (Widarjono, 2018:365).

Metode Fixed Effect

Teknik model *fixed effect* adalah teknik mengestimasi data panel dengan menggunakan variabel dummy untuk menangkap adanya perbedaan intersep (Widarjono, 2018:366).

Metode Random Effect

Di dalam model ini kita akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu (Widarjono, 2018:370).

Pemilihan Estimasi Regresi Data Panel

Dari ketiga metode regresi data panel yang telah diestimasi akan dipilih metode yang paling tepat sesuai dengan tujuan penelitian. Ada tiga uji yang digunakan untuk menentukan teknik yang paling tepat untuk mengestimasi regresi data panel yaitu, uji statistik F (*Uji Chow*), Uji hausman (*Haustman Test*) dan *lagrange multiplier* (LM) *test*.

Uji Statistik F (Uji Chow)

Menurut Widarjono (2018:373), uji chow adalah uji yang digunakan untuk memilih antara metode *fixed effect* atau metode *common effect* yang sebaiknya dipakai untuk mengestimasi data panel.

Uji Hausman (Haustman Test)

Menurut Basuki dan Prawoto (2016: 277) uji hausman merupakan pengujian statistik untuk memilih apakah model *fixed effect* atau *random effect* sebagai model yang tepat untuk regresi data panel.

Uji Lagrange Multiplier (LM) test

Uji *lagrange multiplier* adalah uji yang dilakukan untuk menentukan model yang tepat antara *common effect* dan *random effect* untuk digunakan dalam mengestimasi data panel.

Uji Signifikansi

Uji Signifikan terdiri dari dua uji yaitu uji t atau parsial dan uji F atau uji simultan atau bersama-sama.

Uji t (Parsial)

Uji parsial digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas secara individual dalam menjelaskan variabel terikat. Uji ini dilakukan dengan melihat probabilitas t statistik, ketika $\text{prob} < \text{taraf sig } 5\%$, maka H_0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan variabel bebas tersebut signifikan mempengaruhi variabel terikat (Widarjono, 2018).

Uji F (Simultan)

Uji F diperuntukkan guna melakukan uji hipotesis koefisien (*slope*) regresi secara bersamaan (Nachrowi & Usman, 2006:17). Uji F bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari seluruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Apabila nilai $\text{prob } F\text{-statistik} < \text{taraf sig } 5\%$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari empat uji, yaitu uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas dan uji autokorelasi.

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas kedua-duanya berdistribusi normal atau tidak. Pengambilan keputusan dengan Jargue–Bera test yaitu apabila probabilitas $> 5\%$, maka variabel-variabel tersebut berdistribusi normal (Widarjono, 2018:50).

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi terdapat korelasi antarvariabel bebas atau tidak. Salah satu ciri adanya gejala multikolinieritas adalah jika koefisien korelasi cukup tinggi katakanlah di atas 0,85 maka kita duga ada multikolinieritas dalam model. Sebaliknya jika koefisien korelasi relatif rendah maka model tidak mengandung unsur multikolinieritas (Widarjono, 2018:104).

Uji Heterokedastisitas

Menurut Ghozali (2012: 139) uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Apabila probabilitas dari masing-masing variabel bebas lebih dari 0,05 maka terjadi penerimaan terhadap H_0 , sehingga tidak terdapat heteroskedastis pada model tersebut atau hasilnya data dalam kondisi homokedastis.

Uji Autokorelasi

Menurut Ghozali (2012: 110) uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode-t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Pengujian autokorelasi dilakukan dengan uji durbin watson dengan membandingkan nilai durbin watson hitung (d) dengan nilai durbin watson tabel untuk mengetahui keberadaan korelasi positif atau negatif.

Koefisien Determinasi

Nilai koefisien determinasi ini mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel terikat Y dapat diterangkan oleh variabel bebas X. Bila nilai koefisien determinasi sama dengan 0 ($R^2 = 0$), artinya variasi dari Y tidak dapat diterangkan oleh X sama sekali. Sementara bila $R^2 = 1$, maka semua titik pengamatan berada tepat pada garis regresi.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemilihan Teknik Estimasi Regresi Data Panel

Ada tiga metode yang biasa digunakan untuk mengestimasi model regresi data panel yaitu *common effect model*, *fixed effect model* dan *random effect model*. Dari ketiga metode tersebut akan dipilih satu metode paling baik yang akan digunakan untuk mengestimasi data panel yaitu melalui tiga teknik yaitu *uji chow*, *uji hausman* dan *uji lagrange multiplier*.

Uji Statistik F (*Uji Chow*)

Tabel 2
Hasil Uji Chow

Redundant Fixed Effects Tests Equation: Untitled Test cross-section fixed effects			
Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	61.631728	(4,52)	0.0000
Cross-section Chi-square	104.856982	4	0.0000

Sumber : Hasil Olahan Eviews 13

Berdasarkan tabel *uji chow* di atas, nilai probabilitas *cross section chi-square* (0.0000) < α (0.05) maka H_0 ditolak, karena H_0 ditolak maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan *uji chow*, *fixed effect model* adalah metode yang sesuai.

Uji Hausman (*Hausmant Test*)

Tabel 3
Hasil Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test Equation: Untitled Test cross-section random effects			
Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	18.503280	3	0.0003

Sumber : Hasil Olahan Eviews 13

Berdasarkan tabel uji hausman di atas, nilai probabilitas *cross section random uji hausman* (0.0003) < α (0.05) maka H_0 ditolak. Karena H_0 ditolak, maka dapat disimpulkan bahwa berdasarkan uji hausman, *fixed effect model* adalah metode yang sesuai.

Dari hasil uji chow dan uji hausman di atas, diperoleh model yang sesuai untuk mengestimasi data panel dalam penelitian ini adalah *fixed effect model*. Karena pada *uji chow* dan *uji hausman* model yang paling tepat adalah *fixed effect model* maka selanjutnya kita langsung melakukan uji signifikansi dan pengujian asumsi klasik dan tidak perlu lagi melakukan uji *lagrange multiplier*.

Uji Signifikansi

Uji Parsial (t)

Berdasarkan tabel *fixed effect model*, nilai uji t-statistik diperoleh probabilitas pengeluaran pemerintah (X_1) (0.0246) < α (0.05), maka H_0 ditolak. Karena H_0 ditolak maka dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara.

Nilai probabilitas t-statistik pendidikan (X_2) ($0.0469 < \alpha (0.05)$), maka H_0 ditolak. Karena H_0 ditolak dapat disimpulkan bahwa pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara.

Nilai probabilitas t-statistik kesehatan (X_3) ($0.3646 > \alpha (0.05)$), maka H_0 diterima. Karena H_0 diterima maka dapat disimpulkan bahwa kesehatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara.

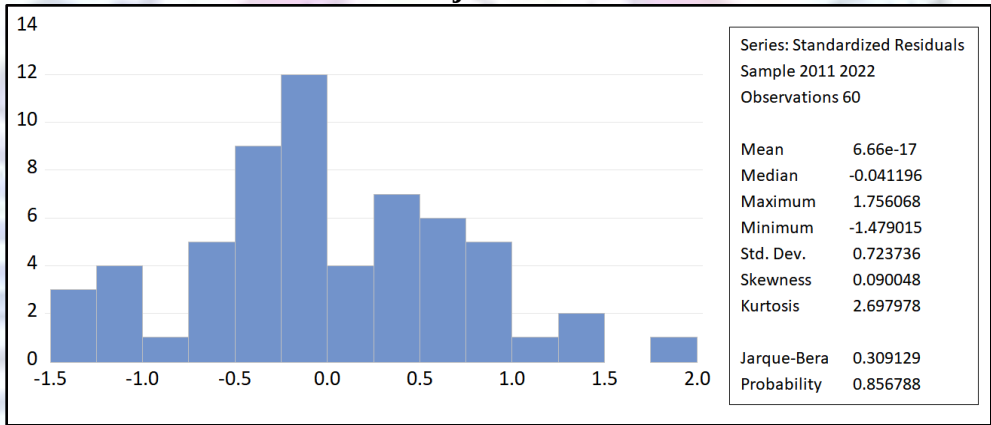
Uji Simultan (F)

Berdasarkan tabel output *fixed effect model*, dapat diketahui bahwa nilai uji F-statistik diperoleh prob ($0.000000 < \alpha (0.05)$), maka H_0 ditolak. Berdasarkan keputusan di atas dapat disimpulkan bahwa variabel (X_1) pengeluaran pemerintah, (X_2) pendidikan dan (X_3) kesehatan secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Gambar 2
Hasil Uji Normalitas



Sumber : Hasil Olahan Eviews 13

Berdasarkan tabel uji normalitas di atas, nilai probabilitas Jargue-Bera ($0.856788 > \alpha (0.05)$) maka H_0 diterima. Karena H_0 diterima, maka dapat disimpulkan bahwa residual data berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinieritas

	X1	X2	X3
X1	1	0.4916836618106338	0.5638263401440904
X2	0.4916836618106338	1	0.6121902340563628
X3	0.5638263401440904	0.6121902340563628	1

Sumber : Hasil Olahan Eviews 13

Berdasarkan tabel uji multikolinieritas, semua nilai koefisien korelasi < 0.8 , maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antarvariabel independen atau dengan kata lain asumsi nonmultikolinieritas terpenuhi.

Uji Hetekodesatisitas

Tabel 5 Hasil Uji Heterokedastisitas (Uji Glejser)

Dependent Variable: ABS(RESID)
Method: Panel Least Squares
Date: 09/16/23 Time: 02:00
Sample: 2011 2022
Periods included: 12
Cross-sections included: 5
Total panel (balanced) observations: 60

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-19.97659	26.83237	-0.744496	0.4599
LOG(X1)	0.340320	0.440155	0.773183	0.4429
X2	-0.773705	0.536709	-1.441573	0.1554
X3	0.294407	0.393542	0.748096	0.4578

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.274846	Mean dependent var	0.671844	
Adjusted R-squared	0.177229	S.D. dependent var	0.559313	
S.E. of regression	0.507334	Akaike info criterion	1.604272	
Sum squared resid	13.38418	Schwarz criterion	1.883518	
Log likelihood	-40.12817	Hannan-Quinn criter.	1.713501	
F-statistic	2.815553	Durbin-Watson stat	1.121174	
Prob(F-statistic)	0.014538			

Sumber : Hasil Olahan Eviews 13

Berdasarkan tabel uji glejser diperoleh probabilitas X_1 pengeluaran pemerintah (0.4429) $> \alpha$ (0.05), maka H_0 diterima, probabilitas X_2 pendidikan (0.1554) $> \alpha$ (0.05), maka H_0 diterima dan probabilitas X_3 kesehatan (0.4578) $> \alpha$ (0.05), maka H_0 diterima. Karena semua H_0 untuk variabel independen diterima berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada variabel independen.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi ini menggunakan nilai durbin-watson dalam tabel *fixed effect model* untuk melihat masalah autokorelasi dalam model. Berdasarkan nilai durbin-watson pada tabel *fixed effect model* yaitu:

$d = 0.911640$

$dL = 1.4797$ (berdasarkan tabel Durbin-Watson $n=60$. $k=3$)

$dU = 1.6889$ (berdasarkan tabel Durbin-Watson $n=60$. $k=3$)

Nilai durbin watson berada di antara 0 dan dL yaitu $(0) < d (0.911640) < dU (1.6889)$, karena nilai durbin watson berada di antara 0 dan dL maka dapat disimpulkan bahwa uji autokorelasi berada di daerah ada autokorelasi positif. Tetapi karena model estimasi data panel yang paling sesuai adalah *fixed effect model* maka uji autokorelasi dapat diabaikan dalam masalah penelitian ini karena menggunakan data panel.

Koefisien Determinasi

Berdasarkan tabel output *fixed effect model*, dapat diketahui bahwa nilai *R-square* sebesar 0,899606. artinya secara bersama-sama variabel (X_1) pengeluaran pemerintah, (X_2) pendidikan dan (X_3) kesehatan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan sebesar 89,9606%, sedangkan sisanya sebesar 10,0394% ($100\%-89,9606\%$) dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam pemodelan ini.

Estimasi Model Penelitian

Setelah melakukan uji *chow* dan uji *hausman* untuk menentukan metode yang paling tepat antara *fixed effect model*, *random effect model* dan *common effect model* yang akan digunakan untuk meregresikan data panel maka metode yang dipilih untuk digunakan dalam penelitian ini adalah *fixed effect model*. Hasil regresi *fixed effect model* adalah sebagai berikut :

Tabel 6
Hasil Uji *Fixed Effect Model*

Dependent Variable: Y?				
Method: Pooled Least Squares				
Date: 09/16/23 Time: 01:56				
Sample: 2011 2022				
Included observations: 12				
Cross-sections included: 5				
Total pool (balanced) observations: 60				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	59.96955	34.68280	1.729086	0.0897
X1?	2.14E-09	9.24E-10	2.315493	0.0246
X2?	-1.575154	0.773859	-2.035455	0.0469
X3?	-0.535065	0.585027	-0.914599	0.3646
Fixed Effects (Cross)				
_BOLSEL-C	-0.529591			
_MINSEL-C	-1.509246			
_MITRA-C	3.483778			
_SANGIHE-C	-0.934034			
_TALAUD-C	-0.510906			
Effects Specification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.899606	Mean dependent var	11.78683	
Adjusted R-squared	0.886091	S.D. dependent var	2.284155	
S.E. of regression	0.770912	Akaike info criterion	2.441080	
Sum squared resid	30.90386	Schwarz criterion	2.720326	
Log likelihood	-65.23241	Hannan-Quinn criter.	2.550309	
F-statistic	66.56530	Durbin-Watson stat	0.911640	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Hasil Olahan Eviews 13

Dari tabel di atas dapat dituliskan model persamaan regresi untuk data panel sebagai berikut:

$Y_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \varepsilon_{it}$

Dimana :

$Y_{it} = 59.96955 + 0.00000000214 X_{1it} - 1.575154 X_{2it} - 0.535065 X_{3it} + \varepsilon_{it}$

berdasarkan persamaan di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 59.96955 menyatakan bahwa jika nilai X_1 pengeluaran pemerintah, X_2 pendidikan dan X_3 kesehatan sama dengan nol maka nilai tingkat kemiskinan (Y) adalah sebesar 59.96955.
2. Secara parsial, pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Artinya, pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara. Nilai koefisien regresi pengeluaran pemerintah memiliki hubungan positif 2.14E-09, artinya setiap kenaikan 1 juta pengeluaran pemerintah, maka tingkat kemiskinan akan mengalami kenaikan sebesar 0.0000000214 persen dalam hal ini faktor lain dianggap tetap.
3. Secara Parsial, pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Artinya, dengan meningkatnya pendidikan akan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara. Nilai koefisien regresi pendidikan memiliki hubungan negatif 1.575154, artinya setiap kenaikan 1 tahun pendidikan, maka tingkat kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar 1.575154 persen dalam hal ini faktor lain dianggap tetap.
4. Secara Parsial, kesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Artinya, kesehatan tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara.
5. Secara simultan, terlihat bahwa nilai probabilitas uji F-statistik $0.000000 < 0.05$, yang berarti pengeluaran pemerintah, pendidikan dan kesehatan secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara.
6. Berdasarkan hasil penelitian, pengeluaran pemerintah, pendidikan dan kesehatan mampu menjelaskan atau mempengaruhi tingkat kemiskinan sebesar 89,9606%, sedangkan sisanya sebesar 10,0394% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini.

7. Hasil regresi menunjukkan bahwa model telah melalui uji asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji heterokedastisitas, uji multikolinieritas dan uji autokorelasi.

Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh secara positif terhadap tingkat kemiskinan dan signifikan secara statistik. Hal ini terlihat dari nilai probabilitas $(0.0246) < \alpha (0.05)$ dengan nilai koefisien positif $2.14E-09$ Artinya ketika pengeluaran pemerintah sebesar 1 juta, maka tingkat kemiskinan akan mengalami kenaikan sebesar 0.00000000214 persen, dengan asumsi nilai konstanta sama dengan nol dan variabel bebas lainnya dianggap tetap (*Ceteris Paribus*). Dengan demikian, keputusannya ialah H_0 diterima dan H_a ditolak artinya ada hubungan positif antara pengeluaran pemerintah dan tingkat kemiskinan. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa jika pengeluaran pemerintah mengalami kenaikan maka tingkat kemiskinan akan mengalami penurunan dan yang terjadi malah sebaliknya yaitu ketika pengeluaran pemerintah mengalami kenaikan maka tingkat kemiskinan akan mengalami kenaikan. Permasalahan utama dari kemiskinan adalah kemampuan masyarakat miskin untuk memperoleh pelayanan dari taraf kebutuhan hidup mereka. Seperti halnya dapat memperoleh pelayanan kesehatan maupun pendidikan, maka disinilah peran pemerintah melalui pengeluarannya untuk masyarakat miskin dapat memberikan jalan yang lebih mudah untuk mendapatkan pelayanan umum. Menurut (Mankiew, 2003) pemerintah memiliki perangkat kebijakan fiskal untuk mempengaruhi tujuan pembangunan suatu negara. Kebijakan fiskal terdiri atas dua instrumen utama yaitu kebijakan pajak dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, Pemerintah yang ada di Provinsi Sulawesi Utara terlebih khusus pemerintah yang ada di 5 Kabupaten tersebut hendaknya selalu mempertahankan atau meningkatkan pengeluaran pemerintah terlebih khusus pengeluaran pemerintah yang berfungsi untuk kesejahteraan rakyat seperti pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur, pendidikan dan kesehatan, agar dengan demikian pengeluaran pemerintah nantinya dapat berpengaruh secara negatif terhadap tingkat kemiskinan dan dapat menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara, terlebih khusus kemiskinan di 5 Kabupaten yang sedang diteliti ini. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rohadin dan Arief Nurcahyo, yang berjudul Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Cirebon Tahun 2011-2018, yang menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kota Cirebon.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh secara negatif terhadap tingkat kemiskinan dan signifikan secara statistik. Hal ini terlihat dari nilai probabilitas $(0.0469) < \alpha (0.05)$ dengan nilai koefisien negatif 1.575154 Artinya ketika pendidikan naik sebesar 1 tahun, maka tingkat kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar 1.575154 persen, dengan asumsi nilai konstanta sama dengan nol dan variabel bebas lainnya dianggap tetap (*Ceteris Paribus*). Dengan demikian, keputusannya ialah H_0 ditolak dan H_a diterima artinya ada hubungan antara pendidikan dan tingkat kemiskinan. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa jika pendidikan mengalami kenaikan maka tingkat kemiskinan akan mengalami penurunan. Teori menyatakan bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam kemampuan negara berkembang dalam menghadapi perkembangan teknologi sedangkan kesehatan menjadi penunjang bagi peningkatan produktivitas. Sehingga, dapat diartikan pendidikan dan kesehatan memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi menurut (Todaro 2011). Kemudian menurut Mankiew, investasi terhadap pendidikan memiliki korelasi dengan pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditempuh masyarakat pada umumnya dapat membuat semakin tinggi kualitas orang tersebut. Semakin tinggi kualitas seseorang maka produktivitasnya akan semakin tinggi. Semakin tinggi produktivitas seseorang maka orang tersebut akan menghasilkan pendapatan yang maksimal daripada yang produktivitasnya rendah. Menurut teori kemiskinan Nurske, hubungan rendahnya produktivitas atau kualitas sumber daya manusia akan menyebabkan pendapatan rendah atau kemiskinan. Pendidikan formal dan non formal merupakan peran penting dalam mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang, baik secara tidak langsung melalui perbaikan serta peningkatan produktivitas dan efisiensi secara umum, maupun secara langsung melalui pelatihan golongan miskin dengan ketrampilan yang dibutuhkan serta diajarkan untuk meningkatkan produktivitas mereka dan pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan mereka. Perusahaan atau lapak kerja

akan memperoleh hasil yang lebih banyak dengan mempekerjakan tenaga kerja dengan produktivitas yang lebih tinggi, sehingga nantinya diharapkan perusahaan akan bersedia memberikan upah atau gaji yang lebih tinggi kepada yang tenaga kerja. Pada akhirnya seseorang yang memiliki produktivitas yang tinggi akan memperoleh kesejahteraan yang lebih baik dan dapat diperlihatkan melalui peningkatan pendapatan maupun konsumsinya. Implementasi kebijakan untuk pemerintah yang ada di Provinsi Sulawesi Utara terlebih khusus pemerintah yang ada di 5 Kabupaten tersebut agar supaya selalu memperhatikan dan meningkatkan pendidikan dengan cara memberikan sekolah gratis bagi yang kurang mampu, agar dengan demikian nantinya rata-rata lama sekolah di 5 Kabupaten tersebut dapat terus naik dan mencapai angka 12 tahun yang artinya rata-rata penduduk sudah menyelesaikan wajib belajar 12 tahun. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Elvira Handayani Jacobus, Paulus Kindangen dan Een N. Walewangko, yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga di Sulawesi Utara, yang menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan rumah tangga di Sulawesi Utara. Penelitian lain yang mendukung hasil penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Alessandro Tjiabrata, Daisy S.M. Engka dan Wensy F.I. Rompas, berjudul Analisis Pengaruh Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi dan Kesehatan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Sulawesi Utara, yang menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Sulawesi Utara.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa kesehatan berpengaruh secara negatif terhadap tingkat kemiskinan dan tidak signifikan secara statistik. Hal ini terlihat dari nilai probabilitas $(0.3646) > \alpha (0.05)$ dengan nilai koefisien negatif 0.535065 Artinya ketika pendidikan naik sebesar 1 tahun, maka tingkat kemiskinan akan mengalami penurunan sebesar 0.535065 persen, dengan asumsi nilai konstanta sama dengan nol dan variabel bebas lainnya dianggap tetap (*Ceteris Paribus*). Dengan demikian, keputusannya ialah H_0 diterima dan H_a ditolak artinya tidak ada hubungan antara kesehatan dan tingkat kemiskinan. Hal ini tidak sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa kesehatan memiliki hubungan dengan tingkat kemiskinan. Teori menyatakan bahwa Kesehatan merupakan kebutuhan yang mendasar bagi tiap manusia, karena tanpa adanya kesehatan yang layak masyarakat tidak dapat menghasilkan produktivitas optimal. Menurut Todaro (2011) menyatakan bahwa *human capital* dapat diukur melalui kesehatan, karena kesadaran akan kesehatan memiliki keterkaitan dengan produktivitas seseorang dalam melakukan aktivitasnya sehingga dengan demikian orang tersebut dapat memperoleh pekerjaan dan penghasil untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan dengan demikian dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah yang ada di 5 Kabupaten tersebut hendaknya selalu memperhatikan dan terus mengontrol kesehatan masyarakatnya dan membuat kebijakan seperti memberikan pengobatan gratis untuk orang yang kurang mampu agar nantinya kesehatan dapat terus meningkat dan kemiskinan dapat mengalami penurunan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuyun Telau, Daisy S.M Engka dan Wensy I.F Rompas, berjudul Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Maluku Utara Tahun 2005-2020, yang menunjukkan bahwa kesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Maluku Utara.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini berarti bahwa jika pengeluaran pemerintah meningkat maka tingkat kemiskinan akan mengalami peningkatan.
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini berarti bahwa jika pendidikan meningkat maka tingkat kemiskinan akan mengalami penurunan.
3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesehatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini berarti tidak ada pengaruh antara kesehatan dan tingkat kemiskinan.

4. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah, pendidikan dan kesehatan secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara.

Saran

1. Pemerintah atau pihak-pihak terkait, hendaknya dapat memperhatikan tentang pengeluaran pemerintah khususnya di 5 Kabupaten yang sedang diteliti, agar supaya ditingkatkan efisiensinya, agar nantinya pengeluaran pemerintah tersebut dapat berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan dan kemiskinan dapat mengalami penurunan secara optimal.
2. Kebijakan pemerintah tentang pendidikan yaitu wajib belajar harus dilakukan secara merata dengan tersebarnya guru-guru yang berbakat serta berkualitas agar masyarakat miskin dapat terjamin pendidikannya serta penyetaraan tamatan melalui program paket A,B dan C, sehingga mereka bisa tetap melanjutkan pendidikannya disamping terus bekerja. Diperlukan juga upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan. Hal ini dapat dilakukan misalnya dengan peningkatan program pemberian beasiswa pada siswa-siswa kurang mampu untuk menempuh pendidikan setelah menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.
3. Kesehatan merupakan hal yang paling penting, Hal ini perlu menjadi perhatian oleh pemerintah dalam menerapkan kebijakan yaitu mengenai pemberian Kartu Indonesia Sehat yang masih belum optimal. Kemudian kesadaran masyarakat harus lebih di optimalkan melalui sosialisasi dari pemerintah. Serta sarana prasana fasilitas kesehatan yang belum merata di Sulawesi Utara harus menjadi perhatian khusus oleh pemerintah.
4. Peneliti berharap penelitian ini dapat dilanjutkan oleh peneliti selanjutnya, terlebih khusus penggunaan variabel Kesehatan yang tidak berpengaruh signifikan dalam penelitian ini, sehingga nantinya variabel kesehatan dapat berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ah Maftuchan 2015, *Bergegas Keluar dari Kemiskinan: Berjalan dengan Peta SDGs & Peta RPJMN*. PRAKARSA
- Jacobus. E.H, Paulus Kindangen, Een Walewangko. (2018). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga di Sulawesi Utara*. Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah, Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Arfiani.Devi. (2009). *Berantas Kemiskinan*. Alprin : Semarang
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Pembangunan Ekonomi* (Edisi Ke-1). Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kuncoro, Mudarajad. (2000). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah dan kebijakan*, UPP AMP YKPN: Yogyakarta
- Sri Budhi.M.K. (2014). *Teori Pengantar Ekonomi Makro dan Mikro*. Penerbit Andi : Yogyakarta.
- Tjiabrata.A. Daisy Engka. Wensy Rompas. *Analisis Pengaruh Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi dan Kesehatan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Sulawesi Utara*. Jurnal Berkalah Ilmiah Efisiensi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Lincoln. A. (1999). *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. BPFE : Yogyakarta.
- Jhingan M.L. (1984). *Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Sjafrizal (2017). *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*. Depok: Rajawali Pers
- Kotambunan.L, Sutomo.W.P, Richard L.H T.(2016). *Analisis Pengaruh Belanja Modal dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara (dalam tahun 2005-2014)*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi.
- Boediono. (2014). *Ekonomi Makro*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gajah Madah : Yogyakarta
- Sukirno, S. (2019). *Makroekonomi Teori Pengantar* (Edisi ke 3). Depok: Rajawali Pers.

- Netri. Kawung. Hanly. (2023). *Pengaruh Tingkat Pengangguran, Upah dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kemiskinan Di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2009-2021*. Jurnal Berkalah Ilmiah Efisiensi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Hasbullah, (2003). *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Badan Pusat Statistik. (2013-2022). *Sulawesi Utara dalam Angka*. Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara.
- Patade.Y, Vecky A.J. Masinambouw, Tri Oldy Rotinsulu. (2016). *Pengaruh Investasi, Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Tingkat Kemiskinan di Gorontalo*. Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah, Magister Ilmu Ekonomi, Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Telau.Y. Daisy Engka, Wensy I.F Rompas .(2021). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Maluku Utara Tahun 2005-2020*. Jurnal Berkalah Ilmiah Efisiensi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado.
- Isroviyah Nila. (2020). *Pengaruh Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan Indonesia Tahun 2016-2020*. Universitas Brawijaya.
- Arsani.A.M. Bugi Ario.Al Fitra Ramadhan.(2020). *Impact of Education on Poverty and Health: Evidence From Indonesia*. *Economics Development Analysis Journal*.
- Soleman, Risky (2022). *Determinantr of Poverty Rate in Eastern Indonesia*. Jurnal Ekonomi Terapan.UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, DI Yogyakarta, Indonesia
- Widodo. (2019). *Metodologi Penelitian Populer dan Praktis*. DepokRajawali Pers
- Widarjono, A. (2018). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya disertai Panduan Eviews* (Edisi ke 5). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Basuki.A.T., Nano Prawoto. (2016). *Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis*. Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Nachrowi,D., & Usman, H. (2006). *Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Ghozali, I. (2012). *Analisis Multivariat dan Ekonometrika: Teori, Konsep, dan Aplikasi dengan Eviews 8*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP (UNDIP Press).
- Mankiew, N. (2003). *Teori Makroekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Rohadin. Arief Nurcahyo. (2019) *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Cirebon Tahun 2011-2018*. Jurnal Cendekia Jaya.

ANALISIS PENERIMAAN PAJAK RESTORAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MINAHASA SELATAN

Inggrit Lucrecia Livy Kapoh¹, Anderson G. Kumenaung², Een N. Walewangko³

Program Studi Magister Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi, Manado

Email: inggritkapoh@gmail.com, andersongkumenaung@unsrat.ac.id, eenwalewangko@unsrat.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini yaitu menganalisis Penerimaan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan periode 2017-2022. Objek penelitian ini yaitu Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Metode analisis yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Hasil penelitian bahwa Efektifitas Penerimaan Pajak Restoran Tahun Anggaran 2017, 2018, 2021 dan 2022 sangat efektif sedangkan pada Tahun Anggaran 2019 efektif dan Tahun 2020 kurang efektif, Kontribusi pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah dari tahun 2017-2019 berada pada kriteria kurang, tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun 2022 terjadi penurunan kontribusi menjadi sangat kurang, Pengujian paired sample T Test memperlihatkan adanya perbedaan dalam penerimaan Pajak Restoran sebelum dan selama Pandemi Covid 19 di Kabupaten Minahasa Selatan

Kata Kunci : Pajak Restoran, Efektifitas, Kontribusi, Uji Beda

ABSTACT

The aim of this research is to analyze Restaurant Tax Revenue at the Regional Revenue Agency of South Minahasa Regency for the 2017-2022 period. The object of this research is the Regional Revenue Agency of South Minahasa Regency. The analytical method used to discuss the problems in this research is the descriptive analysis method. The results of the research show that the effectiveness of restaurant tax revenues for the 2017, 2018, 2021 and 2022 fiscal years is very effective, whereas in the 2019 fiscal year it was effective and in 2020 it was less effective. The contribution of restaurant taxes to regional tax revenues from 2017-2019 is in the lower criteria, for the 2020 fiscal year Until 2022, there will be a decrease in contribution to very little. The paired sample T test shows that there is a difference in restaurant tax revenue before and during the Covid 19 pandemic in South Minahasa Regency.

Keywords: Restaurant Tax, Effectiveness, Contribution, Difference Test

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan Negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ada beberapa indikator yang menentukan keberhasilan pembangunan nasional, misalnya pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, indeks kualitas hidup, urbanisasi dan indeks pembangunan manusia, kesehatan dan pendidikan. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting untuk menganalisis sebuah pembangunan nasional yang terjadi di suatu negara dan menjadi perhatian terutama pemerintah. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintah dan

pelayanan kepada masyarakat.

Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan pemerintah daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, pinjaman daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan Asli Daerah yang salah satunya berupa Pajak Daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Pajak Daerah merupakan suatu sistem perpajakan Indonesia, yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil. Pembinaan ini dilakukan secara terus-menerus, terutama mengenai objek dari tarif pajak, sehingga antara pajak pusat dan Pajak Daerah saling melengkapi meskipun beberapa jenis Pajak Daerah dan Restibusi Daerah sudah diterapkan dalam Undang-Undang.

Diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai tanggal 1 Januari 2001, daerah dipacu untuk dapat berkreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Dari berbagai alternatif sumber penerimaan yang mungkin dipungut oleh daerah, undang-undang tentang Pemerintah Daerah menetapkan Pajak Daerah dan Restibusi Daerah menjadi salah satu sumber penerimaan yang berasal dalam daerah dan dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi masing-masing daerah.

Usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan daerah, mengalami berbagai kendala, baik dari segi keterbatasan sumber dana maupun dari segi kemampuan dan sistem pengelolaan serta administrasinya. Dalam rangka peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat, pemerintah daerah harus mengetahui sumbangan pajak daerah termasuk didalamnya Pajak Restoran.

Secara umum restoran merupakan suatu bentuk usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian padanya yang khusus disediakan, dimana setiap orang dapat makan dan minum serta memperoleh pelayanan dan fasilitas- fasilitas lainnya dengan pembayar.

Data Jumlah Restoran yang tercatat di Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2019-2021 dapat dilihat pada tabel 1. berikut ini :

Tabel 1. Jumlah Restoran yang memiliki omzet tahunan di atas Rp 200.000.000,- dan sudah memiliki NPWPD Tahun 2019-2021 Kabupaten Minahasa Selatan

Kecamatan	Jumlah Restoran		
	2019	2020	2021
Modoinding	0	1	5
Tompaso Baru	1	4	4
Maesaan	0	0	0
Ranoyapo	1	0	0
Motoling	0	2	2
Kumelembuai	0	0	0
Motoling Barat	0	0	0
Motoling Timur	0	0	0
Sinonsayang	0	5	5
Tenga	1	13	13
Amurang	18	35	39
Amurang Barat	9	20	19
Amurang Timur	19	26	30
Tareran	1	0	0
Sulta	0	0	0
Tumpaan	19	18	17
Tatapaan	0	0	0
Minahasa Selatan	69	124	134

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa Selatan, 2023

Dari Tabel 1. dapat dilihat bahwa jumlah restoran yang memiliki omzet tahunan di atas Rp 200.000.000,- dan sudah memiliki NPWPD yang tercatat di Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa Selatan berfluktuasi dari tahun 2019 – 2021, kecamatan Amurang dan Amurang Timur mengalami kenaikan jumlah restoran meskipun terdampak covid 19 di tahun 2020 dan 2021

sedangkan di kecamatan Tumpaan dan Ranoyapo mengalami penurunan serta di Kecamatan lainnya rata-rata berfluktuasi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan tahun 2017 – 2021 sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2. Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran
Tahun 2017-2022 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan

Tahun Anggaran	Anggaran	Realisasi
2017	1.318.034.259	1.545.702.942
2018	1.400.000.000	1.624.690.443
2019	1.859.459.839	1.753.565.985
2020	752.307.914	596.992.434
2021	500.000.000	777.024.845
2022	844.789.296	1.174.120.713

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kab. Minahasa Selatan

Dari Tabel 2. diatas terlihat bahwa penerimaan pajak restoran setiap dari tahun 2017 sampai 2019 mengalami peningkatan tetapi berbeda dengan realisasi penerimaan pajak restoran ditahun 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan diakibatkan pandemi Covid 19 dan pada tahun 2021 sampai tahun 2022 setelah pandemi dinyatakan berakhir maka penerimaan pajak restoran kembali meningkat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, hal ini tidak sesuai dengan teori yang ada, untuk masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Penerimaan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan”**

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

- 1. Bagaimana Efektifitas Penerimaan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan periode 2017-2022?
- 2. Bagaimana Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran terhadap Penerimaan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan periode 2017-2022?
- 3. Untuk menganalisis dan mengetahui Penerimaan Pajak Restoran pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Sebelum dan Selama Pandemi Covid 19?

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut :

- 1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi mengenai Penerimaan Pajak Restoran Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan periode 2017-2022.
- 2. Manfaat Praktis
 - a. Bahan masukan kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dalam perencanaan peningkatan pajak daerah khususnya pajak restoran dan agar dapat diketahui efektivitas kebijakan yang telah ditetapkan.
 - b. Bahan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan di masa yang akan datang.

Tinjauan Pustaka
Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya

untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji.

Penelitian berjudul “Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir Dan Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan” yang ditulis oleh (Meiani, Supartini, & Maryanti, 2022) menjelaskan bahwa Kontribusi penerimaan kelima jenis pajak cenderung tidak stabil. Kontribusi terbesar di Kota Balikpapan dalam PAD hanya pajak hotel, kemudian pajak restoran dan pajak hiburan menempati posisi teratas dalam penyumbangan penerimaan PAD, sedangkan pajak parkir dan pajak reklame masih jauh dari yang diharapkan. Dari hasil penelitian menjelaskan bahwa jenis pajak daerah hanya pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan yang memberikan sumbangsih yang cukup besar terhadap penerimaan pendapatan pajak daerah kota Balikpapan. Kendati pajak daerah cukup beragam, ternyata hanya sedikit yang bisa diandalkan sebagai sumber penerimaan PAD, pajak parkir dan pajak reklame belum memenuhi kontribusi dalam penerimaan PAD. Efektivitas penerimaan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir dan pajak reklame Kota Balikpapan cenderung mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Efektivitas dari tahun ke tahun pencapaian target sudah terealisasi dengan sangat baik. Efektivitas penerimaan jenis pajak dihitung dengan membagi realisasi dengan target. Selama tahun 2016 sampai dengan 2020 besarnya efektivitas pajak daerah masih naik turun, tapi sebagian besar sudah masuk dalam kategori yang sangat efektif.

Penelitian selanjutnya berjudul “Analisis Pengaruh Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Hotel, Restoran Dan Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka” yang ditulis oleh (Samosir, 2020), dimana penelitian ini membahas mengenai pengaruh kontribusi dan efektivitas Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2013-2017. Hasil analisis kontribusi menunjukkan bahwa pajak hotel dan restoran dikategorikan kurang mempunyai kontribusi, sedangkan pajak hiburan dikategorikan relatif tidak mempunyai kontribusi. Hasil analisis Efektivitas menunjukkan bahwa pajak hotel dan restoran Tahun Anggaran 2013-2017 mampu menggambarkan kemampuan Pemda Kabupaten Sikka dalam merealisasikan pajak hotel dan restoran yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Selanjutnya pajak hiburan menunjukkan kondisi yang sebaliknya dimana Pemda Kabupaten Sikka belum mampu dalam merealisasikan pajak hiburan yang direncanakan dibandingkan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah.

Penelitian yang berjudul “Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Selama Pemulihan Covid-19” yang ditulis oleh (Meiani et al., 2022), dalam penelitian ini menjelaskan Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan selama tahun 2019 - 2021, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut 1) Tingkat Efektivitas Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan dari tahun 2019 - 2021 Tidak Efektif. Tingkat Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan dari tahun 2019 - 2021 berada dalam kriteria “Sangat Kurang”.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian yang berjudul “Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Pajak Daerah Di Kota Manado”, penelitian tersebut ditulis oleh (Mewo et al., 2021). Pada penelitian tersebut menjelaskan menganalisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Restoran dan Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah di Kota Manado. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas Pajak Restoran dan Pajak Hiburan pada tahun 2014-2018 berada di kriteria “sangat efektif” sedangkan kontribusi Pajak Restoran terhadap Pajak Daerah pada tahun 2014-2018 berada pada kriteria “sedang” dan kontribusi Pajak Hiburan pada tahun 2014-2018 berada pada kriteria “sangat kurang”.

Penelitian dari Clay G. Collins and E. Frank Stephenson (2018) Tujuan dari penelitian ini adalah This paper uses state level monthly hotel occupancy and price data to examine the effects

of a \$5 per night hotel tax imposed by Georgia in 2015. Pada penelitian ini variabel yang digunakan adalah where DEP represents the three dependent variables (number of rooms, occupancy rate, or average daily room rate) used in the different estimations. Sampel yang digunakan adalah in Georgia in 2015. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uses monthly data from 2014- 2015 on hotel rooms rented in each state, hotel occupancy rates in each state, and average daily hotel room rates (prices) in each state. Uses Descriptive Statistics and Regression Results. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Clay G. Collins and E. Frank Stephenson (2018) adalah The results indicate that the tax caused both a decrease in hotel occupancy and a decrease in the net of tax price received by hotels in Georgia, though the latter effect is imprecisely estimated.

Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Objek yang diteliti adalah sama-sama tingkat efektivitas dan kontribusi pajak daerah.
2. Jenis dan metode pendekatan penelitian yang digunakan sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Sedangkan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. objek dalam penelitian dalam penelitian ini yaitu pajak restoran di Kabupaten Minahasa Selatan.
2. Tahun yang diteliti di penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian ini, sedangkan pada penelitian ini meneliti tahun 2017-2022.
3. Fokus dalam penelitian sebelumnya adalah kebanyakan untuk mengukur tingkat efektivitas pajak hiburan, pajak restoran dan pajak hotel sedangkan pada penelitian ini fokus penelitiannya adalah mengukur tingkat efektivitas dan kontribusi dari pajak restoran Kabupaten Minahasa Selatan Pada Tahun 2017-2022.

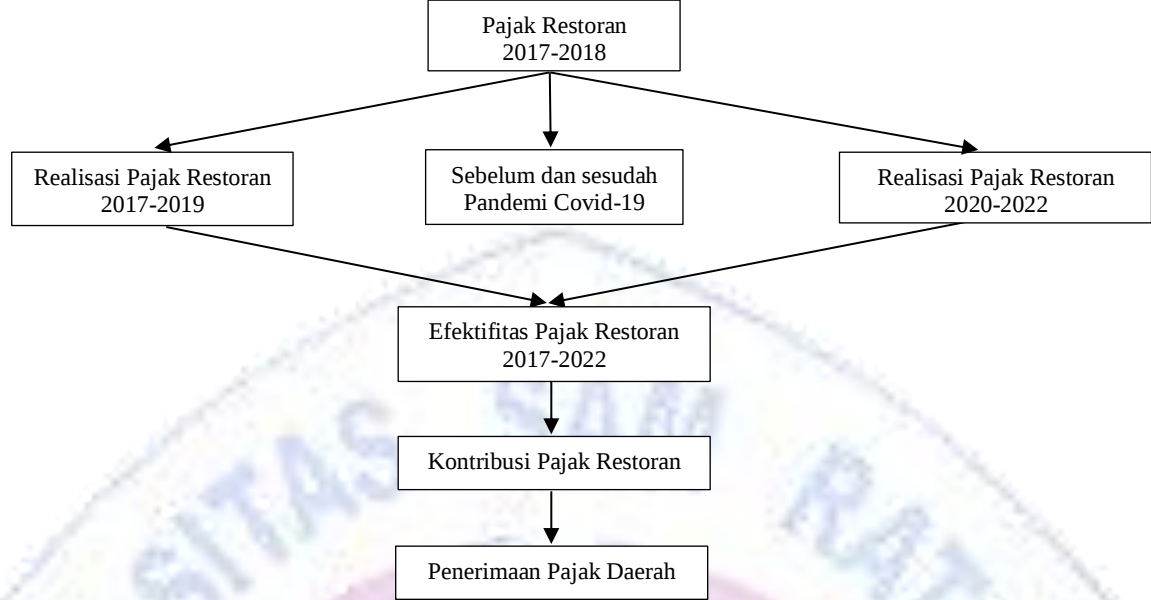
Kerangka Pemikiran Teoritis

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan pembangunan dan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai wujud desentralisasi. Komponen pendapatan asli daerah yang mempunyai peranan penting terhadap kontribusi penerimaan adalah pajak daerah. Salah satu pajak daerah yang memiliki objek pajak yaitu pajak restoran.

Pajak restoran sebagai salah satu sumber pendapatan daerah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Pemerintah Daerah diharapkan meningkatkan realisasi pajak restoran agar dapat meningkatkan kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah. Melihat dari fenomena tersebut dapat diketahui pentingnya pajak restoran, terutama dalam menyokong pembangunan daerah itu sendiri dan merupakan pemasukan dana yang sangat potensial karena besarnya penerimaan pajak akan meningkat seiring laju pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik.

Berdasarkan pemikiran tersebut maka digambarkan kerangka berfikir seperti di bawah ini.

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Teoritis



Sumber: Data Olahan 2023

2. METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

Jenis data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah berupa data kuantitatif dan kualitatif.

- a. Data kuantitatif yaitu yang berbentuk angka-angka yang dapat diukur atau dihitung seperti : Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Restoran.
- b. Data kualitatif yaitu data dalam bentuk kata, kalimat, skema dan gambar, seperti : gambaran umum Kabupaten Minahasa Selatan, dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan.

Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder tahun 2017-2022, data ini diperoleh melalui studi dokumen-dokumen resmi serta Badan Pusat Statistik.

Metode Pengumpulan Data

Data-data dalam penulisan skripsi ini dikumpulkan dengan menggunakan metode :

- a. Wawancara
Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mewawancarai staf bagian perencanaan dan keuangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan yang terkait dengan realisasi pajak restoran Kabupaten Minahasa Selatan periode 2017-2022.
- b. Dokumentasi
Studi kepustakaan yaitu metode pengumpulan data dengan mengambil pedoman dari berbagai buku referensi dan peraturan pemerintah yang berhubungan dengan realisasi pajak daerah.

Definisi Operasional

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai definisi operasional dalam penelitian ini yaitu Efektifitas dan Kontribusi Pajak Restoran. Masing-masing definisi tersebut adalah sebagai berikut :

Efektivitas sebagai hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar sumbangan output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi program atau kegiatan

Efektivitas berfokus pada outcome (hasil), program atau kegiatan yang dinilai efektif apabila outout yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.

Kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak restoran memberikan sumbangan dalam penerimaan pajak daerah Dalam mengetahui kontribusi dilakukan dengan membandingkan penerimaan pajak restoran periode tertentu dengan penerimaan pajak daerah periode tertentu pula.

Pajak Restoran merupakan pajak yang diberikan atas pelayanan yang disediakan oleh rumah makan atau restoran. Restoran merupakan fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dikenakan bayaran yang meliputi rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya. Restoran merupakan suatu tempat atau bangunan yang dikelola secara komersil yang menyediakan pelayanan kepada konsumen berupa makanan dan minuman.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang berusaha menyimpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data yang ada telah diolah dari instansi terkait di lingkungan pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, selanjutnya untuk menganalisis permasalahan yang ada dalam penelitian ini digunakan pendekatan : Analisis Efektivitas dan Kontribusi.

Analisis Efektifitas digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam pencapaian sasaran/target yang telah ditetapkan dengan menggunakan persentase perbandingan antara realisasi penerimaan dengan target penerimaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Bila diformulasikan dalam rumus sebagai berikut :

$$Efektifitas = \frac{Penerimaan\ Pajak\ Restoran}{Target\ Pajak\ Restoran} \times 100\%$$

Efektifitas pemungutan suatu komponen penerimaan PAD dikatakan efektif jika persentase yang diperoleh dari rumus di atas semakin besar, demikian sebaliknya dikatakan tidak efektif bilamana persentase yang diperoleh semakin kecil. Ada kriteria Efektivitas penerimaan daerah, yakni sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) No. 690.900.327. Tahun 1996, tentang Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan, yaitu :

Tabel 3. Kriteria Efektifitas

No.	%	Kriteria
1.	<60	Tidak efektif
2.	60 - <80	Kurang efektif
3.	80 - <90	Cukup efektif
4.	90 - <100	Efektif
5.	> 100	Sangat efektif

Sumber Data: Kepmendagri No 690.900.327. Tahun 1996

Untuk mengetahui besarnya kontribusi Pajak Restoran terhadap total Pajak Daerah maka digunakan formulasi sebagai berikut:

$$KKSP = \frac{KSP}{TSP} \times 100\%$$

- Ket: KKSP
- KSP
- TSP
- adalah Kontribusi komponen sumber penerimaan
- adalah besaran komponen sumber penerimaan
- adalah besaran total sumber penerimaan

Tabel 4. Kriteria Kontribusi

No	%	Kriteria
1	0 - 10	Sangat Kurang
2	10 - 20	Kurang
3	20 - 30	Sedang
4	30 - 40	Cukup Baik
5	40 - 50	Baik
6	>50	Sangat Baik

Sumber Data: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327

Uji Paired Sample T Test

Uji Paired Sample T Test digunakan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan dalam dua sampel yang bebas (Sujarweni, 2016). Dua sampel yang dimaksud dalam penelitian ini adalah adalah tiga tahun sebelum pandemi Covid-19 (tahun 2017-2019) dan tiga tahun selama pandemi Covid-19 (tahun 2020-2022). Pada uji paired sample t menentukan tingkat signifikansi sebesar 5% dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Hal ini menunjukkan jika nilai signifikan kurang dari 5% atau 0,05 maka pengujian tersebut memiliki perbandingan.

Proses Analisis Data

Proses analisis data pada penelitian ini Yaitu:

- a) Mengumpulkan data laporan realisasi pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan periode 2017-2022.
- b) Menghitung tingkat efektifitas dan kontribusi penerimaan pajak restoran Kabupaten Minahasa Selatan periode 2017-2022.
- c) Menganalisis dan membahas efektifitas dan kontribusi penerimaan pajak restoran Kabupaten Minahasa Selatan periode 2017-2022.
- d) Membuat kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pemerintah daerah melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan kewenangan antara lain untuk menetapkan pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, diskresi untuk menetapkan tarif yang sesuai dengan kemampuannya dan sumber lain yang sah.

Di dalam UU No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan bahwa Pajak Daerah adalah iuran wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak Daerah menurut lembaga pemungutnya terbagi 2 yaitu pajak provinsi seperti pajak rokok, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak kabupaten/kota dibagi menjadi beberapa jenis, yakni Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

• **Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Minahasa Selatan**

Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Minahasa Selatan tahun anggaran 2017 – 2022 berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai di Badan Pendapatan Daerah dapat dilihat pada tabel 5 sebagai berikut :

Tabel 5. Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Minahasa Selatan
Tahun Anggaran 2017-2022

Tahun Anggaran	Target	Penerimaan
2017	Rp. 11.555.583.553,-	Rp. 12.281.231.406,-
2018	Rp. 13.236.918.150,-	Rp. 14.407.947.062,-
2019	Rp. 17.385,618,729,-	Rp. 17,345,100,236,-
2020	Rp. 11,045,488,971,-	Rp. 11,652,714,930,-
2021	Rp. 15,418,000,000,-	Rp. 13,370,501,516,-
2022	Rp. 17,779,443,349,-	Rp. 16,735,696,802,-

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan 2023

Tabel 5. di atas menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun 2018 dan 2020 berfluktuasi dengan pencapaian melebihi target sedangkan tahun 2019, 2021 dan 2022 penerimaan pajak daerah mengalami penurunan bahkan tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Tahun 2017 penerimaan pajak daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan sebesar Rp 12.281.231.406,-, naik menjadi Rp 14.407.947.062,- ditahun 2018. Kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2019 menjadi Rp 17,345,100,236,- meskipun tidak mencapai target. Tahun 2020 terjadi penurunan penerimaan pajak daerah menjadi Rp 11,652,714,930,- meskipun melebihi target. Tahun 2021 dan 2022 mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya masing-masing sebesar Rp. 13,370,501,516,- dan Rp. 16,735,696,802,- ,

Penerimaan pajak daerah berdasarkan jenis pajak daerah Kabupaten Minahasa Selatan periode 2017-2022 dapat dilihat pada Tabel 6. :

Tabel 6. Penerimaan Pajak Daerah Berdasarkan Jenis Pajak Daerah Kabupaten Minahasa
Selatan periode 2017-2022

Jenis Pajak	Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Hotel	319,429,782	241,420,535	325,000,000	493,794,118	343,085,763	419,290,679
Restoran	1,318,034,259	1,545,702,942	1,400,000,000	1,624,690,443	1,859,459,839	1,753,565,985
Hiburan	58,875,000	69,500,000	90,000,000	97,700,000	97,700,000	55,350,000
Reklame	170,197,251	241,988,000	205,000,000	280,020,250	285,660,250	338,294,750
Penerangan Jalan	4,831,945,337	5,974,640,012	6,300,000,000	6,696,729,521	6,696,729,521	6,237,320,039
MBLB	1,487,317,480	1,176,620,793	1,514,138,273	1,684,833,216	1,925,556,216	2,601,813,250
Air Bawah Tanah	138,976,000	151,500,000	150,000,000	198,315,000	248,315,000	331,735,720
Sarang Burung Walet	750,000	2,500,000	2,500,000	5,750,000	8,500,000	9,000,000
Parkir		-	-	-	-	-
PBB-P2	520,000,000	674,609,264	450,279,877	714,168,193	2,559,168,193	2,748,977,931
BPHTB	2,710,058,444	2,202,749,860	2,800,000,000	2,611,946,321	3,361,443,947	2,849,751,882

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan 2022

Jenis Pajak	Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Hotel	98,758,823.60	387,252,044	619,560,488	744,541,933	925,000,000.	984,133,721
Restoran	752,307,914.70	596,992,434	500,000,000	777,024,845	844,789,296.	1,174,120,713
Hiburan	35,000,000.00	28,600,000	132,000,000	35,150,000	80,047,243.	85,630,697
Reklame	112,008,100.00	279,106,250	364,700,000	518,219,600	529,149,146.	626,826,498
Peneranga n Jalan	5,826,154,683.27	5,381,122,630	5,357,930,711	5,633,622,294	7,312,474,415.	7,343,977,446
MBLB	990,000,000.00	889,922,000	1,168,808,801	1,009,567,870	1,045,000,000.	762,294,010
Air Bawah Tanah	225,000,000.00	420,531,660	560,000,000	614,259,880	932,500,000.	945,686,998
Sarang Burung Walet	6,259,450.00	6,750,000	15,000,000	10,550,000	90,000,000.	13,144,000
Parkir	-	-	-	-	60,000,000.	79,034,000
PBB-P2	1,000,000,000.00	1,003,915,860	4,000,000,000	873,541,613	2,260,455,399.	1,196,451,886
BPHTB	2,000,000,000.00	2,658,522,052	2,700,000,000	3,154,023,481	3,700,027,850.	3,524,396,833

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan 2022

- **Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Minahasa Selatan**
Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Minahasa Selatan tahun anggaran 2017 – 2022 berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pegawai di Badan Pendapatan Daerah dapat dilihat pada tabel 7 sebagai berikut :

Tabel 7. Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Minahasa Selatan
Tahun Anggaran 2017-2022

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Penerimaan (Rp)
2017	1,318,034,259	1,545,702,942
2018	1,400,000,000	1,624,690,443
2019	1,859,459,839	1,753,565,985
2020	752,307,914	596,992,434
2021	500,000,000	777,024,845
2022	844,789,296	1,174,120,713

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan 2023

Tabel 7. di atas menunjukkan bahwa penerimaan pajak restoran tahun anggaran 2017, 2018, 2021 dan 2022 berfluktuasi dengan pencapaian melebihi target sedangkan tahun 2019 dan 2020 penerimaan pajak restoran mengalami penurunan bahkan tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Tahun 2017 penerimaan pajak restoran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan sebesar Rp. 1,545,702,942,-, naik menjadi Rp. 1,624,690,443,- ditahun 2018. Kemudian mengalami kenaikan kembali pada tahun 2019 menjadi Rp. 1,753,565,985,- meskipun tidak mencapai target. Tahun 2020 terjadi penurunan penerimaan pajak restoran menjadi Rp. 596,992,434,- dan Tahun 2021 dan 2022 mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya masing-masing sebesar Rp. 777,024,845,- dan Rp. 1,174,120,713,- ,

Pembahasan

Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2017 – 2022

Efektivitas berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan dan merupakan hubungan antara tujuan dengan sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Efektivitas berfokus pada outcome atau hasil. Suatu organisasi, program atau kegiatan dikatakan efektif apabila output yang dilaksanakan bisa memenuhi target yang diharapkan.

Analisis Efektivitas ini digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dalam pencapaian sasaran/target yang telah ditetapkan dengan menggunakan persentase perbandingan antara realisasi penerimaan dengan target penerimaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Bila diformulasikan dalam rumus sebagai berikut;

$$Efektifitas = \frac{Penerimaan\ Pajak\ Restoran}{Target\ Pajak\ Restoran} \times 100\%$$

Efektivitas penerimaan pajak restoran dikatakan efektif bilamana persentase yang diperoleh dari rumus di atas semakin besar, demikian sebaliknya dikatakan tidak efektif bilamana persentase yang diperoleh semakin kecil.

Rasio Efektifitas Penerimaan Pajak Restoran menggambarkan perbandingan antara besarnya pajak restoran yang diterima dengan anggaran pajak restoran yang ditetapkan. Hasil dari perhitungan Rasio Efektifitas Penerimaan Pajak Restoran dapat dilihat pada tabel 8 di bawah ini :

Tabel 8. Rasio Efektifitas Penerimaan Pajak Restoran Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2017 – 2022

Tahun Anggaran	Target (Rp)	Penerimaan (Rp)	Rasio (%)	Kriteria Efektif
2017	1.318.034.259,-	1.545.702.942,-	117.27	Sangat Efektif
2018	1.400.000.000,-	1.624.690.443,-	116.05	Sangat Efektif
2019	1.859.459.839,-	1.753.565.985,-	94.31	Efektif
2020	752.307.914,-	596.992.434,-	79.35	Kurang Efektif
2021	500.000.000,-	777.024.845,-	155.40	Sangat Efektif
2022	844.789.296,-	1.174.120.713,-	138.98	Sangat Efektif

Sumber : Data Olahan 2023

Berdasarkan perhitungan rasio Efektifitas Penerimaan Pajak Restoran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan pada tabel 8. diketahui bahwa Efektifitas Pajak Restoran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2017, 2018, 2021 dan 2022 sangat efektif sedangkan pada Tahun Anggaran 2019 efektif dan Tahun 2020 kurang efektif.

Efektifitas Penerimaan Pajak Restoran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2017, 2018, 2021 dan 2022 tergolong sangat efektif karena rata-rata rasionya melebihi 100% sedangkan pada tahun anggaran 2019 rasio efektifitas tergolong efektif dengan rasio 94.31% dan tahun anggaran 2020 rasio efektif tergolong kurang dengan rasio 79.35% hal ini disebabkan dampak dari pandemi covid 19.

Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Restoran terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2017 – 2022

Perhitungan rasio penerimaan pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah dimaksudkan untuk mengetahui kontribusi pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah

Tabel 9. Penghitungan Kontribusi Pajak Restoran terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2017-2022

Tahun Anggaran	Penerimaan Pajak Restoran (Rp)	Penerimaan Pajak Daerah (Rp)	Rasio (%)	Kriteria Kontribusi
2017	1.545.702.942,-	12.281.231.406,-	12.58	Kurang
2018	1.624.690.443,-	14.407.947.062,-	11.28	Kurang
2019	1.753.565.985,-	17,345,100,236,-	10.11	Kurang
2020	596.992.434,-	11,652,714,930,-	5.12	Sangat Kurang
2021	777.024.845,-	13,370,501,516,-	5.81	Sangat Kurang
2022	1.174.120.713,-	16,735,696,802,-	7.01	Sangat Kurang

Sumber : Data Olahan 2023

Tabel 9. menunjukkan kurangnya kontribusi pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah dari tahun 2017 sebesar 12.58%, tahun 2018 sebesar 11.28% dan tahun 2019 sebesar 10.11%. Pada tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun 2022 terjadi penurunan kontribusi menjadi sangat kurang masing-masing dengan rasio kontribusi sebesar 5.12%, 5.81% dan 7.01%.

Analisis Perbedaan Penerimaan Pajak Restoran sebelum dan selama Pandemi Covid 19 Kabupaten Minahasa Selatan

Hasil yang di dapat dengan menggunakan dengan alat bantu sistem Statistical Product and Service Solution (SPSS), dapat di lihat dalam tabel berikut :

Tabel 10. Hasil Uji paired sample T Test Perbedaan Penerimaan Pajak Restoran sebelum dan selama Pandemi Covid 19 Kabupaten Minahasa Selatan

		95% Confidence Interval of the Difference		t	df.	Sig.
		Lower	Upper			
P.RST_ Sebelum	-	2136488721.72	12136582695.18	3.624	89	.001
P.RST_ Sesudah						

Sumber : Data diolah dengan SPSS

Pengujian paired sample T Test berdasarkan tabel 4.6 diatas memperlihatkan nilai dari sig. dengan besaran nilai 0.001 lebih kecil dibandingkan 0.05, maka dapat dikatakan adanya perbedaan dalam penerimaan Pajak Restoran sebelum dan selama Pandemi Covid 19 di Kabupaten Minahasa Selatan. Hal ini dapat disebabkan karena kebijakan pemerintah yang membatasi aktivitas masyarakat pada tahun 2020-2022 sehingga banyak masyarakat yang tidak melakukan perjalanan keluar dan menyebabkan masyarakat untuk tidak membeli makanan pada restoran yang menyebabkan pendapatan restoran mengalami penurunan sehingga berpengaruh pada pembayaran pajak yang dilakukan pihak restoran. Oleh karena itu solusi yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dalam memaksimalkan penerimaan pajak restoran yaitu :

- a. sertifikasi new normal bagi usaha kecil, destinasi wisata, restoran, hingga hotel. Sertifikasi ini menandakan warung tersebut sudah menjalankan protokol kesehatan Covid-19, destinasi wisata diminta untuk mengubah orientasinya dari semula menjual layanan dan harga, menjadi jualan kesehatan. Jika tidak sesuai SOP maka ijin dicabut.

- b. Pemberian keringanan pajak daerah, peniadaan sanksi atas keterlambatan pelaporan, hingga memberikan kesempatan kepada WP untuk mencicil tagihan pajaknya.
- c. Mengupayakan tindakan persuasif untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak. termasuk mengunjungi restoran baru sebagai support nyata Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan agar sektor bisnis kembali bergeliat dan meningkatkan PAD Kabupaten Minahasa.
- d. Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan juga fokus dalam intensifikasi pelayanan pemungutan di sektor pajak misalnya antara lain mengurai tunggakan Pajak Restoran bahwa dalam menjalankan giat ini mengedepankan pendekatan secara persuasif kepada masyarakat, khususnya Wajib Pajak (WP). Semua dilakukan sesuai prosedur dan standar protokol kesehatan di masa ini.

Pajak daerah termasuk pajak restoran mempunyai peranan yang sangat penting dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di suatu daerah. Kemampuan pemerintah daerah dalam memungut pajak daerah merupakan salah satu tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Selatan perlu untuk dapat meningkatkan secara maksimal potensi yang ada khususnya potensi yang akan dikenakan pajak daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerimaan pajak daerah tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun 2018 dan 2020 berfluktuasi dengan pencapaian melebihi target sedangkan tahun 2019, 2021 dan 2022 penerimaan pajak daerah mengalami penurunan bahkan tidak mencapai target yang telah ditetapkan.
2. Efektifitas Penerimaan Pajak Restoran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan Tahun Anggaran 2017, 2018, 2021 dan 2022 sangat efektif sedangkan pada Tahun Anggaran 2019 efektif dan Tahun 2020 kurang efektif.
3. Kontribusi pajak restoran terhadap penerimaan pajak daerah dari tahun 2017 berada pada kriteria kurang. Pada tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun 2022 terjadi penurunan kontribusi menjadi sangat kurang.
4. Pengujian paired sample T Test memperlihatkan nilai dari sig, maka dapat dikatakan adanya perbedaan dalam penerimaan Pajak Restoran sebelum dan selama Pandemi Covid 19 di Kabupaten Minahasa Selatan.

Saran

Setelah dilakukannya kegiatan penelitian ini dan hasil dari kesimpulan diatas, penulis menyarankan Kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Minahasa Selatan dan peneliti selanjutnya yaitu :

1. Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan diharapkan dan dituntut untuk mampu mengelola serta memaksimalkan potensi pajak daerah demi kelangsungan sesuai peraturan yang berlaku dan kemajuan daerah. Potensi tersebut bisa didapatkan salah satunya dari sumber penerimaan yang berasal dari pajak restoran.
2. Bagi peneliti berikutnya, disarankan agar dapat menambahkan jumlah variabel dan data penelitian serta dampak lebih lanjut akibat kebijakan karena adanya pandemi Covid-19 supaya hasil yang diteliti bisa lebih lengkap dan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukriy, Abdul Halim, 2006, *Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan*, Jurnal Akuntansi Pemerintah, Volume 2 No. 2, November.
- Ahmad Yani (2009), *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Edisi Revisi Keempat Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahyari, Agus, (2008). *Anggaran Perusahaan 1: Pendekatan Kuantitatif*, Edisi Pertama, Cetakan Keempat, BPFE, Yogyakarta.
- Alexander, dkk. 2016. *Analisis Efektifitas dan Kontribusi Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda*.
- Badan Pusat Statistik (BPS) Minahasa Selatan.
- Clay G. Collins and E. Frank Stephenson 2018
- Diana, Sari. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Gujarati, Damodar. 2003. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Erlangga
- H Pramono, YE Restianto, IR Bawono, (2010), *Pengelolaan keuangan daerah* Penerbit Salemba Empat, Jakarta
- Hadi Soesastro ... [et al.], (2005), *Pemikiran dan permasalahan ekonomi di Indonesia dalam setengah abad terakhir*, Edisi 3 Yogyakarta : Kanisius
- Halim & Khoiru. 2019. *Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli daerah Kota Batu (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu)*.
- Handoko, T. Hani. 2012. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta. BPFE
- Harun, (2008). *Reformasi Akuntansi dan Manajemen Sektor Publik di Indonesia*. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Ikhsan Abdullah & Riza Afrida Sari, (2016), *Analisis Fungsi Anggaran Sebagai Alat Pengawasan Penerimaan PBB Pada Kecamatan Medan Denai*, Kumpulan Jurnal dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Mankiw, Gregory N. 2003. *Teori Makro Ekonomi Terjemahan*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi 2013*. Yogyakarta : Andi
- Meiani et al., 2022. *Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Selama Pemulihan Covid-19*.
- Meiani, Supartini & Maryanti. 2022. *Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Parkir Dan Pajak Reklame Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli daerah Kota Balikpapan*.
- Mewo et al., 2021. *Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Restoran Dan Pajak Hiburan Terhadap Pajak Daerah Di Kota Manado*.
- Mulyadi, (2010). *Sistem Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat
- _____, (2015), *Implementasi Organisasi*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Munandar, (2001), *Budgeting*, Yogyakarta: BPFE
- Muindro Renyowijoyo. (2008). *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Nafarin, M, (2007). *Penganggaran Perusahaan*. Penerbit: Salemba Empat. Jakarta
- Peraturan pemerintah No 58 Tahun 2005 Tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Rostow dan Musgrave, 1996. *Pembangunan Ekonomi*. Ekonomi Perencanaan Pembangunan. PT. Raja Grafindo Pustaka, Jakarta.
- Soemitro, Rochmat, 2010, *Dasar Perpajakan 1*, Refika, Bandung.
- Suparmoko, M. 2002. *Ekonomi Publik, Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Andi. Yogyakarta
- Todaro, M.P. dan Smith, S.C. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Jilid I Edisi Kesembilan. Haris Munandar (penerjemah). Erlangga, Jakarta
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004. *Tentang Pemerintah Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004. Tentang perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara tahun 2007 Nomor 85.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009. Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan tata cara perpajakan.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 15 September 2009. Lembaran Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130.
- Samosir 2020. Analisis Dan pengaruh Kontribusi Dan Efektivitas Pajak Hotel, Restoran Dan Hiburan Terhadap Pendapatan Asli daerah Kabupaten Sikka.
- Waluyo. (2011). Perpajakan Indonesia. Buku 1. Edisi 10. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Woryandari, Anita Wijayanti, Yuli Chomsatu,(2015) Analisis Efektivitas Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo.



ANALISIS PERBANDINGAN DAYA SAING SEKTORAL DI PROVINSI SULAWESI UTARA DAN PROVINSI GORONTALO PERIODE TAHUN 2018-2022

Sifra J. Sendow¹, Een N. Walewangko², Daisy S. M. Engka³

Program Studi Magister Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi, Manado

E-mail: sifrasendow@gmail.com, een_sario@yahoo.com, daisyengka@unsrat.ac.id

ABSTRAK

Perbedaan daya saing dari setiap daerah mengakibatkan adanya perbedaan dalam merencanakan dan menyusun kebijakan perekonomian. Setiap daerah juga harus menentukan lapangan usaha yang sesuai dengan kemampuan daerahnya, yaitu lapangan usaha yang mempunyai keunggulan dan juga lapangan usaha yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis lapangan usaha apa saja yang termasuk dalam lapangan usaha basis dan non basis, perbandingan daya saing sektoral seperti apa yang ada di Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo serta lapangan usaha mana yang memiliki potensi untuk dikembangkan. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan bersifat kuantitatif dengan analisis *Static Location Quotient*, *Dynamic Location Quotient*, *Shift Share*, dan Tipologi Klassen. Dokumen yang diperlukan adalah data PDB atas dasar harga konstan Indonesia, PDRB berdasarkan harga konstan Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo tahun 2018-2022. Hasil menunjukkan bahwa terdapat 5 lapangan usaha yang sama-sama basis di Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Konstruksi, Transportasi dan Pergudangan, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; dan terdapat 2 lapangan usaha non basis di Provinsi Sulawesi Utara dan basis Provinsi Gorontalo yaitu Jasa Keuangan dan Asuransi, Jasa Pendidikan; terdapat 2 lapangan usaha yang basis di Provinsi Sulawesi Utara dan non basis Provinsi Gorontalo; serta terdapat 8 lapangan usaha yang non basis dikedua provinsi yaitu Pertambangan dan Penggalan, Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi, Jasa Perusahaan, dan Jasa Lainnya. Hasil dari *National Share* menunjukkan bahwa masing-masing lapangan usaha di Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo membawa pengaruh positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Hasil *Proportionally Shift* terdapat 8 lapangan usaha yang termasuk dalam spesialisasi di Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo. Hasil *Differential Shift* menunjukkan 7 lapangan usaha yang memiliki keunggulan Kompetitif di Provinsi Sulawesi Utara dan 9 lapangan usaha yang memiliki keunggulan kompetitif di Provinsi Gorontalo; Provinsi Sulawesi Utara terdapat lima lapangan usaha Maju dan Tumbuh Pesat, tiga lapangan usaha Potensial, enam lapangan usaha maju tapi tertekan, dan tiga lapangan usaha yang relatif tertinggal; Provinsi Gorontalo terdapat empat lapangan usaha Maju dan Tumbuh Pesat, empat lapangan usaha Potensial, enam lapangan usaha maju tapi tertekan, dan tiga lapangan usaha yang relatif tertinggal

Kata Kunci : *Location Quotient*, *Shift Share*, Tipologi Klassen.

ABSTRACT

The differences in the sectoral competitiveness of each region result in differences in planning and formulating economic policies. Each region must also determine business fields that are in accordance with the capabilities of their regions, namely business fields that have advantages and also business fields that have the potential to be developed. The purpose of this study is to analyze what business fields are included in basic and non-basic business fields, what kind of sectoral competitiveness exists in North Sulawesi Province and Gorontalo Province and which business fields have the potential to be developed. This research uses quantitative's method and secondary data with *Static Location Quotient*, *Dynamic Location Quotient*, *Shift Share*, and *Typology Klassen* analysis. The required documents are data on GDP at constant prices for Indonesia, GRDP data based on the constant price of North Sulawesi Province and Gorontalo Province in 2018-2022. The results show that there are 5 business fields that are equally based in North Sulawesi Province and Gorontalo Province, namely Agriculture, Forestry and Fisheries, Construction, Transportation and Warehousing, Government Administration, Defense and Mandatory Social Security; and there are 2 non-based business fields in North Sulawesi Province and a base in Gorontalo Province, namely Financial and Insurance Services, Education Services; there are 2 business fields which are based in North Sulawesi Province and non-based in Gorontalo Province; and there are 8 non-based business fields in these two provinces, namely Mining and Quarrying, Processing Industry, Electricity and Gas Procurement, Wholesale and Retail Trade; Car and Motorcycle Repairs, Providing Accommodation and Food and Drink, Information and Communication, Company Services, and Other Services. The results of the *National Share* show that each business field in North Sulawesi Province and Gorontalo Province has a positive influence on national economic growth. In the *Proportionally Shift* results there are 8 business fields which are included in

specialization in North Sulawesi Province and Gorontalo Province. Differential Shift results show 7 business fields that have competitive advantages in North Sulawesi Province and 9 business fields that have competitive advantages in Gorontalo Province; And in North Sulawesi Province there are five advanced and rapidly growing business fields, three potential business fields, six developed but depressed business fields, and three relatively underdeveloped business fields; In Gorontalo Province there are four advanced and rapidly growing business fields, four potential business fields, six developed but depressed business fields, and three relatively underdeveloped business fields.

Keywords: *Location Quotient, Shift Share, Typology Klassen.*

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan sebuah proses perubahan yang terjadi secara terus menerus untuk menaikkan pendapatan per kapita dan kenaikan ini berlangsung dalam jangka waktu panjang. Pembangunan ekonomi wilayah adalah bagian dari terlaksananya pembangunan ekonomi nasional yang disesuaikan berdasarkan kondisi dan kemampuan wilayah tersebut (Anggiasari, 2018).

Pertumbuhan ekonomi merupakan bagian terpenting dari adanya tujuan ekonomi makro. Hal tersebut mengacu kepada tiga bukti yaitu, adanya penambahan penduduk, kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas sehingga sebuah perekonomian harus menghasilkan lebih banyak barang dan jasa agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut, dapat menciptakan stabilitas ekonomi melalui retribusi pendapatan (Halimah, 2018).

Pembangunan ekonomi daerah sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi memprioritaskan untuk membangun dan memperkuat lapangan usaha di bidang ekonomi dengan mengembangkan, meningkatkan dan mendayagunakan sumber daya secara optimal dengan tetap memperhatikan ketentuan antara industri dan pertanian yang tangguh serta lapangan usaha pembangunan lainnya. Pada dasarnya pembangunan ekonomi mempunyai empat dimensi pokok yaitu: (1) pertumbuhan, (2) penanggulangan kemiskinan, (3) perubahan atau transformasi ekonomi, dan (4) keberlanjutan pembangunan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Transformasi struktural merupakan prasyarat dari peningkatan dan kesinambungan pertumbuhan serta penanggulangan kemiskinan, sekaligus pendukung bagi keberlanjutan pembangunan itu sendiri (Todaro, 1999).

Dari sudut pandang ilmu ekonomi, pembangunan ekonomi dapat diartikan suatu bentuk upaya dalam mencapai tingkat pertumbuhan pendapatan perkapita (*income per capita*) yang berkelanjutan agar negara dapat memperbanyak output yang lebih cepat dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk. (Todaro dan Smith, 2009). Keberhasilan pencapaian dari tingkat pertumbuhan pendapatan perkapita tersebut dapat mencerminkan dari timbulnya perbaikan dalam kesejahteraan perekonomian masyarakat. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 angka 5, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan diberlakukannya otonomi daerah ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan mengoptimalkan sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing daerah dengan harapan terciptanya kemandirian daerah. Perbedaan kondisi daerah dengan daerah lainnya mengharuskan pemerintah membuat kebijakan yang berbeda pula dalam mengelola sumber daya yang dimiliki.

Setiap daerah memiliki keunggulannya masing-masing tergantung pada letak wilayah, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki. Perbedaan struktur perekonomian dari setiap daerah mengakibatkan adanya perbedaan dalam merencanakan dan menyusun kebijakan perekonomian. Setiap daerah juga harus menentukan lapangan usaha yang sesuai dengan kemampuan daerahnya, yaitu lapangan usaha yang mempunyai keunggulan dan juga lapangan usaha yang memiliki potensi untuk dikembangkan.

Lapangan usaha unggulan umumnya dicerminkan oleh lapangan usaha basis yang dimiliki setiap kabupaten/kota dimana lapangan usaha tersebut memiliki peranan ekspor sehingga tidak ada keterbatasan permintaan dan dapat terus dikembangkan. Lapangan usaha basis dapat dijadikan andalan untuk mengembangkan wilayah, sehingga dapat dipilih lapangan usaha unggulan dari lapangan usaha basis yang ada di setiap kabupaten/kota. Lapangan usaha unggulan ini, diharapkan mampu meningkatkan perekonomian dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Ketika daerah memiliki potensi yang dikembangkan dengan maksimal, maka akan memberikan keuntungan untuk daerah tersebut. Dengan bertambahnya sektor basis dan sektor potensial, maka akan memberi pengaruh juga terhadap PDRB daerah tersebut. Keuntungan yang didapatkan oleh daerah tersebut merupakan hasil dari spesialisasi sektor basis, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas ketika kegiatan ekonomi dilaksanakan (Cahyono, 2018).

Tingkat daya saing merupakan parameter dalam pembangunan suatu wilayah berkelanjutan. Setiap pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan daerah diharapkan lebih bijak dalam memilih dan mengembangkan potensi sektor wilayah tersebut. Karena setiap usaha dari adanya pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan peluang kerja daerah/wilayah. Dikarenakan persaingan antarnegara semakin tinggi dan akan berdampak pada perekonomian Indonesia terutama daerah, maka hal ini merupakan tantangan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan daya saingnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa daya saing adalah keunggulan perekonomian yang dimiliki wilayah ketika bersaing secara internasional maupun domestik, daya saing juga sangat bergantung terhadap usaha yang kondusif, keunggulan komparatif, dan keunggulan kompetitif daerahnya masing-masing (Rozikin, 2013).

Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo pada awalnya merupakan sebuah provinsi dengan nama Provinsi Sulawesi Utara sejak tahun 1964 sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1964, dan pada tahun 2000 Provinsi Sulawesi Utara terbagi menjadi dua bagian yaitu Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo sesuai dengan Undang-undang Nomor 38 Tahun 2000, kedua provinsi ini yang pada awalnya adalah sebuah wilayah yang dipimpin oleh kepala daerah yang sama kemudian terbagi menjadi dua wilayah dengan latar belakang etnis dan fokus sumber daya yang berbeda selama 22 tahun lamanya. Penulis ingin mengetahui apakah kedua wilayah ini memiliki karakteristik yang sama atau tidak, dengan menganalisis lapangan usaha yang menjadi basis dan non basis serta struktur perekonomian dimasing-masing wilayah tersebut.

Provinsi Sulawesi Utara yang memiliki letak geografis berada di bibir Samudera Pasifik menjadikan daerah ini strategis dari segi geoekonomi. Daerah ini juga potensial menjadi jalur perdagangan Asia Timur dan pusat distribusi barang dan jasa. Provinsi Sulawesi Utara berada dibagian paling utara dari semenanjung Pulau Sulawesi dan menjadi gerbang Indonesia di bagian utara. Perekonomian Provinsi Sulawesi Utara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tabel 1—menunjukkan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sulawesi Utara atas dasar harga konstan tahun 2010 menurut lapangan usaha pada tahun 2018 sampai tahun 2022.

Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sulawesi Utara Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	Tahun					Rata-rata
	2018	2019	2020	2021	2022	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	16.367.259	17.320.482	17.705.449	17.994.184	19.186.763	17.714.827
Pertambangan dan Penggalian	4.344.225	4.694.004	4.650.508	4.876.170	4.881.650	4.689.311
Industri Pengolahan	8.362.167	8.411.598	8.764.756	9.546.947	10.232.219	9.063.537
Pengadaan Listrik dan Gas	102.620	112.051	119.828	128.173	141.212	120.777
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	104.147	108.748	113.292	113.846	115.374	111.081
Konstruksi	11.346.939	12.039.440	11.518.351	12.321.288	12.783.920	12.001.988
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.701.922	11.634.920	11.445.858	11.839.704	12.731.910	11.670.863
Transportasi dan Pergudangan	7.466.819	7.909.269	6.790.329	6.911.909	7.726.054	7.360.876
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.958.951	2.013.893	1.491.170	1.680.778	1.898.271	1.808.613
Informasi dan Komunikasi	4.046.717	4.369.734	4.836.156	4.951.192	5.197.591	4.680.278
Jasa Keuangan dan Asuransi	3.203.612	3.323.855	3.520.446	3.705.996	3.586.050	3.467.992
Real Estate	3.218.628	3.372.685	3.329.613	3.317.983	3.398.564	3.327.495
Jasa Perusahaan	73.591	78.927	74.745	76.376	79.712	76.670
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.889.031	5.889.611	5.806.035	5.973.748	6.054.216	5.922.528
Jasa Pendidikan	2.162.437	2.377.244	2.451.117	2.480.204	2.609.772	2.416.155
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.442.498	3.693.477	3.999.186	4.322.967	4.513.035	3.994.233
Jasa lainnya	1.458.158	1.659.326	1.509.536	1.549.463	1.631.383	1.561.573
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	84.249.720	89.009.265	88.126.374	91.790.927	96.767.697	89.988.797

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara (2023)

Lapangan usaha dengan nilai rata-rata PRDB terbesar di Sulawesi Utara adalah lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; lapangan usaha Konstruksi; lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan lapangan usaha Industri Pengolahan.

Kontribusi terbesar dalam Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Sulawesi Utara ada pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada tahun 2022 sebesar Rp. 19.186.763.000.000 sedangkan kontribusi Produk Domestik Regional Bruto terkecil ada pada lapangan usaha Jasa Perusahaan pada tahun 2018 sebesar Rp. 73.591.000.000.

Sementara itu, Provinsi Gorontalo juga memiliki letak geografis yang sangatlah strategis, karena diapit oleh dua perairan, yaitu Teluk Gorontalo atau yang lebih dikenal dengan nama Teluk Tomini di sebelah Selatan dan Laut Sulawesi di sebelah Utara. Dalam catatan sejarah maritim Nusantara, Laut Sulawesi menjadi penting karena merupakan jalur pelayaran dari pulau Sulawesi menuju Filipina yang juga melalui jalur wilayah perairan Kesultanan Sulu di sebelah Timur dari Negara Malaysia. Sedangkan Teluk Gorontalo atau Teluk Tomini sejak dahulu kala menjadi sumber kehidupan penduduk Kerajaan-Kerajaan yang bermukim di sekitarnya. Teluk ini pun sejak dahulu ramai oleh lalu lintas pelayaran dan perdagangan, karena menjadi tempat bertemunya Kerajaan yang berada di kawasan "Tomini-Bocht" (wilayah kawasan Teluk Tomini), Ternate, Buton, bahkan menjadi jalur masuknya perantau dari Hokkian (Tiongkok) serta dari Jazirah Arab.

Perekonomian Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tabel 2 menunjukkan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Gorontalo atas dasar harga konstan tahun 2010 menurut lapangan usaha pada tahun 2018 sampai tahun 2022.

Tabel 2. Produk Domestik Regional Bruto Provinsi Gorontalo Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	TAHUN					Rata-rata
	2018	2019	2020	2021	2022	
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10.019,05	10.652,83	10.478,78	10.665,78	10.909,94	10.545,28
Pertambangan dan Penggalian	318,15	333,86	332,18	339,34	353,96	335,50
Industri Pengolahan	1.039,70	1.159,78	1.172,89	1.235,29	1.331,65	1.187,86
Pengadaan Listrik dan Gas	20,62	22,39	25,01	25,67	27,24	24,19
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	15,84	17,99	18,21	18,10	18,49	17,73
Konstruksi	2.992,64	3.065,06	3.059,83	3.097,66	3.274,17	3.097,87
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.017,51	3.372,24	3.326,04	3.439,37	3.757,84	3.382,60
Transportasi dan Pergudangan	1.554,36	1.626,50	1.551,39	1.578,04	1.693,94	1.600,85
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	625,46	666,95	659,74	685,98	720,57	671,74
Informasi dan Komunikasi	863,00	930,48	997,07	1.029,70	1.095,92	983,23
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.108,30	1.116,53	1.266,77	1.380,46	1.302,73	1.234,96
Real Estate	516,51	558,87	563,73	543,51	566,46	549,82
Jasa Perusahaan	25,16	26,58	24,86	25,16	27,66	25,88
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.017,51	2.073,67	2.077,50	2.076,81	2.165,30	2.082,16
Jasa Pendidikan	1.155,24	1.262,79	1.328,14	1.360,67	1.415,29	1.304,43
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	992,88	1.084,81	1.105,94	1.161,38	1.176,97	1.104,40
Jasa lainnya	437,33	458,64	437,30	447,15	448,33	445,75
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	26.719,27	28.429,97	28.425,38	29.110,05	30.286,45	28.594,22

Sumber: Badan Pusat Statitik Provinsi Gorontalo 2023

Lapangan usaha dengan nilai rata-rata PRDB terbesar di Gorontalo adalah lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan lapangan usaha Konstruksi. Kontribusi terbesar dalam PDRB Provinsi Gorontalo ada pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada tahun 2022 sebesar Rp.10.909.940.000.000 sedangkan kontribusi Produk Domestik Regional Bruto terkecil ada pada lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang pada tahun 2018 sebesar Rp.15.840.000.000.

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lapangan usaha mana yang menjadi basis dan non basisi di Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo tahun 2018-2022, “menganalisis perbandingan lapangan usaha potensial sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo” serta untuk menganalisis perbandingan daya saing sektoral dan pertumbuhan ekonomi serta kontribusi terhadap PDRB di Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo pada tahun 2018-2022.

Tinjauan Pustaka

Teori Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu daerah meningkat dalam jangka panjang (Sukirno, 2000). Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternatif, perbaikan kapasitas kerja yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru. Di mana, semuanya ini mempunyai tujuan utama yaitu untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah (Arsyad, 1999).

Teori Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Menurut Boediono (1992) pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses dari kenaikan *output* per kapita dalam jangka waktu panjang. Menurut pandangan ekonom klasik mengemukakan bahwa pada dasarnya ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu (1) jumlah penduduk, (2) jumlah stok barang dan modal, (3) luas tanah dan kekayaan alam, (4) tingkat ekonomi yang digunakan. (Kuncoro, 2004).

Menurut Sadono (2000), alat untuk mengukur perekonomian suatu wilayah adalah pertumbuhan ekonomi wilayah itu sendiri. Perekonomian wilayah akan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dikarenakan adanya penambahan pada faktor produksi. Selain faktor produksi, jumlah angkatan kerja yang bekerja juga akan meningkat dari tahun ke tahun sehingga apabila dimanfaatkan dengan maksimal maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Teori Keunggulan Kompetitif

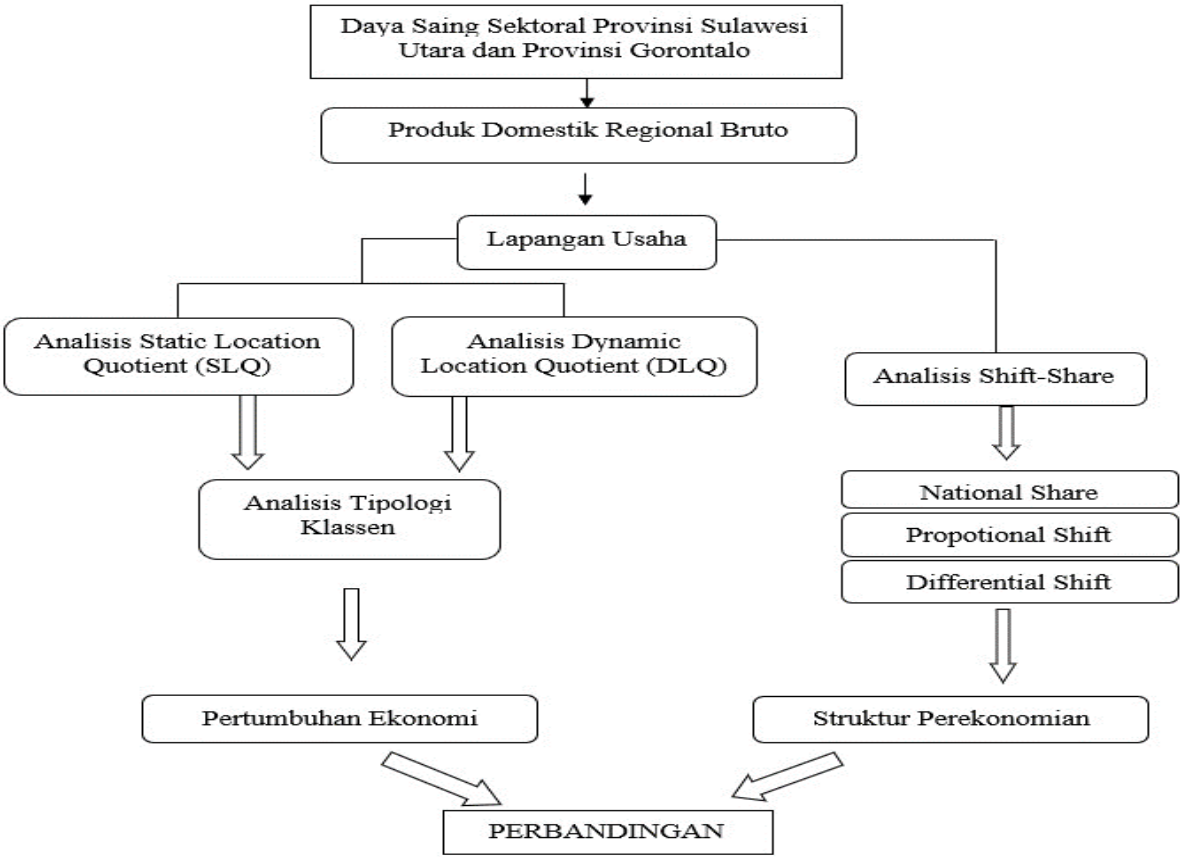
Teori keunggulan kompetitif dikemukakan oleh Michael Porter dalam bukunya *The Competitive Advantage of Nation* (1990). Menurut Porter tentang daya saing nasional berangkat dari keyakinan bahwa teori ekonomi klasik yang menjelaskan tentang keunggulan komparative tidak mencukupi, atau bahkan tidak tepat. Menurut Porter, suatu negara memperoleh keunggulan daya saing/ *Competitive Advantage* (CA) jika perusahaan (yang ada di negara tersebut) kompetitif.

Teori Perubahan Struktural

Menurut Sjafrizal (2014), analisis tentang struktur ekonomi daerah juga dapat digunakan untuk dapat mengetahui tingkat kemajuan pembangunan daerah dengan cara melihat dari kemajuan perubahan struktur ekonomi daerah yang bersangkutan. Suatu perekonomian dapat dikatakan maju apabila kontribusi lapangan usaha industri lebih besar dari pada lapangan usaha pertanian dan jasa, dan begitu pula sebaliknya.

Kerangka Berpikir Ilmiah

Gambar.1 Skema Kerangka Berpikir Ilmiah



2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian tentang Perbandingan Daya Saing Sektoral antara Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo Periode Tahun 2018-2022 adalah penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif ini menerjemahkan data menjadi angka untuk menganalisis hasil temuannya.

Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder dimana pengumpulan data ini diperoleh dari website BPS Indonesia, BPS provinsi Sulawesi Utara, dan BPS provinsi Gorontalo. Data tersebut berupa PDB ADHK Indonesia dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo Menurut Lapangan Usaha 2018-2022.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

1.

Produk Domestik Regional Bruto adalah nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh masyarakat Kabupaten Minahasa Selatan selama satu tahun yang diperoleh dari nilai tambah bruto dan berbagai lapangan usaha yang ada dan juga seluruh lapangan usaha yang ada di ukur dalam satuan rupiah pertahun.
2.

Laju pertumbuhan ekonomi daerah adalah besar kecilnya presentase peningkatan produksi barang dan jasa masyarakat menurut lapangan usaha produksi di Kabupaten Minahasa Selatan, atau kenaikan produk domesik regional bruto tanpa memandang apakah kenaikan itu lebih besar atau lebih kecil dari, diukur dengan persentase.

Metode Analisis Data

Untuk menganalisis daya saing sektoral di Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo selama tahun 2018 sampai dengan 2022. Maka digunakan analisis sebagai berikut:

Static Location Quotient (SLQ)

Menurut Kuncoro (2012), analisis *Static Location Quotient* (SLQ) merupakan analisis permulaan untuk mengetahui keunggulan suatu lapangan usaha dalam suatu daerah. Teknik analisis SLQ menggambarkan perbandingan relatif antara kemampuan suatu lapangan usaha di daerah yang dianalisis dengan kemampuan lapangan usaha yang sama pada daerah yang lebih luas. Nilai SLQ dapat diukur dengan menggunakan rumus:

$$SLQ = \frac{(Y_{ij} / Y_j)}{(Y_{iw} / Y_w)}$$

Keterangan:

- SLQ : Nilai *Static LQ*
- Y_{ij} : Nilai PDRB lapangan usaha i di daerah analisis
- Y_j : Nilai PDRB lapangan usaha di daerah analisis
- Y_{iw} : Nilai PDRB lapangan usaha i di daerah acuan
- Y_w : Nilai PDRB lapangan usaha i di daerah acuan
- i : lapangan usaha
- j : Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo
- W : Indonesia

Dynamic Location Quotient (DLQ)

Teknik analisis *Dynamic Location Quotient* (DLQ) adalah bentuk modifikasi dari teknik analisis *Static Location Quotient* (SLQ), yaitu dengan mempertimbangkan variabel faktor pertumbuhan lapangan usaha dari waktu ke waktu (Kuncoro, 2012). Rumus perhitungan DLQ

$$DLQ_{ij} = \left[\frac{\left[\frac{(1 + g_{ij})}{(1 + g_j)} \right]^t}{\left[\frac{(1 + g_{iw})}{(1 + g_w)} \right]^t} \right] = \frac{IPPI_{ij}}{IPPI_{iw}}$$

adalah sebagai berikut:

Dengan:

$$(G) = (Y_t Y_0) 1t - 1$$

Keterangan:

- DLQij : Indeks potensi lapangan usaha i di daerah analisis
Gij : Pertumbuhan nilai PDRB lapangan usaha i di daerah analisis
Gj : Rata-rata pertumbuhan nilai PDRB di daerah analisis
Giw : Pertumbuhan nilai PDRB lapangan usaha i di daerah acuan
Gw : Rata-rata pertumbuhan PDRB di daerah acuan
t : Selisih tahun akhir (2022) dan tahun awal (2018)
Yt : Nilai PDRB pada tahun 2022
Y0 : Nilai PDRB pada tahun 2021
I : Lapangan usaha
j : Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo
w : Indonesia
IPPIij : indeks potensi pengembangan lapangan usaha i di daerah analisis
IPPIiw : indeks potensi pengembangan lapangan usaha i di daerah acuan

Analisis Shift-Share

Penggunaan metode analisis Shift Share ialah untuk megetahui apakah ada perubahan dan pergeseran lapangan usaha di Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo. Hasil analisisnya akan menunjukkan kinerja lapangan usaha dalam PDRB Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo. Analisis yang dilakukan untuk mencari lapangan usaha mana yang mampu bersaing dengan komoditas serupa di tingkatan diatasnya dan bagaimana lapangan usaha tersebut dapat berkontribusi terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo. Adapun rumus yang digunakan menurut Soepono dalam (Hajeri et al., 2015) persamaan dan komponen-komponennya dalam analisis shift share adalah:

Dij Nij Mij Cij..... ()

Keterangan:

- i = lapangan usaha yang diteliti
j = Variabel provinsi yang diteliti
N = Variabel nasional yang diteliti
Dij = Perubahan lapangan usaha i di daerah analisis
Nij = Pertumbuhan provinsi lapangan usaha i di daerah analisis
Mij = Bauran industri lapangan usaha i di daerah analisis
Cij = Keunggulan kompetitif lapangan usaha i di daerah analisis

Adapun persamaan rincian diatas sebagai berikut:

Nij = Eij X rn

Mij= Eij (rin-rn)

Cij = Eij(rij-rin)

Sehingga di dapatkan persamaan shift share untuk lapangan usaha i di wilayah Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo sebagai berikut:

Dij= Eij X rn + Eij(rin - rn) + Eij(rij - rin)

Analisis Tipologi Klassen

Analisis Tipologi Klassen digunakan dengan tujuan mengidentifikasi posisi lapangan usaha di Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo dengan memperhatikan lapangan usaha di Sulawesi Utara sebagai daerah referensi. Analisis Tipologi Klassen menunjukkan empat klasifikasi lapangan usaha dengan karakteristik yang berbeda sebagai berikut (Sjafrizal, 2008):

Tabel 1. Klasifikasi Sektor PDRB menurut Tipologi Klassen

Kuadran I Lapangan usaha yang maju dan tumbuh dengan pesat (<i>developed sektor</i>) si > s dan ski > sk	Kuadran II Lapangan usaha tapi tertekan (<i>stagnan sektor</i>) si < s dan s > sk
Kuadran III Lapangan usaha potensial atau masihdapat berkembang (<i>developing sektor</i>) si > s dan ski < sk	Kuadran IV Lapangan usaha relatif tetinggal (<i>underdeveloped sektor</i>) si < s dan ski < sk

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Provinsi Sulawesi utara merupakan provinsi yang terletak di ujung utara Pulau Sulawesi dan merupakan satu dari tiga provinsi di Indonesia yang terletak di utara garis khatulistiwa. Secara geografis, wilayah ini terletak pada 0°LU-3°LU dan 123 BT-126 BT, wilayah ini memiliki 11 kabupaten dan 4 kota yang terdiri dari 171 kecamatan dan 1838 desa. Area Provinsi Sulawesi Utara tidak hanya berada dalam 1 pulau. Provinsi ini memiliki 294 pulau dan yang paling banyak adalah di Kabupaten Sangihe. Ibukota provinsi ini adalah Kota Manado.

Provinsi Sulawesi Utara terletak antara di 0°15' – 5°34' Lintang Utara dan antara 123°07' – 127°10' Bujur Timur. Provinsi ini berbatasan dengan Laut Sulawesi, Filipina, dan Laut Pasifik di sebelah utara serta Laut Maluku di sebelah timur. Batas sebelah selatan dan barat masing-masing adalah Teluk Tomini dan Provinsi Gorontalo. Luas wilayah Sulawesi Utara sebesar 13.892 kilometer persegi atau setara 0,72 persen dari luas Indonesia. Dibanding provinsi lain di Pulau Sulawesi, luas wilayah Sulawesi Utara terhitung paling kecil. Kabupaten Bolaang Mongondow sebagai kabupaten terluas, yaitu 3.547,49 kilometer persegi atau 23,22 persen.

Analisis Static Location Quotient (SLQ)

Hasil analisis perhitungan dengan metode Location Quotient (LQ) dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- Nilai $LQ>1$: artinya sektor itu menjadi basis atau menjadi sumber pertumbuhan. sektor memiliki keunggulan komparatif, hasilnya tidak saja dapat memenuhi kebutuhan daerah bersangkutan tetapi juga dapat di ekspor ke luar daerah.
- Nilai $LQ<1$: artinya sektor itu termasuk non basis. Produksi sektor di suatu daerah tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri sehingga perlu pasokan atau impor dari luar.

Berikut ini hasil perhitungan SLQ (Static Location Quotient) PDRB Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo tahun 2018-2022 (Tabel 3):

Tabel 3. Hasil Perhitungan Statis Location Quotient (SLQ) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2016-2020

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022	RATA-RATA	Ket.
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,55	1,57	1,56	1,55	1,62	1,57	BASIS
B. Pertambangan dan Penggalian	0,67	0,72	0,72	0,72	0,69	0,70	NON BASIS
C. Industri Pengolahan	0,47	0,45	0,48	0,51	0,52	0,49	NON BASIS
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,12	0,12	0,13	0,14	0,14	0,13	NON BASIS
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,53	1,49	1,46	1,39	1,36	1,45	BASIS
F. Konstruksi	1,34	1,34	1,31	1,35	1,38	1,34	BASIS
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,96	0,99	1,01	0,99	1,01	0,99	NON BASIS
H. Transportasi dan Pergudangan	2,12	2,10	2,10	2,06	1,92	2,06	BASIS
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,77	0,74	0,61	0,66	0,66	0,69	NON BASIS
J. Informasi dan Komunikasi	0,93	0,91	0,90	0,86	0,84	0,89	NON BASIS
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	0,95	0,92	0,94	0,97	0,92	0,94	NON BASIS
L. Real Estate	1,33	1,31	1,25	1,21	1,21	1,26	BASIS
M,N. Jasa Perusahaan	0,05	0,05	0,05	0,05	0,04	0,05	NON BASIS
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,09	1,98	1,93	1,99	1,96	1,99	BASIS
P. Jasa Pendidikan	0,83	0,86	0,85	0,86	0,90	0,86	NON BASIS
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,63	3,56	3,42	3,33	3,38	3,47	BASIS
R,S,T,U. Jasa lainnya	0,97	1,00	0,93	0,93	0,90	0,95	NON BASIS

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Utara dan BPS Indonesia (diolah)

Hasil analisis SLQ didapat bahwa ada tujuh lapangan usaha di Provinsi Sulawesi Utara yang termasuk ke dalam lapangan usaha basis dan sisanya adalah lapangan usaha non basis. Termasuk ke dalam lapangan usaha basis ditunjukkan oleh nilai $LQ > 1$ sedangkan untuk non basis dengan nilai $LQ < 1$. Berdasarkan Tabel 3, nilai rata-rata SLQ, lapangan usaha yang termasuk pada lapangan usaha basis di Provinsi Sulawesi Utara yaitu: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Transportasi dan Pergudangan; Real Estate; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

Lapangan usaha dengan nilai rata-rata SLQ paling tinggi adalah lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dengan nilai SLQ rata-rata sebesar 3,47 dan diikuti oleh lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan dengan nilai SLQ rata-rata sebesar 2,06. Sedangkan lapangan usaha dengan nilai SLQ rata-rata paling rendah adalah lapangan usaha Jasa Perusahaan sebesar 0,05.

Tabel 4. Hasil Perhitungan *Statis Location Quotient* (SLQ) Provinsi Gorontalo Tahun 2016-2020

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022	RATA-RATA	Ket.
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,99	3,03	2,87	2,90	2,94	2,95	BASIS
B. Pertambangan dan Penggalian	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	0,16	NON BASIS
C. Industri Pengolahan	0,18	0,20	0,20	0,21	0,21	0,20	NON BASIS
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,08	NON BASIS
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,73	0,77	0,73	0,70	0,70	0,72	NON BASIS
F. Konstruksi	1,11	1,06	1,08	1,07	1,13	1,09	BASIS
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,86	0,90	0,91	0,91	0,95	0,90	NON BASIS
H. Transportasi dan Pergudangan	1,39	1,35	1,49	1,48	1,35	1,41	BASIS
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,77	0,77	0,83	0,84	0,80	0,80	NON BASIS
J. Informasi dan Komunikasi	0,63	0,61	0,58	0,56	0,56	0,59	NON BASIS
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1,04	0,97	1,04	1,13	1,06	1,05	BASIS
L. Real Estate	0,67	0,68	0,66	0,62	0,65	0,66	NON BASIS
M,N. Jasa Perusahaan	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	NON BASIS
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,25	2,18	2,14	2,18	2,24	2,20	BASIS
P. Jasa Pendidikan	1,40	1,42	1,43	1,48	1,55	1,46	BASIS
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,30	3,28	2,93	2,82	2,82	3,03	BASIS
R,S,T,U. Jasa lainnya	0,92	0,86	0,84	0,85	0,79	0,85	NON BASIS

Sumber: BPS Provinsi Gorontalo dan BPS Indonesia (diolah)

Hasil analisis SLQ didapat bahwa ada tujuh lapangan usaha di Provinsi Gorontalo yang termasuk ke dalam lapangan usaha basis dan sisanya adalah lapangan usaha non basis. Termasuk ke dalam lapangan usaha basis ditunjukkan oleh nilai $LQ > 1$ sedangkan untuk non basis dengan nilai $LQ < 1$. Berdasarkan Tabel 4, nilai rata-rata SLQ, lapangan usaha yang termasuk pada lapangan usaha basis di Provinsi Sulawesi Utara yaitu: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Transportasi dan Pergudangan; Real Estate; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

Lapangan usaha dengan nilai rata-rata SLQ paling tinggi adalah lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial dengan nilai SLQ rata-rata sebesar 3,03, dan diikuti oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dengan nilai SLQ rata-rata sebesar 2,94. Sedangkan lapangan usaha dengan nilai SLQ rata-rata paling rendah adalah lapangan usaha Jasa Perusahaan sebesar 0,05.

Analisis *Dynamic Location Quotient* (DLQ)

Prinsip DLQ sebenarnya masih sama dengan SLQ, hanya untuk mengintroduksi laju pertumbuhan digunakan asumsi bahwa nilai tambah sektoral maupun PDRB mempunyai rata-rata laju pertumbuhan sendiri-sendiri selama kurun waktu antara tahun (0) dan tahun (t).

Tafsiran atas DLQ sebenarnya masih sama dengan LQ, kecuali perbandingan ini lebih menekankan pada laju pertumbuhan. Jika $DLQ = 1$, berarti laju pertumbuhan lapangan usaha i

terhadap laju pertumbuhan PDRB daerah (Provinsi) sebanding dengan laju pertumbuhan lapangan usaha tersebut terhadap PDB daerah acuan (Indonesia). Jika $DLQ < 1$, artinya proporsi laju pertumbuhan lapangan usaha i terhadap laju pertumbuhan PDRB daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo lebih rendah dibandingkan laju pertumbuhan lapangan usaha tersebut terhadap PDB Indonesia. Sebaliknya, jika $DLQ > 1$, berarti proporsi laju pertumbuhan lapangan usaha i terhadap laju pertumbuhan PDRB daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo lebih cepat dibandingkan laju pertumbuhan lapangan usaha tersebut terhadap PDB Indonesia.

Lapangan usaha di Provinsi Sulawesi Utara dan di Provinsi Gorontalo sudah memiliki perkembangan sama bahkan lebih cepat dibandingkan dengan lapangan usaha yang berada ditingkat nasional. Pertumbuhan ekonomi naik terus menerus dan lapangan usaha yang ada terus berkembang, hal ini tentunya akan berdampak sangat baik bagi perekonomian nasional, pemerintah kedua daerah kiranya mampu mempertahankan pencapaian yang ada dengan terus melakukan inovasi kebijakan yang sesuai dengan kondisi perekonomian yang ada, baik dengan saling bertukar pikiran untuk saling memajukan daerahnya maupun mengambil kebijakan mandiri yang mampu berdampak baik bagi daerah sekitar yang ada (Tabel 5 dan 6).

Tabel 5. Hasil Analisis *Dynamic Location Quotient* (DLQ) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018-2022

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,9374	1,0357	0,9685	0,9426	1,1251	1,0019
B Pertambangan dan Penggalian	1,1821	1,1912	0,9562	0,9477	0,7761	1,0107
C Industri Pengolahan	0,9169	0,8050	1,2119	1,1244	0,9949	1,0106
D Pengadaan Listrik dan Gas	0,8128	1,0629	1,2598	0,9242	0,9993	1,0118
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,0039	0,9997	1,0640	0,9197	1,0171	1,0009
F Konstruksi	0,9906	0,9657	0,9116	1,1169	1,0199	1,0009
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	0,9697	1,0983	1,0285	0,8989	1,0150	1,0021
H Transportasi dan Pergudangan	1,0988	1,0479	1,1123	1,0075	0,8062	1,0145
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,0806	0,9538	0,4956	1,4821	1,1070	1,0238
J Informasi dan Komunikasi	1,0910	1,0049	1,0622	0,8942	0,9552	1,0015
K Jasa Keuangan dan Asuransi	0,9026	0,9350	1,1542	1,2030	0,8464	1,0083
L Real Estate	1,1951	0,9856	0,8862	0,9036	1,0515	1,0044
M,N Jasa Perusahaan	1,0579	0,9335	1,0489	1,1038	0,8836	1,0055
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,9877	0,8703	0,9867	1,1850	0,9967	1,0053
P Jasa Pendidikan	1,0357	1,0310	0,9186	0,9405	1,0792	1,0010
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,1477	0,9646	0,9006	0,9313	1,0822	1,0053
R,S,T,U Jasa Lainnya	1,1315	1,1430	0,8251	1,0401	0,8720	1,0024

Sumber: BPS Indonesia dan BPS Provinsi Sulawesi Utara (diolah)

Tabel 6. Hasil Analisis *Dynamic Location Quotient* (DLQ) Provinsi Gorontalo Tahun 2018-2022

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022	Rata-rata
A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,1235	1,0841	0,8530	0,9741	0,9787	1,0027
B Pertambangan dan Penggalian	1,0058	1,1176	1,0258	0,9005	0,9645	1,0029
C Industri Pengolahan	0,9494	1,1522	1,0177	0,9301	0,9636	1,0026
D Pengadaan Listrik dan Gas	0,9929	1,0290	1,4845	0,7756	0,8514	1,0267
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,2721	1,2420	0,8418	0,7815	0,9322	1,0139
F Konstruksi	0,8825	0,8918	1,1495	0,9530	1,1684	1,0091
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,0618	1,1427	0,9683	0,8365	1,0079	1,0034
H Transportasi dan Pergudangan	0,9705	0,9937	1,6873	1,0003	0,6827	1,0669
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,0363	0,9918	1,4180	0,9641	0,7442	1,0309
J Informasi dan Komunikasi	1,1690	0,9937	0,9287	0,9211	1,0040	1,0033
K Jasa Keuangan dan Asuransi	0,9666	0,7724	1,4124	1,2839	0,7116	1,0294
L Real Estate	1,0904	1,1022	0,9501	0,7789	1,1087	1,0061
M,N Jasa Perusahaan	0,9431	0,8897	1,0104	1,0755	1,1014	1,0040
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,8565	0,9646	1,0455	1,0491	1,1089	1,0049
P Jasa Pendidikan	1,0316	0,9946	0,9815	0,9753	1,0169	1,0000
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,1731	1,1392	0,7773	0,9110	1,0553	1,0112
R,S,T,U Jasa Lainnya	0,9683	0,9474	1,1440	1,1770	0,8241	1,0122

Sumber: BPS Indonesia dan BPS Provinsi Gorontalo (diolah)

Analisis Shift-Share

Analisis *Shift Share* merupakan salah satu cara untuk mengetahui nilai kontribusi lapangan usaha yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo. Analisis ini pada dasarnya membahas hubungan antara pertumbuhan wilayah dan struktur ekonomi wilayah (Tabel 7 dan 8).

Tabel 7. Hasil Perhitungan Analisis *Shift-Share* di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	NIJ	MIJ	CIJ	DIJ
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	60.761.857,98	-13.326.315,94	22.720.114,60	70.155.656,64
B. Pertambangan dan Penggalian	16.084.338,10	-6.883.618,27	10.433.712,09	19.634.431,92
C. Industri Pengolahan	31.087.933,28	-6.758.401,96	21.506.410,07	45.835.941,39
D. Pengadaan Listrik dan Gas	414.264,42	52.532,69	421.667,07	888.464,19
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	381.009,20	186.213,92	-262.502,43	304.720,69
F. Konstruksi	41.166.817,47	-8.954.294,66	14.877.242,92	47.089.765,72
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	40.031.059,40	-2.847.852,86	18.430.216,95	55.613.423,50
H. Transportasi dan Pergudangan	25.247.804,68	6.388.482,68	-12.196.118,47	19.440.168,89
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6.203.541,22	-28.778,37	-3.114.667,62	3.060.095,23
J. Informasi dan Komunikasi	16.053.353,54	22.888.928,70	-7.290.163,20	31.652.119,03
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	11.895.211,87	261.261,19	-3.699.115,83	8.457.357,23
L. Real Estate	11.413.306,48	-723.214,72	- 1.917.745,95	8.772.345,81
M,N. Jasa Perusahaan	262.978,79	89.043,04	-83.030,14	268.991,68
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	20.314.271,73	-3.971.231,37	-6.472.141,92	9.870.898,44
P. Jasa Pendidikan	8.287.410,96	-1.057.659,91	6.559.528,26	13.789.279,32
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	13.700.217,82	18.697.769,49	- 1.602.445,72	30.795.541,60
R,S,T,U. Jasa lainnya	5.356.196,08	3.079.376,41	-770.345,02	7.665.227,46
PRODUK DOMESTIK BRUTO	308.661.572,34	- 185.057,41	55.678.594,32	364.155.109,25

Sumber: BPS Indonesia dan BPS Provinsi Sulawesi Utara (diolah)

Tabel 8. Hasil Perhitungan Analisis *Shift-Share* di Provinsi Gorontalo Tahun 2018-2022 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	NIJ	MIJ	CIJ	DIJ
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	36.170,30	-7.932,88	6.205,94	34.443,35
B. Pertambangan dan Penggalian	1.150,76	- 492,49	284,93	943,20
C. Industri Pengolahan	4.074,37	- 885,75	4.548,64	7.737,25
D. Pengadaan Listrik dan Gas	82,96	10,52	91,02	184,50
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	60,80	29,72	13,17	103,69
F. Konstruksi	10.625,70	-2.311,22	- 1.092,47	7.222,01
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11.602,32	- 825,40	11.656,91	22.433,82
H. Transportasi dan Pergudangan	5.490,90	1.389,37	- 2.475,47	4.404,80
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.304,07	- 10,69	699,17	2.992,55
J. Informasi dan Komunikasi	3.372,49	4.808,51	- 1.396,51	6.784,50
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	4.235,91	93,04	1.020,45	5.349,39
L. Real Estate	1.885,87	- 119,50	- 84,65	1.681,72
M,N. Jasa Perusahaan	88,78	30,06	- 36,32	82,53
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.141,80	-1.396,15	- 1.923,22	3.822,43
P. Jasa Pendidikan	4.474,18	- 571,01	3.998,26	7.901,43
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.788,08	5.169,89	- 3.195,99	5.761,98
R,S,T,U. Jasa lainnya	1.528,92	879,01	- 1.816,65	591,27
PRODUK DOMESTIK BRUTO	98.078,19	- 58,80	12.522,31	110.541,69

Sumber: BPS Indonesia dan BPS Provinsi Gorontalo (diolah)

Interpretasi hasil analisis:

- Pengaruh pertumbuhan ekonomi nasional terhadap perekonomian Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan nilai positif terhadap semua lapangan usaha dengan nilai *output* sebesar Rp.308.661.572.340.000 yang bersifat positif. Artinya, kontribusi setiap lapangan usaha di Provinsi Sulawesi Utara menunjukkan angka positif dalam PDRB Provinsi Sulawesi Utara. Pertumbuhan lapangan usaha yang paling besar di Provinsi Sulawesi

Utara dibandingkan dengan rata-rata nasional yaitu lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar Rp.60.761.857.980.000 disusul oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar Rp.41.166.817.470.000 dan lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp.40.031.059.400.000.

Pengaruh pertumbuhan ekonomi nasional terhadap perekonomian Provinsi Gorontalo menunjukkan nilai positif terhadap semua lapangan usaha dengan nilai *output* sebesar Rp.98.078.190.000.000 yang bersifat positif. Artinya, kontribusi setiap lapangan usaha di Provinsi Gorontalo menunjukkan angka positif dalam PDRB Provinsi Gorontalo. Pertumbuhan lapangan usaha yang paling besar di Provinsi Gorontalo dibandingkan dengan rata-rata nasional yaitu lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar Rp.36.170.300.000.000 disusul oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp.11.602.320.000.000. dan lapangan usaha Konstruksi sebesar Rp.10.625.700.000.000.

2. Pergeseran proporsional (*Proportional Shift*): Provinsi Sulawesi Utara: Jika dilihat secara keseluruhan perekonomian Provinsi Sulawesi Utara sebesar -Rp.185.057.410.000 dan dapat dikatakan tidak maju dengan nilai pertumbuhan lapangan usaha yang negatif. Namun terdapat delapan lapangan usaha yang termasuk spesialisasi di Provinsi Sulawesi Utara dalam pendapatan daerah yaitu lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas; lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan; lapangan usaha Informasi dan Komunikasi; lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi; lapangan usaha Jasa Perusahaan; lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan lapangan usaha Jasa Lainnya.

Pergeseran Proporsional (*Proportional Shift*) Provinsi Gorontalo: Jika dilihat secara keseluruhan perekonomian Provinsi Gorontalo sebesar -Rp.58.800.000.000 dan dapat dikatakan tidak maju dengan nilai pertumbuhan lapangan usaha yang negatif. Namun terdapat delapan lapangan usaha yang termasuk spesialisasi di Provinsi Gorontalo dalam pendapatan daerah yaitu lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas; lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan; lapangan usaha Informasi dan Komunikasi; lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi; lapangan usaha Jasa Perusahaan; lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan lapangan usaha Jasa Lainnya.

3. Pergeseran Diferensial (*Differential Shift*):

Provinsi Sulawesi Utara: Jika dilihat secara keseluruhan maka perekonomian di Provinsi Sulawesi Utara memiliki daya saing atau keunggulan kompetitif regional terhadap perekonomian nasional dengan nilai DS sebesar Rp.55.678.594.320.000. Ada beberapa lapangan usaha yang memiliki nilai positif yang berarti lapangan usaha tersebut memiliki daya saing yang tinggi atau memiliki keunggulan kompetitif regional dengan lapangan usaha yang sama pada perekonomian nasional. lapangan usaha dengan nilai DS positif tersebut adalah lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar Rp.22.720.114.600.000; lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar Rp.10.433.712.090.000; lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar Rp.21.506.410.070.000; lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas Rp.421.667.070.000; lapangan usaha Konstruksi Rp.14.877.242.920.000; lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp.18.430.216.950.000; lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar Rp.6.559.528.260.000. Sedangkan sisanya adalah lapangan usaha yang memiliki nilai negatif atau lapangan usaha yang memiliki daya saing yang lemah atau memiliki keunggulan kompetitif yang rendah.

Pergeseran Diferensial (*Differential Shift*) Provinsi Gorontalo: Jika dilihat secara keseluruhan maka perekonomian di Provinsi Gorontalo memiliki daya saing atau keunggulan kompetitif regional terhadap perekonomian nasional dengan nilai DS sebesar Rp.12.522.310.000.000. Sebagian besar lapangan usaha yang memiliki nilai positif yang berarti lapangan usaha tersebut memiliki daya saing yang tinggi atau memiliki keunggulan kompetitif regional dengan lapangan usaha yang sama pada perekonomian nasional. lapangan usaha dengan nilai DS positif tersebut adalah lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar Rp.6.205.940.000.000; lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar Rp.284.930.000.000; lapangan usaha Industri

Pengolahan sebesar Rp.4.548.640.000.000; lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas sebesar Rp.91.020.000.000; lapangan usaha Pengadaan Air. Pengelolaan Sampah. Limbah dan Daur Ulang sebesar Rp.13.170.000.000; lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran. Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar Rp.11.656.910.000.000; lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar Rp.699.170.000.000; lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar Rp.1.020.450.000.000; lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar Rp.3.998.260.000.000. Sedangkan sisanya adalah lapangan usaha yang memiliki nilai negatif atau lapangan usaha yang memiliki daya saing yang lemah atau memiliki keunggulan komptetitif yang rendah.

4. Nilai Provinsi Sulawesi Utara memiliki nilai Dij yang positif baik secara total maupun disetiap lapangan usaha mengartikan bahwa selama kurun waktu tahun 2018 sampai tahun 2022 perekonomian regional Provinsi Sulawesi Utara tetap mengalami pertambahan nilai atau mengalami kenaikan kinerja perekonomian daerah sebesar Rp.364.155.109.250.000.
- Provinsi Gorontalo memiliki nilai Dij yang positif baik secara total maupun disetiap lapangan usaha mengartikan bahwa selama kurun waktu tahun 2018 sampai tahun 2022 perekonomian regional Provinsi Gorontalo tetap mengalami pertambahan nilai atau mengalami kenaikan kinerja perekonomian daerah sebesar Rp.110.541.690.000.000.

Analisis Tipologi Klassen

Tipologi Klassen merupakan alat analisis ekonomi regional yang digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola dan struktur pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Tipologi daerah ini pada dasarnya membagi daerah berdasarkan dua indikator, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan kontribusi PDRB daerah. Tujuan penelitian adalah untuk melihat potensi lapangan usaha di Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo (Tabel 9 dan 10).

Tabel 9. Hasil Perhitungan Tipologi Klassen dengan pendekatan PDRB ADHK menurut lapangan usaha Provinsi Sulawesi Utara

Kontribusi Terhadap PDRB		
Laju Pertumbuhan PDRB		
gi > = G	si > = S	si < S
	(Kuadran I) Maju dan Tumbuh Pesat 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 2. Konstruksi 3. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 4. Jasa Pendidikan 5. Jasa lainnya	(Kuadran II) Masih dapat berkembang atau Potensial 1. Pertambangan dan Penggalan 2. Industri Pengolahan 3. Pengadaan Listrik dan Gas
gi < G	(Kuadran III) Maju tapi Tertekan 1. Pengadaan Air. Pengelolaan Sampah. Limbah dan Daur Ulang 2. Transportasi dan Pergudangan 3. Jasa Keuangan dan Asuransi 4. Real Estate 5. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 6. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	(Kuadran IV) Relative Tertinggal 1. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 2. Informasi dan Komunikasi 3. Jasa Perusahaan

Sumber: BPS Indonesia dan BPS Provinsi Sulawesi Utara (diolah)

Tabel 10. Hasil Perhitungan Tipologi Klassen dengan pendekatan PDRB ADHK menurut lapangan usaha Provinsi Gorontalo

Kontribusi Terhadap PDRB Laju Pertumbuhan PDRB	si >= S	si < S
	(Kuadran I) Maju dan Tumbuh Pesat	(Kuadran II) Masih dapat berkembang atau Potensial
gi >= G	1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 2. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 3. Jasa Keuangan dan Asuransi 4. Jasa Pendidikan	1. Pertambangan dan Penggalian 2. Industri Pengolahan 3. Pengadaan Listrik dan Gas 4. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
gi < G	(Kuadran III) Maju tapi Tertekan	(Kuadran IV) Relative Tertinggal
	1. Konstruksi 2. Transportasi dan Pergudangan 3. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 4. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 5. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 6. Jasa Lainnya	1. Informasi dan Komunikasi 2. Real Estate 3. Jasa Perusahaan

Sumber: BPS Indonesia dan BPS Provinsi Sulawesi Utara (diolah)

Berdasarkan hasil analisis Tipologi Klassen dengan pendekatan PDRB di Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo maka dapat dilihat bahwa beberapa klasifikasi lapangan usaha sebagai berikut:

1. Lapangan Usaha Maju dan Tumbuh Pesat
- Hasil analisis terdapat lima lapangan usaha maju dan tumbuh pesat di Provinsi Sulawesi Utara yaitu lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Prikanan; lapangan usaha Konstruksi; lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; lapangan usaha Jasa Pendidikan; lapangan usaha Jasa Lainnya. Sedangkan di Provinsi Gorontalo juga terdapat empat lapangan usaha maju dan tumbuh pesat yaitu lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi; dan lapangan usaha Jasa Pendidikan.
2. Lapangan Usaha Masih dapat berkembang atau potensial
- Dari hasil analisis terdapat Tipologi Klasssen di Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo sama-sama terdapat tiga lapangan usaha yang masih dapat berkembang atau potensial yaitu lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian; lapangan usaha Industri Pengolahan; lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas.
3. Lapangan Usaha Maju tapi tertekan
- Hasil analisis terdapat enam lapangan usaha maju tapi tertekan di Provinsi Sulawesi Utara diantaranya ialah: lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan sampah, Limbah dan Daur Ulang; lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan; lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi; lapangan usaha Real Estate; lapangan usaha Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.
- Dan dari hasil analisis di Provinsi Gorontalo terdapat enam lapangan usaha yang maju tapi tertekan diantaranya ialah: lapangan usaha Konstruksi; lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan; lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; lapangan usaha Jasa Lainnya.
4. Lapangan Usaha Relatif Tertinggal
- Hasil analisis terdapat tiga lapangan usaha yang Relative Tertinggal di Provinsi Sulawesi Utara diantaranya ialah: lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; lapangan usaha Informasi dan Komunikasi; lapangan usaha Jasa Perusahaanl. Sedangkan pada Provinsi Gorontalo terdapat tiga lapangan usaha yang Relative Tertinggal yaitu: lapangan usaha Informasi dan Komunikasi; lapangan usaha Real Estate; lapangan usaha Jasa Perusahaan.

4. KESIMPULAN

1. Perbandingan lapangan usaha yang tergolong basis dan non basis di Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo adalah: Provinsi Sulawesi Utara ada tujuh lapangan usaha yang merupakan lapangan usaha basis. dan sepuluh lapangan usaha non basis. Sedangkan Provinsi Gorontalo terdapat tujuh lapangan usaha basis. dan sepuluh lapangan usaha non basis dengan lapangan usaha yang tidak jauh berbeda dengan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara.
2. Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo terdapat semua lapangan usaha dan memiliki potensi pertumbuhan dan perkembangan yang sama bahkan lebih cepat dibandingkan dengan lapangan usaha yang ada pada tingkat nasional.
3. Perbandingan lapangan usaha yang potensial sebagai penunjang pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara dan di Provinsi Gorontalo. Nilai *National Share* selama tahun 208-2022 membawa pengaruh yang positif bagi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo. Lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dikedua Provinsi ini adalah lapangan usaha Pertanian. Kehutana. dan Perikanan. Sedangkan kontribusi terkecil pada Provinsi Sulawesi Utara adalah lapangan usaha Jasa Perusahaan dan kontribusi terkecil pada Provinsi Gorontalo adalah lapangan usaha Pengadaan Air. Pengelolaan Sampah. Limbah dan Daur Ulang.
4. Pada *Proportional Shift*, terdapat delapan lapangan usaha yang termasuk dalam spesialisasi di Provinsi Sulawesi Utara dan di Provinsi Gorontalo. dengan spesialisasi lapangan usaha yang tidak jauh berbeda. Pada *Differential Shift*, ada tujuh lapangan usaha yang memiliki keunggulan kompetitif di Provinsi Sulawesi Utara. sementara itu pada Provinsi Gorontalo memiliki sembilan lapangan usaha yang memiliki keunggulan kompetitif.
5. Provinsi Sulawesi Utara terdapat lima lapangan usaha yang maju dan tumbuh pesat. tiga lapangan usaha yang masih dapat berkembang atau potensial. enam lapangan usaha yang maju tapi tertekan. dan tiga lapangan usaha yang relatif tertinggal. Sementara itu pada Provinsi Gorontalo terdapat empat lapangan usaha yang maju dan tumbuh pesat. empat lapangan usaha yang masih dapat berkembang atau potensial. enam lapangan usaha yang maju tapi tertekan. dan tiga lapangan usaha yang relatif tertinggal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggiasari. D. O. H. (2018). Analisis Sektor Basis dan Daya Saing Sektor Perekonomian Jawa Timur. *Skripsi Ekonomi Pembangunan Universitas Jember*. 1-84.
- Arsyad L. (1999). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: STIE YKPN.
- BPS Indonesia. (2023). *Produk Domestik Regional Indonesia Menurut Lapangan Usaha 2018-2022*.
- BPS Provinsi Gorontalo. (2023). *Provinsi Gorontalo dalam Angka 2023*.
- BPS Provinsi Sulawesi Utara. (2023). *Provinsi Sulawesi Utara dalam Angka 2023*.
- Boediono. (1992). *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE.
- Cahyono. M. I. (2018). Analisis Penentuan Sektor Basis dan Sektor Potensial di Kabupaten Lamongan. *Ekonomi*. (2). 1-15.
- Hajeri, Erlinda, Y dan E. Dolorosa 2015. Analisis Penentuan Sektor Unggulan Perekonomian di Kabupaten Kubu Raya. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan* : 253-269.
- Halimah. D. (2018). Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Pengembangan Sektor Potensial Daerah di Kabupaten Wonosobo Tahun 2012-2016. *Skripsi Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Sunan Kalijaga*.
- Kuncoro M. (2004). *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Kuncoro M. (2012). *Perencanaan Daerah: Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota dan Kawasan?*. Jakarta : Salemba Empat.
- Porter, M. E. (1990). *The Competitive Advantage of Nations*. New York : Free Press.
- Rozikin. N. H. (2013). Analisis Penembangan Potensi Ekonomi Lokal Untuk Memperkuat Daya Saing Daerah di Kabupaten Gresik. *Administrasi Publik*. 1 (1). 188-196
- Sadono, S. (2000). *Makroekonomi Modern*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sjafrizal. (2008). *Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi*. Ed 1st. Padang: Baduouse Media, 2008.

Sjafrizal. (2014). *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*. Rajawali Pers.
Todaro M. (1999). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Edisi Keenam*. Jakarta Erlangga.
Todaro M & Smith S. (2009). *Pembangunan Ekonomi Edisi kesebelas*. Jakarta: Erlangga.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.



ANALISIS PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PADA PEMERINTAH
KABUPATEN MINAHASA TENGGARA MELALUI APLIKASI SISTEM
INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD)

Priskha Nani Onta¹, Daisy S.M. Engka², Vecky A.J. Masinambow³

Program Studi Magister Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi

E-mail: priskhaonta@gmail.com¹, daisyengka@unsrat.ac.id², vajmasinambow@unsrat.ac.id³

ABSTRAK

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 yang mengharuskan seluruh organisasi perangkat daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara menggunakan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah). Penerapan aplikasi berbentuk web ini bertujuan untuk meningkatkan dan memudahkan percepatan dalam pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Tujuan penelitian untuk mengetahui Efektifitas perencanaan, Penganggaran terhadap realisasi dalam menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Metode Analisis Uji beda berpasangan dengan data yang dipakai Realisasi rata-rata sebelum dan sesudah menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Hasil penelitian setelah di uji terdapat 30 perangkat daerah realisasinya lebih besar setelah menggunakan Aplikasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah dan sesudah menggunakan Aplikasi SIPD dan terdapat 12 perangkat daerah yang realisasinya lebih kecil setelah menggunakan aplikasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

Kata Kunci : Rencana, Anggaran, Pelaksanaan/Realisasi & Pertanggungjawaban

ABSTRACT

The Minister of Home Affairs Regulation No. 77/2020 requires all regional apparatus organizations in Southeast Minahasa Regency to use the SIPD (Local Government Information System) application. The application of this web application aims to improve and facilitate acceleration in the implementation of monitoring and evaluation of public services of the Government of Southeast Minahasa Regency.

The purpose of the study was to determine the effectiveness of planning, budgeting for realization in using the Regional Government Information System (SIPD) in the Government of Southeast Minahasa Regency, the method used in this study is the Paired T-test Analysis Method with the data used Average realization before and after using the Regional Government Information System, after the test there were 30 regional devices whose realization was greater after using the Regional Government Information System Application and after using the SIPD Application and there were 12 regional devices whose realization was smaller after using the Regional Government Information System Application.

Keywords: Plan, Budget, Implementation/Realization & Accountability

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif dan berkelanjutan diperoleh dengan menjaga stabilitas nasional dan meningkatkan kinerja pengelolaan ekonomi daerah sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang merata, dengan cara memperbaiki Tata Kelola Pemerintahan yang baik

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik atau "Good Governace" merupakan perwujudan dari prediktabilitas, keterbukaan, dan pencerahan dalam pengambilan keputusan; birokrasi yang profesional penuh etos kerja; pemerintah sebagai eksekutif yang akuntabel dalam setiap tindakannya; dan partisipasi lembaga masyarakat yang kuat dalam urusan publik; dan seluruh elemen bertindak sesuai peraturan perundangan(World Bank, 1994). Good Governance

diantaranya partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, termasuk efektif dan adil, serta keptuhan terhadap perundang undangan yang berlaku.

Pada dasarnya, karakteristik tata kelola pemerintahan yang baik meliputi partisipasi, berorientasi kepada masyarakat luas, akuntabel, transparan, responsive, efektif dan efisien, adil dan inklusif, serta patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Karakteristik-karakteristik tersebut diaplikasikan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) adalah sistem pendokumentasian, pengelolaan dan pengolahan data perencanaan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada publik dan sebagai dokumen pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah (Winarno et al., 2019)

Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara salah satu daerah yang telah menerapkan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sejak Tahun Anggaran 2021 sampai dengan sekarang tahun anggaran 2023, Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah. Dalam rangka melakukan pengelolaan keuangan daerah secara transparan dan akuntabel, pemerintah memanfaatkan perkembangan teknologi yang saat ini berkembang sangat pesat, teknologi dalam bidang keuangan tersebut merupakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Penerapan aplikasi berbentuk web ini yang sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan dan memudahkan percepatan dalam pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, namun dalam menjalankan program ini tidak lah mudah harus memerlukan kerjasama dan kerja keras dari setiap instansi yang terlibat karena masih banyak yang harus disesuaikan dalam hal sumber daya manusia (SDM) dan Regulasi yang di pakai dalam sistem yang berganti-ganti menyebabkan kesalahan dalam penginputan dalam segi perencanaan dan penganggaran sehingga harus di input dan disesuaikan lagi menurut regulasi yang baru. Harapan dengan diterapkan sistem yang baku diharapkan semua aktifitas instansi pemerintah dapat dijalankan dengan efisien, sesuai dengan kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah khususnya Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah di uraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perencanaan dan Penganggaran pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara melalui Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)”, mengingat belum adanya penelitian yang membahas terkait Perencanaan dan Penganggaran serta pengaruh terhadap realisasinya menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah khususnya di Kabupaten Minahasa Tenggara.

Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Efektifitas setelah penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektifitas perencanaan, Penganggaran dalam penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat yaitu :

1. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) di Kabupaten Minahasa Tenggara dapat meningkatkan perencanaan pembangunan daerah serta pengelolaan keuangan khususnya dalam bidang perencanaan, penganggaran dan realisasinya.
2. Dapat mengembangkan kemampuan dan penguasaan ilmu-ilmu yang di peroleh oleh peneliti.
3. Pemerintah daerah lain yang memiliki permasalahan yang sama dapat menjadikan penelitian ini sebagai studi banding.

4. Menjadi rekomendasi terhadap stakeholders seperti pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Tenggara dan kelompok *civil society* sebagai bahan tinjauan untuk memperbaiki kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Tinjauan Pustaka

Landasan Teori

- **Pengelolaan Keuangan Daerah**

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, "Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pengawasan daerah". Pengelolaan keuangan daerah dalam hal ini mengandung beberapa kepengurusan di mana kepengurusan umum atau yang sering disebut pengurusan administrasi dan kepengurusan khusus atau juga sering disebut pengurusan bendaharawan. Pengelolaan keuangan daerah merupakan seluruh aktivitas pejabat pengelola keuangan dalam menjalankan tugasnya yang meliputi aktivitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta pertanggungjawaban (Hendra, 2017).

- **Perencanaan**

Sirojuzilam dan Mahalli (2010) mengatakan perencanaan adalah intervensi pada rangkaian kejadian – kejadian social masyarakat dengan maksud untuk memperbaiki rangkaian kejadian dan aktivitas yang ada dengan maksud : (a) meningkatkan efisiensi dan rasionalitas, (b) meningkatkan peran kelembagaan dan profesionalitas dan (c) merubah atau memperluas pilihan – pilihan untuk menuju tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi bagi seluruh warga masyarakat.

- **Penganggaran**

Anggaran dapat diartikan sebagai rencana yang diwujudkan dalam bentuk financial, yang meliputi atas usulan pengeluaran yang diperkirakan untuk satu periode waktu, serta usulan cara-cara memenuhi pengeluaran tersebut (Abdul Halim, 2012:22). Sedangkan menurut Rudianto (2009:3), anggaran adalah rencana kerja organisasi di masa yang akan datang dalam bentuk kuantitatif, formal, dan sistematis.

- **Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)**

Sistem Informasi merupakan sebuah data yang dikelola menjadi suatu bentuk yang berguna untuk dimanfaatkan oleh para penggunanya. Data yang dikelola saja belum tentu bias dikatakan sebagai suatu informasi melainkan informasi dapat dikatakan berhasil dan berguna apabila memenuhi syarat dari tiga pilar tersebut melalui, tepat kepada orangnya, tepat waktu dan tepat nilainya, selain dari proses pengolahan tersebut dapat dikatakan sebagai sampah bukan sebagai informasi (Nasution & Nurwani, 2021)

- **Realisasi**

Menurut Mardiasmo (2009:21), realisasi merupakan suatu proses untuk menjadikan sesuatu rencana menjadi perwujudan yang nyata. Realisasi adalah tindakan untuk mencapai sesuatu yang direncanakan atau diharapkan. Dalam bidang akuntansi realisasi bermakna “uang” yaitu konversi dari aktiva, barang dan jasa menjadi cash atau piutang (receivable) yang melalui tahapan penjualan. Dari definisi diatas dapat kita ketahui bahwa realisasi adalah semua tindakan atau proses untuk mewujudkan apa yang sudah direncanakan. Adapun pengertian Realisasi Anggaran menurut Munandar (2012), adalah kegiatan pelaksanaan anggaran yang meliputi kegiatan analisis serta evaluasi pelaksanaan anggaran (budget). Tujuan realisasi anggaran adalah untuk memberikan *feedback* serta *follow up* agar di periode-periode berikutnya lebih baik lagi.

- **Efektivitas**

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handyaningrat S. (1994:16) yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.” Hal ini sesuai dengan pendapat

yang dikemukakan oleh Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa “Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya”.

Penelitian Terdahulu

Akhmad Zakky Ramadan (2023), penelitiannya berjudul Efektivitas perencanaan anggaran dalam system informasi pemerintah daerah (SIPD) Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui efektivitas perencanaan anggaran, memperoleh penjelasan factor penghambat dan strategi SIPD dalam penyusunan perencanaan anggaran di kabupaten Gresik. Metode yang digunakan yaitu metode kualitatif deskriptif dan hasil dari penelitiannya yaitu dalam penyelenggaraan tata kelola keuangan khususnya dalam proses perencanaan anggaran dapat dikatakan efektif karena telah memenuhi teori yang dipakai dalam penelitian meskipun terdapat hal yang harus di evaluasi untuk diperbaiki. Hambatan utama yang dalam penelitian ini yaitu keterlambatan OPD dalam penginputan SIPD. Sehingga strategi untuk mengatasi hambatan menggunakan strategi ASOCA dengan kolaborasi faktir internal dan eksternal sehingga akan ditemukan strategi mengatasi masalah penelitian. Berdasarkan hasil penelitian ini, penyelenggaraan tata kelola keuangan khususnya dalam proses perencanaan anggaran dapat dikatakan efektif karena telah sesuai dengan teori penelitian dan memenuhi dimensi kegunaan, dimensi ketepatan dan objektivitas, dimensi ruang lingkup, dimensi efektivitas biasa, dimensi akuntabilitas, namun perlu evaluasi dalam dimensi ketepatan waktu.

Liona Efrina S (2022), penelitiannya berjudul Analisis Proses Perencanaan dan Penganggaran Daerah (studi Kasus Pada Pemerintah Kota Padang). Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui kelengkapan dan kualitas dokumen penataan yang berfokus pada dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) pada pemerintah kota Padang dan untuk mengetahui kinerja sumber daya manusia (SDM) dalam penataan daerah dan pelaksanaan kegiatan penganggaran. Hasil dari penelitian ini diperoleh dari penilaian kelengkapan dan kualitas dokumen RPJMD dalam penyusunan dan penganggaran pemerintah kota Padang dapat disebutkan mencapai implementasi yang baik, hal ini terlihat dari tingkat penilaian responden yang tercapai 77%. Ada enam indikator untuk memperoleh hasil penilaian, yaitu kejelasan visi, misi dan agenda program bupati terpilih sudah mencapai 80%, kelengkapan dan keselarasan penataannya mencapai 74%, pembangunan keuangan daerah di titik 75%, kelembagaan daerah dan regulasi mencapai 75 %, partisipasi dalam proses penyusunan perencanaan mencapai 80%, kualitas proses perencanaan pemikiran dan strategi mencapai 85%.

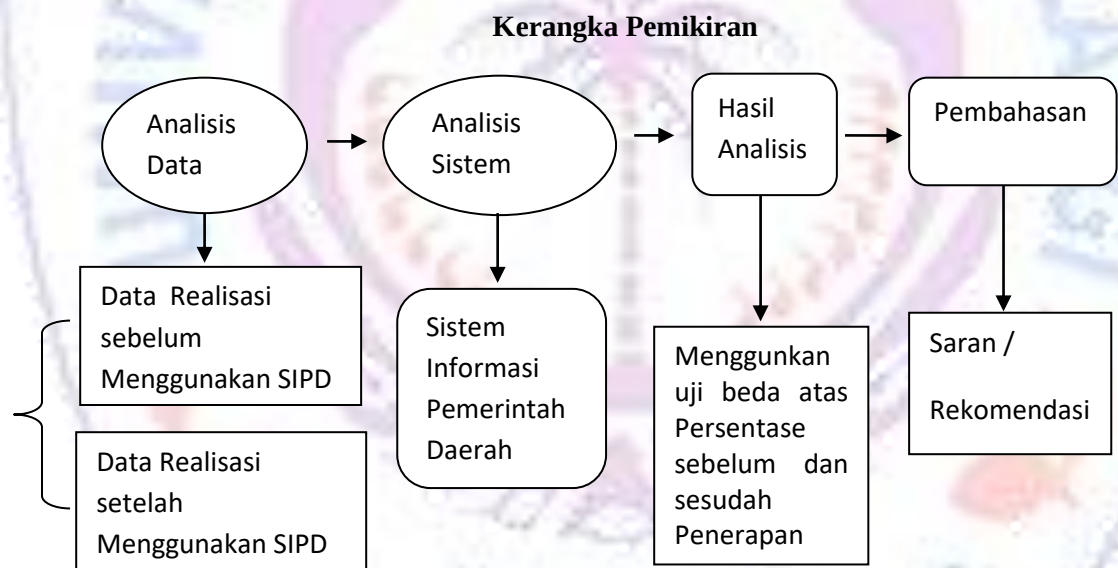
Muhammad Irfan Nasution, Nurwani (2021), penelitian mereka berjudul analisis penerapan system informasi pemerintah daerah (SIPD) pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BKAD) kota Medan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan SIPD di Medan. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan penelitian ini menunjukkan bahwa BPKAD Kota Medan telah menggunakan aplikasi system informasi pemerintahan (SIPD) untuk menjalankan kebijakan – keijakan yang diutuhkan dalam melaksanakan berbagai hal kegiatan yang merupakan program dari pemerintah kota Medan. Dan berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa system informasi pemerintahan daerah SIPD berfungsi memuat system perencanaan pembangunan daerah dan system keuangan daerah, serta system pemerintahan daerah lainnya, termasuk pemerintahan daerah system bimbingan dan pengawasan.

Rahmawati (2023) dengan penelitiannya berjudul analisis anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada pemerintah Daerah kabupaten Berau. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif kuantitatif, sumber data primer dan sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Unit analisis dalam penelitian ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Berau (BPKAD). Hasil dari penelitian yaitu Menurut Data Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2017-2021 Pemerintah Kabupaten Berau selalu memperoleh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Hal ini timbul disebabkan oleh pelampauan pendapatan daerah dan penghematan belanja yang dilakukan oleh tiap satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2017 sampai dengan 2021. Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka sesuai dengan tujuan penelitian dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini. Pertama,

Tingkat pertumbuhan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2017-2021 berfluktuasi. SiLPA pada Pemerintah Kabupaten Berau menunjukkan saldo positif memberikan indikasi adanya kesehatan fiskal dan kesinambungan fiskal yang baik yang mampu menutupi defisit anggaran dengan memanfaatkan surplus dan SiLPA tahun sebelumnya. Kedua, Faktor-faktor penyebab timbulnya Sisa Lebih Pehitungan Anggaran (SiLPA) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2017-2021 adalah Pelampauan pendapatan daerah dan Penghematan Belanja Daerah. Cukup Efisien sebab perencanaan peningkatan pendapatan yang mampu mengalokasikan dana dengan baik sehingga terjadinya penghematan belanja. Diungkapkan secara efektif dalam pengelolaan dimana pendapatan dan belanja yang diperoleh tidak jauh berbeda dari apa yang telah dianggarkan

Kerangka Pemikiran

Kerangka Berpikir penelitian ini berangkat dari fenomena yang sering terjadi di daerah yaitu masih sering terjadi inkonsistensi antar perencanaan dan penganggaran yang menyebabkan sering tidak focus yang seharusnya sistem juga harus mempermudah perencanaan dan penganggaran untuk meningkatkan produktivitas dalam hal ini realisasi, yang dalam penelitian ini mencoba menjawab pertanyaan penelitian dengan memanfaatkan data yang tersedia (sekunder) dan didukung dengan data primer yang berasal dari data perangkat daerah yang ada di Kabupaten Minahasa Tenggara, sehingga analisis terhadap data yang diperoleh kemudian dilakukan pembahasan guna menghasilkan rekomendasi/saran.



Gambar. 1 Kerangka Berpikir

2. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Menurut sifatnya, penelitian ini menggunakan data yang bersifat kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang dinyatakan dalam bentuk angka (Supranto, 2000: 10). Sedangkan menurut waktu pengumpulannya, data dalam penelitian ini menggunakan data cross section. Data cross section adalah data yang dikumpulkan dalam suatu periode tertentu, biasanya menggambarkan keadaan atau kegiatan dalam periode tersebut (Supranto, 2000: 10). Penelitian ini merupakan bentuk penelitian deskriptif dan komparatif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa mendatang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. (Nazir, 2009 : 54). Sedangkan metode komparatif merupakan penelitian yang

tidak terdapat kontrol terhadap variabel bebas, dan tidak dapat melihat ada tidaknya hubungan kausal antarvariabel. Peneliti tidak dapat mengenal, yang mana variabel bebas dan variabel independen (Nazir, 2009 : 60).

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian di mana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempermudah atau memperjelas lokasi yang menjadi sasaran dalam penelitian. Adapun alasan dipilihnya lokasi penelitian di Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai lokasi penelitian yaitu karena di belum pernah Kabupaten Minahasa Tenggara diadakan penelitian yang serupa khususnya Mengenai Pencanaan dan penganggaran terhadap realisasi melalui aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karekteristik tertentu yang di tetapkan untuk mempelajari dan ditarik simpulannya. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.

Banyaknya pengamatan atau anggota suatu populasi disebut ukuran populasi. Ukuran populasi ada dua yaitu:

1. Populasi terhingga (finite population), ukuran populasi yang berapa pun besarnya tapi masih bisa dihitung (countable).
2. Populasi tak terhingga (infinite population), ukuran populasi yang sudah sedemikian besarnya sehingga tidak bisa dihitung (uncountable).

Populasi yang diambil oleh peneliti adalah populasi terhingga. Karena dalam penelitian ini terdiri dari elemen-elemen dengan jumlah tertentu yakni 42 organisasi perangkat daerah dengan data Anggaran dan realisisasi selang tahun 2018 sampai dengan 2022 (Lima Tahun)

Teknik Analisis Data

Metode analisis data menggunakan Metode Analisis Uji beda. Teknik statistik uji beda adalah teknik statistik yang bertujuan untuk menguji apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara keadaan atau sesuatu yang terdapat pada kelompok-kelompok, Model uji beda ini digunakan untuk menganalisis model penelitian pre-post atau sebelum dan sesudah. Uji beda digunakan untuk mengevaluasi perlakuan (treatment) tertentu pada satu sampel yang sama pada dua periode pengamatan yang berbeda (Pramana, 2012). Paired sample t-test digunakan apabila data berdistribusi normal.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini menggunakan uji beda berpasangan dengan syarat di uji normalitas, apabila data dikatakan berdistribusi normal maka menggunakan uji paired Sample T-test , apabila tidak berdistribusi normal maka menggunakan uji beda Wilcoxon signet test dengan data sekunder yang sudah di olah yaitu realisasi rata-rata perangkat daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara sebelum dan sudah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Perangkat Daerah. Pemerintah Kabupaten Minhasa Tenggara Mulai Menggunakan aplikasi Sistem Informasi Perangkat Daerah pada tahun 2021 sampai pada saat ini.

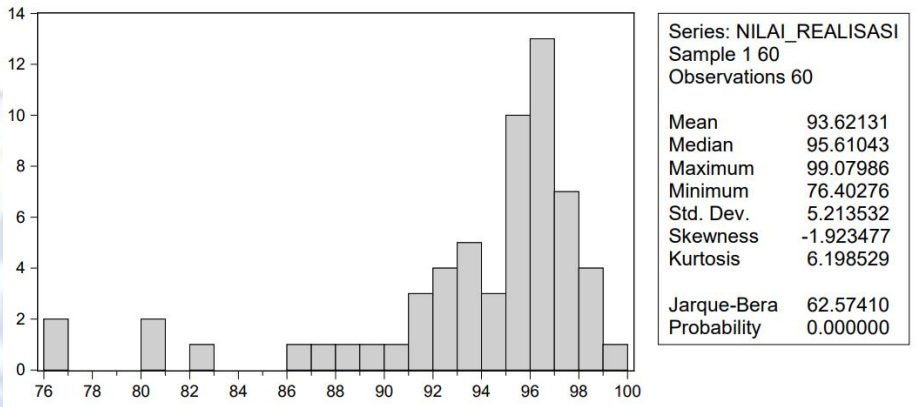
Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model pair test mempunyai distribusi normal atau tidak. Model pair test yang baik adalah memiliki distribusi normal dan mendekati normal. Suatu distribusi dikatakan normal jika taraf signifikannya $> 0,05$, sedangkan jika taraf signifikannya $< 0,05$ maka distribusinya dikatakan tidak normal

Uji Wilcoxon berfungsi untuk menguji perbedaan antar data berpasangan, menguji komparasi antar pengamatan sebelum dan sesudah (before after) diberikan perlakuan dan mengetahui efektifitas suatu perlakuan.

Wilcoxon Signed-Rank Test adalah metode statistik non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan perbedaan dua median, merupakan metode statistika non-parametrik alternatif untuk paired t-test jika populasi tidak terdistribusi secara normal.

- **Analisis Uji Beda Wilcoxon**
 - Analisis Uji Beda Wilcoxon untuk 30 Perangkat Daerah yang lebih besar realisasinya setelah menggunakan aplikasi SIPD Membuktikan terdapat perbedaan realisasi sebelum menggunakan aplikasi SIPD dan setelah menggunakan aplikasi SIPD dilakukan uji beda T-Test data berpasangan dimana terdapat 30 Perangkat Daerah lebih besar realisasinya setelah menggunakan SIPD yang dilihat dari persentasi realisasi anggarannya.

Gambar 2. Tidak Terdistribusi Normal



Sumber: Hasil Olahan Eviews 8.0

Gambar diatas menunjukkan bahwa data terdistribusi tidak normal karena probabilitas adalah 0,000000 atau $< 0,05$, dengan nilai Jarque Bera 62,57410. Karena data tidak berdistribusi normal maka digunakan uji beda Wilcoxon dengan Hasil penelitian uji beda wilcoxon untuk realisasi sebelum menggunakan Aplikasi SIPD dan sesudah menggunakan aplikasi SIPD menunjukkan nilai probabilitas wilcoxon adalah 0,0001 atau $< 0,05$, artinya terdapat perbedaan yang signifikan realisasi sebelum menggunakan aplikasi SIPD dan sesudah menggunakan Aplikasi SIPD.

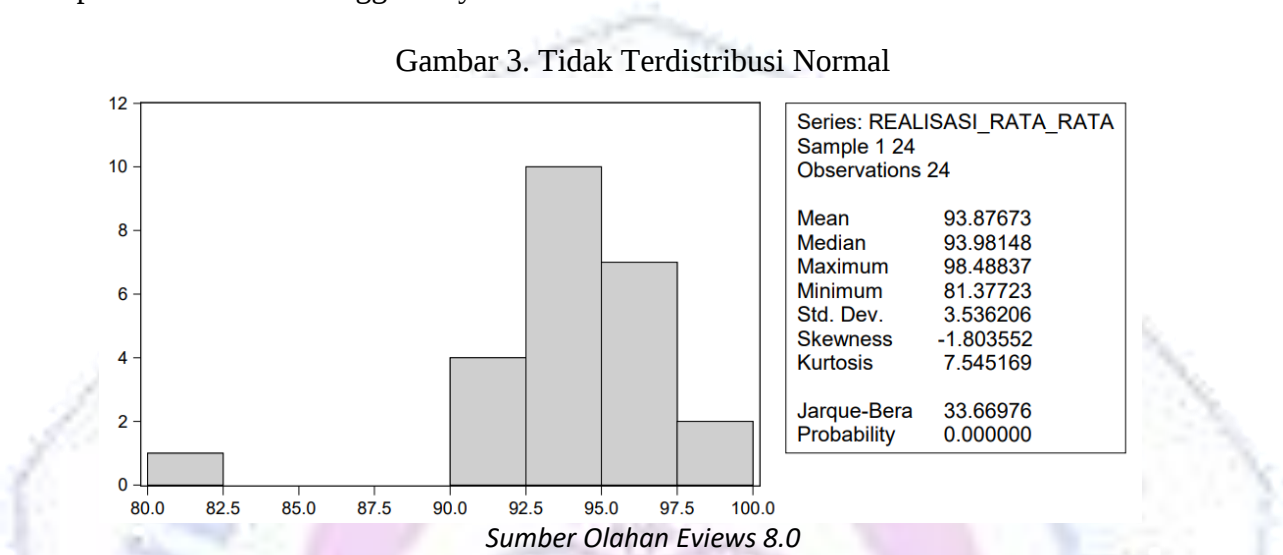
Tabel 1. Hasil Wilcoxon – Test Data Persentasi Realisasi

Test for Equality of Medians of NILAI_REALISASI					
Categorized by values of KODE					
Date: 10/02/23 Time: 00:14					
Sample: 1 60					
Included observations: 60					
Method	df	Value	Probability		
Wilcoxon/Mann-Whitney		3.895696	0.0001		
Wilcoxon/Mann-Whitney (tie-adj.)		3.895696	0.0001		
Med. Chi-square	1	17.06667	0.0000		
Adj. Med. Chi-square	1	15.00000	0.0001		
Kruskal-Wallis	1	15.23410	0.0001		
Kruskal-Wallis (tie-adj.)	1	15.23410	0.0001		
van der Waerden	1	14.14160	0.0002		
Category Statistics					
KODE	Count	Median	> Overall Median	Mean Rank	Mean Score
0	30	93.51056	7	21.70000	-0.460961
1	30	96.37599	23	39.30000	0.460961
All	60	95.61043	30	30.50000	-5.92E-17

Sumber: Hasil Olahan Eviews 8.0

- Analisis Uji Beda Wilcoxon untuk 12 Perangkat Daerah yang lebih kecil realisasinya setelah menggunakan aplikasi SIPD
- Membuktikan terdapat perbedaan realisasi sebelum menggunakan aplikasi SIPD dan setelah menggunakan aplikasi SIPD dilakukan uji beda T-Test data berpasangan dimana terdapat 12 Perangkat Daerah lebih kecil realisasinya setelah menggunakan SIPD yang dilihat dari persentasi realisasi anggarannya

Gambar 3. Tidak Terdistribusi Normal



dias menunjukkan bahwa data terdistribusi tidak normal karena probabilita adalah 0,000000 atau $< 0,05$, dengan nilai Jarque Bera 33,66976

Karena data tidak berdistribusi normal maka digunakan uji beda Wilcoxon dengan Hasil penelitian uji beda wilcoxon untuk realisasi sebelum menggunakan Aplikasi SIPD dan sesudah menggunakan aplikasi SIPD menunjukkan nilai probabilitas wilcoxon adalah 0,0226 atau $< 0,05$, artinya terdapat perbedaan yang signifikan realisasi sebelum menggunakan aplikasi SIPD dan sesudah menggunakan Aplikasi SIPD

Tabel 2. Hasil Wilcoxon – Test Data Persentasi Realisasi

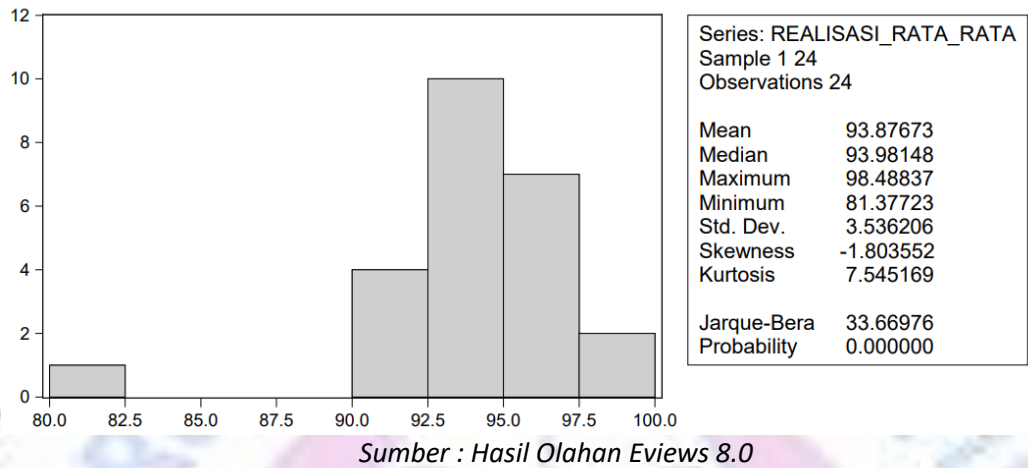
Test for Equality of Medians of NILAI_REALISASI					
Categorized by values of KODE					
Date: 10/02/23 Time: 00:14					
Sample: 1 60					
Included observations: 60					
Method	df	Value	Probability		
Wilcoxon/Mann-Whitney		3.895696	0.0001		
Wilcoxon/Mann-Whitney (tie-adj.)		3.895696	0.0001		
Med. Chi-square	1	17.06667	0.0000		
Adj. Med. Chi-square	1	15.00000	0.0001		
Kruskal-Wallis	1	15.23410	0.0001		
Kruskal-Wallis (tie-adj.)	1	15.23410	0.0001		
van der Waerden	1	14.14160	0.0002		
Category Statistics					
KODE	Count	Median	> Overall Median	Mean Rank	Mean Score
0	30	93.51056	7	21.70000	-0.460961
1	30	96.37599	23	39.30000	0.460961
All	60	95.61043	30	30.50000	-5.92E-17

Sumber: Hasil Olahan Eviews 8.0

- Analisis Uji Beda Wilcoxon untuk 12 Perangkat Daerah yang lebih kecil realisasinya setelah menggunakan aplikasi SIPD

Membuktikan terdapat perbedaan realisasi sebelum menggunakan aplikasi SIPD dan setelah menggunakan aplikasi SIPD dilakukan uji beda T-Test data berpasangan dimana terdapat 12 Perangkat Daerah lebih kecil realisasinya setelah menggunakan SIPD yang dilihat dari persentasi realisasi anggarannya.

Gambar 4. Tidak Terdistribusi Normal



Gambar diatas menunjukkan bahwa data terdistribusi tidak normal karena probabilitas adalah 0,000000 atau $< 0,05$, dengan nilai Jarque Bera 33,66976

Karena data tidak berdistribusi normal maka digunakan uji beda Wilcoxon dengan Hasil penelitian uji beda wilcoxon untuk realisasi sebelum menggunakan Aplikasi SIPD dan sesudah menggunakan aplikasi SIPD menunjukkan nilai probabilitas wilcoxon adalah 0,0226 atau $< 0,05$, artinya terdapat perbedaan yang signifikan realisasi sebelum menggunakan aplikasi SIPD dan sesudah menggunakan Aplikasi SIPD.

Tabel 3. Hasil Wilcoxon – Test Data Persentasi Realisasi

Test for Equality of Medians of REALISASI_RATA_RATA Categorized by values of KODE Date: 10/02/23 Time: 00:13 Sample: 1 24 Included observations: 24			
Method	df	Value	Probability
Wilcoxon/Mann-Whitney		2.280534	0.0226
Wilcoxon/Mann-Whitney (tie-adj.)		2.280534	0.0226
Med. Chi-square	1	6.000000	0.0143
Adj. Med. Chi-square	1	4.166667	0.0412
Kruskal-Wallis	1	5.333333	0.0209
Kruskal-Wallis (tie-adj.)	1	5.333333	0.0209
van der Waerden	1	5.286287	0.0215
Category Statistics			
KODE	Count	Median	> Overall Median Mean Rank Mean Score
0	12	94.98289	9 15.83333 0.424137
1	12	92.87675	3 9.166667 -0.424137
All	24	93.98148	12 12.50000 1.11E-16

- **Uji beda Paired Sample T-Test**
 - Analisis Uji Beda Paired Sample T- Test untuk 30 Perangkat Daerah yang lebih besar realisasinya setelah menggunakan aplikasi SIPD
 - Pengertian Paired T-Test. Paired T-Test merupakan uji parametrik yang dapat digunakan pada dua data berpasangan. Tujuan dari uji ini adalah untuk melihat apakah ada perbedaan rata-rata antara dua sampel yang saling berpasangan atau berhubungan

Hasil penelitian uji beda T-test untuk 30 Perangkat Daerah yang lebih besar realisasinya setelah menggunakan aplikasi SIPD dengan melihat rata-ratanya nilai probabilitas t-test adalah 0,0210 atau $< 0,05$, artinya terdapat perbedaan yang signifikan realisasi sebelum menggunakan aplikasi SIPD dan sesudah menggunakan Aplikasi SIPD.

Sedangkan meannya setelah menggunakan SIPD adalah 95,15867 sebelumnya 92,08396 yang artinya lebih besar realisasinya setelah menggunakan aplikasi SIPD

Tabel 4. Hasil Paired T-Test – Test Data Persentasi Realisasi

Test for Equality of Means of NILAI_REALISASI Categorized by values of KODE Date: 09/27/23 Time: 13:02 Sample: 1 60 Included observations: 60				
Method	df	Value	Probability	
t-test	58	-2.371974	0.0210	
Satterthwaite-Welch t-test*	57.91675	-2.371974	0.0210	
Anova F-test	(1, 58)	5.626262	0.0210	
Welch F-test*	(1, 57.9168)	5.626262	0.0210	
*Test allows for unequal cell variances				
Analysis of Variance				
Source of Variation	df	Sum of Sq.	Mean Sq.	
Between	1	141.8076	141.8076	
Within	58	1461.866	25.20459	
Total	59	1603.674	27.18092	
Category Statistics				
KODE	Count	Mean	Std. Dev.	Std. Err. of Mean
0	30	92.08396	5.114700	0.933812
1	30	95.15867	4.924330	0.899056
All	60	93.62131	5.213532	0.673064

- Analisis Uji Beda Paired Sample T- Test untuk 12 Perangkat Daerah yang lebih kecil realisasinya setelah menggunakan aplikasi SIPD
- Hasil penelitian uji beda T-test untuk 12 Perangkat Daerah yang lebih kecil realisasinya setelah menggunakan aplikasi SIPD dengan melihat rata-ratanya nilai probabilitas t-test adalah 0,0350 atau $< 0,05$, artinya terdapat perbedaan yang signifikan realisasi sebelum menggunakan aplikasi SIPD dan sesudah menggunakan Aplikasi SIPD.
- Sedangkan meannya setelah menggunakan SIPD adalah 95,37269 sebelumnya 92,38077 yang artinya lebih kecil realisasinya setelah menggunakan aplikasi SIPD

Tabel 5. Hasil Paired T-Test – Test Data Persentasi Realisasi

Test for Equality of Means of REALISASI_RATA_RATA Categorized by values of KODE Date: 09/27/23 Time: 12:56 Sample: 1 24 Included observations: 24				
Method	df	Value	Probability	
t-test	22	2.247619	0.0350	
Satterthwaite-Welch t-test*	14.24970	2.247619	0.0409	
Anova F-test	(1, 22)	5.051793	0.0350	
Welch F-test*	(1, 14.2497)	5.051793	0.0409	
*Test allows for unequal cell variances				
Analysis of Variance				
Source of Variation	df	Sum of Sq.	Mean Sq.	
Between	1	53.70967	53.70967	
Within	22	233.8997	10.63180	
Total	23	287.6094	12.50476	
Category Statistics				
KODE	Count	Mean	Std. Dev.	Std. Err. of Mean
0	12	95.37269	1.670614	0.482265
1	12	92.38077	4.297983	1.240721
All	24	93.87673	3.536206	0.721825

Pembahasan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 yang otomatis menggantikan Peraturan Menteri Dalam Negeri sebelumnya yaitu Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, maka seluruh organisasi perangkat daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara sudah Harus menggunakan aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) sehingga Pemerintah Kabubapten Minahasa Tenggara Mulai Menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sejak Tahun Anggaran 2021. Fungsi Produktivitas merupakan fungsi efisiensi dan efektivitas, sehingga kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif didalam penggunaan sumberdaya termasuk bahan-bahan , uang dan waktu akan menghasilkan produktivitas yang relatif tinggi, dalam hal ini produktivitasnya yaitu Realisasi anggaran relative tinggi setelah menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Akhmad Zakky Ramadhan tentang Efektivitas Perencanaan Anggaran Dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dan Hasil Penelitian : Dalam penyelenggaraan tata kelola keuangan khususnya dalam proses perencanaan anggaran dapat dikatakan efektif, kesamaan dengan peneliti Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara telah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah SIPD dan peneliti meneliti penganggaran terhadap realisasinya.

Hasil Penelitian Muhammad Irfan Nasution1 , Nurwani2 tentang Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kota Medan tujuan Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana SIPD di kota medan dan Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif menggunakan Daerah.

Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan (SIPD) untuk menjalankan kebijakan-kebijakan yang dibutuhkan dalam melaksanakan berbagai hal kegiatan yang merupakan program dari pemerintah kota Medan persamaannya dengan penelitian ini pemerintah kabupaten Minahasa tenggara sudah menggunakan aplikasi SIPD untuk perencanaan, penganggaran dan penatausahaannya.

Penelitian ini sejalan dengan Pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handayani S. (1994:16) yang menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.” Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Hidayat (1986) yang menjelaskan bahwa :“Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar persentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya” dalam penelitian ini setelah menggunakan aplikasi SIPD persentase realisasi Anggaran lebih besar dibandingkan dsebelum menggunakan aplikasi SIPD yakni ada 30 Perangkat Daerah.

4. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dari hasil penelitian yang ada, penulis dapat menyampaikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Ukuran Efektivitas setelah Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara signifikan yaitu perencanaan penganggaran terhadap realisasinya meningkat itu dapat dibuktikan dalam 30 perangkat daerah yang realisasinya lebih besar setelah menggunakan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah.
2. Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah masih terdapat 12 perangkat daerah yang realisasinya lebih kecil setelah menggunakan aplikasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah.
3. Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah mampu menekan produktivitas dalam hal realisasi anggaran yang lebih besar.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian diatas, dengan ini penulis ingin memberikan saran ataupun masukan sebagai berikut :

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara lebih memacu lagi semua Perangkat daerah dalam penggunaan SIPD dalam hal pelatihan bagi semua yang teknis menggunakan SIPD agar dapat dilakukan pelatihan dan regenerasi.
2. Kepada Kementrian Dalam Negeri agar supaya fitur-fitur dalam Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah lebih dimudahkan dalam mengakses SIPD.
3. Kepada Kementrian Dalam Negeri apabila ada perubahan dalam SIPD secepatnya diberitahukan kedaerah dalam bentuk notifikasi di aplikasi agar supaya lebih cepat diketahui oleh pemerintah daerah.
4. Kepada peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan untuk perbandingan dan referensi penelitian, namun diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk lebih mengkaji banyak sumber yang terkait dengan sistem informasi Pemerintah Daerah agar nantinya hasil penelitian dapat lebih baik dan lebih mendalam lagi SIPD dalam dunia kerja di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2012 Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Keempat. Penerbit Salemba Empat. Jakarta
- Akhmad Zakky Ramadan (2023) Efektivitas perencanaan anggaran dalam system informasi pemerintah daerah (SIPD) Kbaupaten Gresik Provinsi Jawa Timur
- Handayani S. Soewarno. 1994. Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen. Jakarta: CV. Haji Masagung
- Hengky W. Pramana, (2012). Aplikasi Inventory Berbasis Access 2003.PT. Elex Media Komputindo, Jakarta

- Hidayat. 1986. Teori Efektifitas Dalam Kinerja Karyawan. Gajah Mada University Press. Yogyakarta
- Liona Efrina S (2022) Analisis Proses Perencanaan dan Penganggaran Daerah
- Mardiasmo. 2009. Perpajakan, edisi revisi tahun 2009. Yogyakarta
- Munandar, Utami. 2012. Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat. Jakarta: Rineka Cipta
- Muhammad Irfan Nasution, Nurwani (2021) analisis penerapan system informasi pemerintah daerah (SIPD) pada badan pengelolaan keuangan dan aset daerah (BKAD) kota Medan
- Nazir, Moh. Ph. D. 2009. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nurwani. Nasution, Irfan, Muhammad. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol 9 No 2
- Rahmawati (2023) analisis anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) pada pemerintah Daerah kabupaten berau
- Supranto, J. 2000. Teknik Sampling untuk Survei dan Eksperimen. Jakarta: Penerbit PT Rineka Cipta
- Kharis, Santosa, P. I., dan Winarno, W. W. (2019). "Evaluasi User Experience pada Sistem Informasi Pasar Kerja Menggunakan User Experience Questionnaire (UEQ)". The 10th National Conference on Information Technology and Electrical Engineering, (hlm.24–25).
- Sirojuzilam dan Mahalli, K. 2010. Regional. Pembangunan, Perencanaan dan Ekonomi. USU Press. Medan

PENGARUH UMR DAN INVESTASI TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2011-2020

Nopia Indah S Simamora¹, Dewi Margaretha², Hexsan A Xanichal³

¹ Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Indonesia

E-mail: <mailto:nopiasimamora123@gmail.com>

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana investasi dan upah minimum regional (UMR) mempengaruhi lapangan kerja di provinsi Sumatera Utara. Studi ini menggunakan data deret waktu yang mencakup tahun 2011 hingga 2020. Analisis regresi linier berganda adalah pendekatan yang digunakan untuk analisis penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun investasi memiliki dampak yang baik tetapi tidak signifikan terhadap lapangan kerja di wilayah tersebut, upah minimum regional di Provinsi Sumatera Utara memiliki dampak positif dan substansial terhadap penyerapan tenaga kerja. Jika digabungkan, investasi dan upah minimum regional (UMR) berdampak besar terhadap lapangan kerja di Provinsi Sumatera Utara

Kata Kunci: Investasi, Penyerapan tenaga kerja, Upah Minimum Regional.

ABSTRACT

The aim of this research is to examine how investment and regional minimum wages (UMR) affect employment in the province of North Sumatra. This study uses time series data covering the years 2011 to 2020. Multiple linear regression analysis is the approach used for the analysis of this research. The research results show that although investment has a good but not statistically significant impact on employment in the region, the regional minimum wage in North Sumatra Province has a positive and substantial impact on labor absorption. When combined, investment and the regional minimum wage (UMR) have a major impact on employment in North Sumatra Province

Keywords: Investment, Labor absorption, Regional Minimum Wage.

1. PENDAHULUAN

Berhasilnya suatu pembangunan ekonomi di suatu negara ditandai dengan kenaikan pendapatan per kapita, dan kenaikan tersebut dilihat dari pendapatan yang bertambah dan kesejahteraan ekonomi masyarakat mengalami perbaikan (Arsyad, 2010:12). Faktor pendukung perekonomian suatu negara bukan hanya dari pembangunan ekonomi saja akan tetapi pembangunan ekonomi berhubungan dengan sumber daya manusia, modal, lingkungan, teknologi, dan sebagainya. Ini juga berkaitan dengan pembangunan ekonomi. diperlukan tenaga kerja yang berkualitas untuk memajukan perekonomian di suatu negara (Sarah Elprida, 2020).

Setelah China, India, dan Amerika Serikat, Indonesia memiliki populasi terbesar keempat di dunia dan merupakan negara berkembang dan sektor pekerjaan di negara kita penuh dengan kesulitan. Peningkatan pesat dalam angkatan kerja yang melampaui pasokan. Salah satu masalah utama dengan pekerjaan di Indonesia adalah ketersediaan pekerjaan. (Sapriansyah, 2020). Alasan untuk angkatan kerja yang besar adalah peningkatan populasi yang konstan. sementara lapangan pekerjaan terbatas karena ketidakmerataan pembangunan (Nofandillah, 2018). Paradoksnya, tujuan utama pembangunan ekonomi adalah untuk memastikan bahwa tingkat pekerjaan mengikuti peningkatan angkatan kerja, yang harus melebihi tingkat di mana kemungkinan kerja tersedia (Sri Dai Sulfina, 2023). Hal ini bertujuan agar pertumbuhan ekonomi dapat mengurangi tingkat pengangguran..

Masalah serius dalam ketenagakerjaan tidak hanya berupa minimnya jumlah lapangan pekerjaan ataupun rendahnya tingkat produktivitas tetapi masalahnya ada pada penyerapan tenaga kerja yang lebih kecil daripada kesempatan kerja yang ada. Hal ini dapat disebabkan oleh

tenaga kerja yang tidak memenuhi kriteria yang diminta oleh lapangan kerja tersebut sehingga pada akhirnya akan menimbulkan masalah pengangguran. Data BPS Indonesia menunjukkan bahwa antara tahun 2015 hingga 2019, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tidak meningkat. Pada Agustus 2019, TPT turun menjadi 5,28 persen dari 5,34 persen pada Agustus tahun sebelumnya. Dengan demikian, untuk setiap 100 orang dalam angkatan kerja Indonesia, ada 5 individu pengangguran (BPS, 2020). Dapat kita lihat pada tabel 1 turunnya TPT tidak selalu menunjukkan peningkatan penyerapan tenaga kerja secara Umum. Sama seperti situasi pasar tenaga kerja di Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 1.

Tahun	Penduduk Bekerja	Angkatan Kerja
2011	5.912.114	6.026.020
2012	5.751.682	6.274.874
2013	5.899.566	6.500.750
2014	5.881.371	6.272.083
2015	5.962.304	6.391.098
2016	5.991.229	6.362.909
2017	6.365.989	6.743.277
2018	6.728.431	7.124.458
2019	6.681.224	7.063.662
2020	6.842.252	7.350.057

Sumber : BPS Sumut

Jumlah orang yang pekerja yang berusia 15 tahun atau lebih dan angkatan kerja dari 2011 hingga 2020 bervariasi atau tidak tetap. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara, jelas bahwa setiap tahun selalu ada peningkatan penduduk bekerja dan Angkatan kerja. Tentu saja hal tersebut secara jelas menyatakan bahwa di Provinsi Sumatera masih banyak angkatan kerja yang belum bekerja (pengangguran). Ini disebabkan oleh sempitnya kesempatan kerja dan tingkat pekerjaan yang rendah di beberapa industri. Karena itu, pekerja sering harus membuat keputusan sulit apakah akan mengambil pekerjaan dengan jam kerja yang lebih sedikit atau terus mencari posisi yang sesuai dengan minat mereka, yang dapat mengakibatkan tingkat pengangguran yang tinggi (Nofandillah, 2018). Selain itu, tingkat upah juga dapat menjadi faktor penentu dalam penyerapan tenaga kerja di suatu lapangan kerja. Upah didefinisikan oleh Soemarso (2009) sebagai kompensasi yang dibayarkan kepada karyawan untuk melakukan kerja fisik dengan tangan. Upah sering ditentukan berdasarkan harian, unit, atau satuan. Simanjuntak (2001) menegaskan bahwa kenaikan upah dapat berdampak pada kenaikan biaya produksi, yang kemudian dapat mendorong bisnis untuk memotong biaya tenaga kerja untuk meningkatkan efisiensi. Sumarsono (2009) juga membawa perhatian pada fakta bahwa kenaikan gaji dapat menyebabkan pekerja mempekerjakan lebih sedikit tenaga kerja, yang mungkin menurunkan tingkat output. Selain itu, perbedaan upah antara pengusaha dan pekerja mungkin juga timbul antara kelompok pekerja lainnya.

Dengan menggunakan teknik analisis data panel, Reza Meilawati (2023) melakukan penelitian mengenai Pendapatan Asli Daerah, Investasi, Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Kabupaten atas Pekerjaan di Provinsi Bali dan disimpulkan bahwa, untuk periode 2017–2021, terdapat hubungan negatif dan diabaikan parsial antara karyawan. Provinsi Bali mempekerjakan menurut kabupaten/kota dan upah minimum. Sesuai penelitian Nofandillah Arumsyah Putri (2018), mengenai Analisis Pengaruh Upah, PDRB, dan Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kawasan Gerbangkertasusila Tahun 2012-2016," dan disimpulkan gaji berpengaruh besar dan merugikan terhadap pekerjaan. Akan tetapi tidak sejalan dengan uji regresi menunjukkan bahwa pekerjaan secara signifikan dan menguntungkan dipengaruhi oleh upah minimum provinsi. Penelitian Iksan Sapriansah Ali Nur (2020) mengenai Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Investasi, dan PDRB terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia menghasilkan berbagai hasil penelitian Meilawati dan Hasmarini

(2023). Oleh karena itu, terdapat kesenjangan penelitian atau research gap antara temuan Reza Meilawati dengan teori dan penelitian sebelumnya.

Investasi juga dapat secara langsung meningkatkan kapasitas produksi, yang meningkatkan kebutuhan akan tenaga kerja dan elemen terkait produksi lainnya. Hal ini pada akhirnya mengarah pada lebih banyak kemungkinan kerja dan meningkatkan lapangan kerja (Sukirno, 2016). Maka, lapangan kerja dipengaruhi secara positif oleh investasi.

Hasil penelitian Taufan dan Mafruhah (2022) mengenai pengaruh upah minimum kabupaten/kota, produk domestik regional bruto, dan investasi terhadap ketenagakerjaan di Jawa Barat tahun 2009-2021 menemukan bahwa investasi memiliki dampak yang patut dicatat dan menguntungkan bagi ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Barat. Koefisien investasi satu persen menunjukkan bahwa peningkatan investasi satu persen dapat mengakibatkan kenaikan satu persen lapangan kerja di kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat. Namun seperti yang ditunjukkan oleh penelitian Mashuri (2022) mengenai analisis pengaruh angkatan kerja, investasi, Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan inflasi terhadap ketenagakerjaan di Kabupaten Tuban, memperlihatkan bahwa investasi memiliki dampak yang signifikan dan merugikan terhadap ketenagakerjaan.

Dengan mempertimbangkan perbedaan dalam temuan penelitian sebelumnya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana lapangan kerja di Provinsi Sumatera Utara dipengaruhi oleh gaji dan investasi. Penelitian ini meneliti hubungan antara pekerjaan dan pendapatan di provinsi Sumatera Utara.

LANDASAN TEORI

Konsep Ketenagakerjaan(Employment)

Istilah "employment" dalam bahasa Inggris berasal dari kata kerja "employ," yang artinya kerja atau mempekerjakan seseorang. Oleh karena itu, dalam konteks umum, "employment" merujuk pada kondisi seseorang yang sedang bekerja atau memiliki pekerjaan. Jumlah orang yang bekerja atau memiliki pekerjaan saat ini kadang-kadang disebut sebagai "pekerjaan" dalam bahasa sehari-hari. Gagasan ini mencakup dua elemen: mereka yang dipekerjakan atau melakukan tugas, serta kesempatan kerja dan kesempatan kerja. Oleh karena itu, dalam bahasa Inggris, "pekerjaan" mengacu pada lowongan pekerjaan yang telah diisi di sektor tertentu.

Namun, orang yang bekerja dan berusia antara 15 dan 64 tahun, memiliki pekerjaan, tidak secara sementara, atau mencari pekerjaan disebut sebagai angkatan kerja. Jumlah orang dalam populasi usia kerja dapat dikurangi dari total angkatan kerja untuk menentukan jumlah angkatan kerja dalam periode tertentu. Selanjutnya, tingkat partisipasi angkatan kerja dapat dengan membagi angkatan kerja dengan total populasi usia kerja, persentase dapat dihitung.

Pengertian "tenaga kerja" menurut Badan Pusat Statistik (BPS) adalah setiap orang yang memiliki kemampuan melaksanakan tugas dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa untuk kepentingan masyarakat. serta untuk memenuhi kebutuhan individu. Di Indonesia, tidak ada batasan usia atas untuk bekerja; Usia minimum adalah 10 tahun. Akibatnya, setiap orang atau penduduk yang berusia 10 tahun atau lebih dianggap sebagai bagian dari angkatan kerja.

Tenaga kerja didefinisikan oleh Mulyadi (2003: 57) sebagai penduduk usia kerja (15-64 tahun) atau seluruh penduduk suatu bangsa yang bersedia terlibat dalam proses dan memiliki potensi untuk menghasilkan produk dan jasa bila diperlukan.

Kesempatan Kerja

Jumlah pekerjaan yang dapat dipenuhi oleh suatu perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu disebut kesempatan kerja. Dalam konteks ini, ada persyaratan khusus untuk calon tenaga kerja yang dapat diterima untuk posisi tersebut. Akibatnya, seringkali tidak semua penawaran tenaga kerja saat ini dapat memenuhi posisi tersebut, menyebabkan lowongan tersisa.

Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak selalu menghasilkan kesempatan kerja yang cukup. Ini karena kondisi buruk mencegah ekspansi ekonomi menyerap tenaga kerja yang dapat diakses. Kebijakan yang mempromosikan investasi di sektor-sektor tertentu, seperti pertanian, diperlukan untuk mengatasi hal ini. Tujuannya adalah untuk mempromosikan pekerjaan yang lebih baik dan lebih banyak kemungkinan kerja.

Di sisi lain, penyerapan tenaga kerja mengacu pada kapasitas pekerjaan untuk mempekerjakan karyawan yang memenuhi persyaratan tertentu. Jumlah pekerjaan yang diisi mungkin sama dengan, atau lebih rendah dari, jumlah total lowongan. Tidak akan ada pengangguran jika penyerapan tenaga kerja sama dengan jumlah kemungkinan kerja; Namun demikian, jika kurang, maka pengangguran akan ada.

Jumlah total individu yang dipekerjakan di semua sektor ekonomi disebut sebagai pekerjaan, menurut Biro Pusat Statistik. Dengan demikian, istilah ini mengacu pada sejauh mana lapangan kerja mampu mempekerjakan orang yang memenuhi kualifikasi.

Konsep UMR

Upah memainkan peran kunci dalam memotivasi karyawan untuk memberikan kontribusi maksimal kepada perusahaan. Istilah "upah" sering digunakan secara bergantian dengan "gaji". Meskipun ada banyak perbedaan di antara keduanya. Untuk karyawan kontrak dan tetap, mungkin ada perbedaan dalam struktur pembayaran kompensasi antara gaji dan upah. Gaji, yang biasanya ditentukan setiap bulan, adalah manfaat yang ditawarkan kepada anggota staf yang mencapai tugas administratif dan kepemimpinan. Namun, upah didefinisikan oleh Soemarso (2009) sebagai kompensasi untuk tenaga kerja manual, yang terutama didasarkan pada kekuatan fisik dan sering ditetapkan berdasarkan harian, unit, atau satuan. Upah dengan demikian dibayarkan kepada pekerja yang melakukan jenis kerja ini.

Menurut Simanjuntak (2001), kenaikan tingkat upah dapat menyebabkan biaya produksi meningkat, yang mendorong bisnis untuk mengurangi angkatan kerja. Menurut Sumarsono (2009) kenaikan gaji dapat mengakibatkan lebih sedikit orang yang bekerja dan dapat mengakibatkan penurunan tingkat produksi. Ada kemungkinan bahwa upah yang dibayar pengusaha berbeda antara pekerja atau antara kelas kerja yang berbeda. Sukirno (2016: 364) mencantumkan sejumlah variabel yang mempengaruhi disparitas upah, seperti variasi penawaran dan permintaan tenaga kerja, variasi sifat pekerjaan, variasi tingkat pendidikan, keterampilan, dan keterampilan, serta variasi mobilitas tenaga kerja yang tidak sempurna.

Penghasilan Pekerja, sebagaimana didefinisikan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, dikenal sebagai Upah Minimum Provinsi atau Upah Minimum Daerah (UMR). Pemimpin daerah, yaitu gubernur di tingkat provinsi dan bupati atau walikota di tingkat kabupaten/kota, membuat keputusan tentang UMR atau UMP berdasarkan rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi atau kabupaten/kota. Kebutuhan Hidup Minimal (KHM) karyawan, tingkat inflasi, dan pertumbuhan ekonomi daerah adalah beberapa variabel yang dipertimbangkan ketika menentukan apakah UMR atau UMP layak.

Konsep Investasi

Seperti yang dijelaskan oleh Deliarnov (1999), investasi dapat didefinisikan sebagai seluruh biaya yang mencakup akuisisi persediaan, mesin, peralatan pabrik, dan dana lain yang diperlukan untuk proses manufaktur di suatu tempat.

Investasi adalah jumlah uang yang dihabiskan oleh perusahaan untuk menambah stok modal fisik. Menurut Rudiger (2004:322), investasi mencakup jumlah uang yang dihabiskan oleh perusahaan untuk menambah stok modal dalam jangka waktu tertentu.

Hipotesis

Pengaruh Upah Minimum Regional terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Haryani (2002) menyatakan bahwa kenaikan upah akan menyebabkan penurunan permintaan tenaga kerja, yang menyiratkan bahwa bahkan jika pasokan tenaga kerja akan meningkat, penggunaan tenaga kerja akan cenderung berkurang ketika upah meningkat. Di sisi lain, akan ada kebutuhan yang lebih besar bagi pekerja karena tingkat upah menurun.

Hubungan antara kebutuhan tenaga kerja dan tingkat upah dikaitkan dengan fungsi tingkat upah: perusahaan akan cenderung mempekerjakan lebih sedikit karyawan jika tingkat upah lebih tinggi. Seperti yang dijelaskan oleh Simanjuntak (2001), ukuran, jenis produksi, penggunaan teknologi, dan kemampuan manajemen membuat perbedaan dalam jumlah dan fungsi perusahaan.

Hipotesis

Ho: Dari 2011 hingga 2020, tidak ada korelasi antara pekerjaan di provinsi Sumatera Utara dan perubahan upah minimum regional (UMR).

Ha1: Dari tahun 2011 dan 2020, terdapat hubungan yang signifikan di Provinsi Sumatera Utara antara Variabel Penyerapan Tenaga Kerja dan Upah Minimum Daerah (UMR).

Pengaruh Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Sebagaimana dijelaskan oleh Sukirno (2016:360), tujuan utama melakukan investasi adalah untuk meningkatkan produktivitas dan kapasitas produksi sehingga dapat mencapai surplus yang lebih besar. Akibatnya, ini dapat meningkatkan peluang kerja dan penyerapan tenaga kerja di berbagai industri.

Selain itu, menurut Mankiw (2006:267), investasi luar negeri juga memiliki potensi memengaruhi GDP dan GNP dengan cara lain. Ini menunjukkan bahwa investasi tidak hanya memacu pertumbuhan melalui tabungan domestik, tetapi juga dapat diwujudkan melalui investasi asing. Meskipun sebagian keuntungan investasi tersebut mungkin ini membayar untuk investor luar negeri, tetapi modal dapat digunakan untuk memajukan pengembangan teknologi mutakhir suatu negara yang diciptakan di negara-negara industri. Sementara investor asing dapat memperoleh sebagian dari manfaat dari jenis investasi ini, investasi tersebut telah memfasilitasi penyediaan modal, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas dan gaji dalam lapangan pekerjaan.

Hipotesis penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut.:

Ho: Investasi tidak memiliki dampak yang cukup besar terhadap ketenagakerjaan di provinsi Sumatera Utara antara tahun 2011 dan 2020;

Ha2: Investasi memberikan pengaruh penting untuk pekerjaan Provinsi Sumatera Utara dari 2011 hingga 2020.

Pengaruh UMR dan Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Menurut teori Mankiw(2006) gaji terus disesuaikan untuk menjaga keseimbangan antara penawaran dan permintaan tenaga kerja. Tingkat upah dan pasokan tenaga kerja diubah untuk menebus keduanya. Aturan penetapan upah yang perlu diikuti oleh bisnis sesuai dengan peraturan pemerintah terkait erat dengan tingkat upah yang lebih tinggi. Oleh karena itu, untuk mempertahankan keuntungan dan mengubah target output produksi, perusahaan mungkin meminimalkan tenaga kerja atau mengurangi penyerapan tenaga kerja.

Investasi juga memiliki potensi untuk mendorong penciptaan barang modal, yang pada gilirannya memengaruhi penyerapan faktor produksi seperti pembukaan prospek pekerjaan atau pekerjaan baru yang dapat mengambil pekerja. Hasil akhirnya adalah penurunan tingkat pengangguran di suatu daerah. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasojo (2009) seperti yang dikutip oleh Sandika dkk (2014).

Hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan yaitu:

Ho: Penyerapan Tenaga kerja di Provinsi Sumatera Utara selama tahun 2011-2020 berjalan tidak dipengaruhi oleh investasi dan upah minimum regional (UMR).

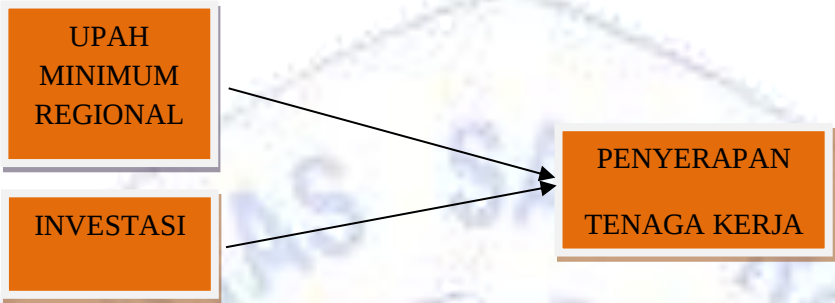
Ha3: Penyerapan Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara tahun 2011 – 2020 dipengaruhi oleh faktor investasi dan upah minimum regional (UMR).

Kerangka Pemikiran

Untuk gagasan positif esensial harus dinyatakan untuk secara teoritis menjelaskan hubungan antara variabel yang diselidiki. Akibatnya, hubungan antara variabel independen dan dependen membutuhkan pembenaran teoritis. Garis penalaran ini memberikan deskripsi singkat tentang gejala-gejala yang ingin dipecahkan oleh masalah yang sedang dipelajari.

Tujuan utama pembangunan nasional adalah untuk menghasilkan banyak lapangan kerja. Diantisipasi bahwa ketika lebih banyak pekerjaan diciptakan, ekonomi umum akan menguat dan distribusi pendapatan akan seimbang. Investasi memiliki potensi untuk memicu pembentukan barang modal, yang dapat memengaruhi faktor produksi seperti penciptaan kemungkinan atau posisi pekerjaan baru, yang berpotensi menyerap pekerja dan akhirnya menurunkan tingkat pengangguran.

Pemilik lapangan kerja tidak dapat menurunkan Upah Minimum Regional (UMR) yang ditetapkan pemerintah. UMR adalah persyaratan minimal yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang menawarkan pekerjaan atau pemberi kerja untuk memenuhi faktor input produksi, yaitu upah pekerja. Ketika harga faktor input lainnya tetap dan upah naik, harga tenaga kerja relatif lebih mahal daripada harga input lainnya. Pengusaha dapat didorong oleh ini untuk mengganti tenaga kerja dengan barang-barang yang lebih hemat biaya untuk mempertahankan keuntungan. Adapun kerangka pemikiran di dalam penelitian tersebut ialah:



Kerangka kerja tersebut menjelaskan bahwa penambahan faktor upah minimum dan investasi regional akan berdampak pada sifat angkatan kerja dan kuantitas pekerja yang terlibat. Dari tahun 2011 hingga 2020, kami akan memeriksa secara bersamaan pengaruh dari ketiga faktor penentu terpisah ini terhadap ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Utara.

2. METODE PENELITIAN

Lingkup Penelitian

Pengaruh investasi dan upah minimum regional (UMR) terhadap ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Utara diteliti dalam penelitian ini. Penyerapan tenaga kerja dianggap sebagai variabel terikat, sedangkan UMR dan Investasi, sebagai faktor independen. Studi ini berisi data deret waktu, atau data tahunan, untuk Provinsi Sumatera Utara dari 2011 hingga 2020. Regresi linier berganda digunakan dalam penelitian ini untuk melihat bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan oleh peneliti dari sumber lain sebelumnya. Metode penelitian ini bersifat kuantitatif.

I. Pengertian Variabel Operasional
Variabel Dependen

Penelitian ini berfokus pada fluktuasi penyerapan tenaga kerja Provinsi Sumatera Utara antara tahun 2011 dan 2020. Kuncoro (2002) mendefinisikan penyerapan tenaga kerja sebagai pekerjaan yang telah selesai, menunjukkan ukuran tenaga kerja.

Orang-orang ini tersebar di berbagai sektor ekonomi dan bidang lain. Pengangguran akan berkurang seiring dengan jumlah orang yang bekerja atau terserap dalam lapangan kerja yang tersedia.

Variabel Independen

Variabel independen penelitian adalah investasi dan upah minimum regional.

- Upah Minimum Regional: Kompensasi standar yang berhak diperoleh karyawan setelah menyelesaikan pekerjaan mereka dikenal sebagai Upah Minimum Regional (UMR). Ini dapat ditetapkan melalui sistem upah yang ditetapkan oleh pemerintah daerah atau melalui kesepakatan bersama. Tingkat Upah Minimum Regional Provinsi Sumatera Utara 2011-2020 adalah data yang dianalisis dalam penelitian ini.
- Investasi

Penanaman modal atau pembentukan modal adalah dua bentuk investasi yang berbeda. Karena investasi mampu meningkatkan produksi dan peluang kerja, bahkan dapat menciptakan lapangan kerja baru, investasi memiliki potensi untuk memengaruhi tingkat ekonomi sebuah negara. Total penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing di Provinsi

Sumatera Utara dikaji dalam penelitian ini dengan menggunakan data investasi dari tahun 2011 hingga 2020.

Metode Pengumpulan Data

Selama proses penyusunan penelitian ini, data harus dikumpulkan untuk memenuhi tujuan penelitian. Diantara teknik penelitian ini digunakan untuk mengumpulkan data adalah:

1. Teknik sekunder, dimana peneliti mendapatkan informasi secara tidak langsung melalui perantara media yang menangani data sekunder dikumpulkan melalui website Badan Pusat Statistik (BPS) Sumut. Statistik yang dikumpulkan mencakup data tentang tenaga kerja, investasi, dan upah minimum regional.
2. Mengakses berbagai buku literatur dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan subjek penelitian yang dibahas adalah salah satu metode penelitian kepustakaan.

Metode Analisis Data

Eviews digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Pengaruh dua faktor independen — investasi dan upah minimum regional (UMR) — pada variabel dependen, pekerjaan, dinilai menggunakan Eviews. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan software Eviews 10. Model regresi linier berganda yang digunakan dalam penyelidikan ini dijelaskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y: Penyerapan tenaga kerja

a: Konstanta

b₁, b₂: Koefisien Regresi

X₁: UMR

X₂: Investasi

e: error term

Signifikansi setiap koefisien regresi variabel independen berhubungan dengan variabel dependen ditentukan dengan menguji asumsi dan hipotesis tradisional. Berikut adalah deskripsi dari dua jenis tes ini:

1. Uji Asumsi Klasik

- Uji Normalitas

Digunakan dalam model regresi untuk mengevaluasi normalitas variabel terikat atau independen. Distribusi residual normal ditunjukkan oleh nilai probabilitas yang lebih besar dari 0,05. Tes Jarque-Bera, atau J-B, digunakan untuk memverifikasi normalitas.

Uji Autokorelasi:

Dalam model regresi linier, tujuannya adalah untuk memastikan apakah dua variabel gangguan terkait satu sama lain. Tes Durbin-Watson digunakan untuk menentukan apakah ada autokorelasi.

Uji Multikolinieritas

Termasuk pengukuran sejauh mana variabel independen berkorelasi satu sama lain menggunakan uji multikolinearitas. Ketika Faktor Inflasi Varians (VIF) kurang dari 10, multikolinearitas tidak ada.

Uji Heteroskedastisitas

Untuk mengetahui apakah ada heteroskedastisitas dalam model regresi linier berganda. Pengujian melalui Scatterplot, uji Park, uji Glejser, dan uji White.

2. Uji Hipotesis

- Analisis Koefisien Determinasi (R²)

Dilakukan untuk menghitung bagian dari variabel dependen adalah, sementara investasi dan upah minimum regional adalah variabel independen yang mungkin menjadi ciri khasnya. Ketika nilai R² naik, begitu juga dampak variabel independen pada variabel dependen. Melalui penggunaan asumsi tradisional dan pengujian hipotesis, pekerjaan ini akan memajukan pengetahuan kita tentang interaksi antara variabel dalam model regresi linier ganda.

Uji t

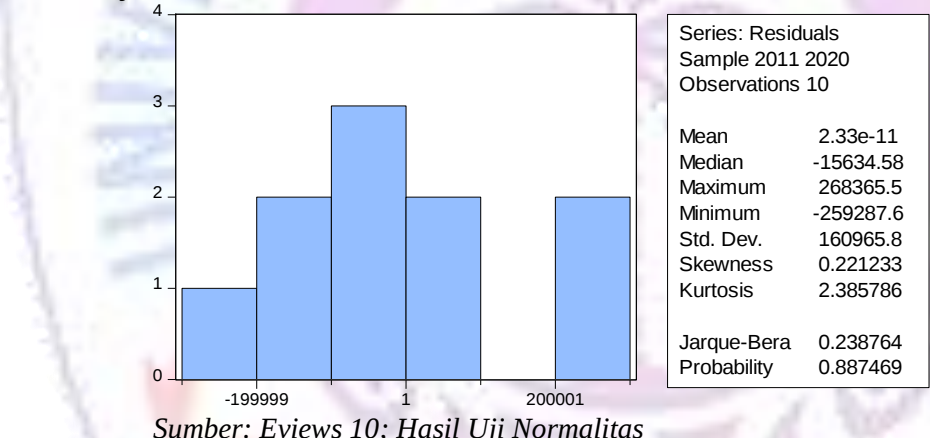
Proses evaluasi ini berada di luar untuk mengukur pentingnya dampak masing-masing variabel independen pada variabel dependen. Dinyatakan secara berbeda, tujuannya adalah untuk memastikan signifikansi hubungan antara masing-masing variabel independen (yaitu, upah minimum regional dan investasi) dan variabel dependen (penyerapan tenaga kerja). Berikut ini adalah kriteria penilaiannya:

- Jika probabilitas kurang dari 0,05, maka H0 ditolak, menunjukkan bahwa setiap variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap setiap variabel dependen.
- Jika probabilitas lebih besar dari 0,05, maka H0 ditolak, menunjukkan bahwa setiap variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Selanjutnya, Untuk memastikan apakah setiap variabel independen mempengaruhi variabel dependen secara kolektif, terapkan uji F. H0 diterima jika nilai F Prob lebih besar dari 0,05, menunjukkan bahwa tidak ada interaksi yang signifikan antara variabel independen dan dependen. Di sisi lain, jika F Prob kurang dari 0,05, H0 ditolak, menunjukkan bahwa tidak ada interaksi yang signifikan antara faktor independen dan variabel dependen.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

- Hasil
- 1. Uji Asumsi Klasik
 - Uji Normalitas



Sumber: Eviews 10; Hasil Uji Normalitas

Nilai Probability Jarque Bera (JB) lebih besar dari 0,05 sesuai dengan persyaratan uji normalitas, menunjukkan bahwa baik distribusi residual maupun asumsi normalitas tidak dilanggar. Dengan nilai 0,887469, Probabilitas Jarque Bera lebih tinggi dari 0,05. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hasil analisis data menunjukkan bahwa tidak ada pelanggaran uji kenormalan dalam parameter penyelidikan ini.

Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.611770	Prob. F(2,5)	0.5785
Obs*R-squared	1.965987	Prob. Chi-Square(2)	0.3742

Sumber: Eviews 10; Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test digunakan untuk analisis autokorelasi, menggunakan kriteria bahwa tidak ada autokorelasi dalam penelitian ini jika probabilitas (Prob.) dari data yang diamati (Obs * R-kuadrat) lebih besar dari 0,05. Nilai probabilitas 0,3742 lebih tinggi dari 0,05, seperti yang terlihat pada tabel di atas. Ini dapat diabaikan bahwa hasil analisis data menunjukkan bahwa tidak ada indikasi adanya autokorelasi yang melanggar asumsi yang telah ditetapkan dalam kerangka penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey			
F-statistic	0.328070	Prob. F(2,7)	0.7308
Obs*R-squared	0.857012	Prob. Chi-Square(2)	0.6515
Scaled explained SS	0.290971	Prob. Chi-Square(2)	0.8646

Sumber: EvIEWS 10; Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Pagan-Godfrey: Uji Heteroskedastisitas digunakan untuk mengukur heteroskedastisitas, dan persyaratannya adalah bahwa nilai Probabilitas (Prob.) penelitian tidak boleh menunjukkan bukti heteroskedastisitas. Obs * Rsquared lebih besar dari 0,05, seperti yang ditunjukkan oleh tabel sebelumnya. Akibatnya, hasil analisis data menunjukkan bahwa tidak ada indikasi heteroskedastisitas yang bertentangan dengan anggapan penelitian.

Uji Multikolinearitas

Variance Inflation Factors (VIF) digunakan dalam Uji Multikolinearitas. Jika nilai VIF Terpusat kurang dari 10, maka Uji Multikolinearitas pada model penelitian ini tidak melanggar kriteria apapun. Karena nilai VIF Terpusat 5,941553 kurang dari 10, dapat dikatakan bahwa uji multikolinearitas tidak dilanggar dalam model penelitian ini.

Variance Inflation Factors			
Date: 11/10/23 Time: 21:55			
Sample: 2011 2020			
Included observations: 10			
Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	7.81E+10	23.44599	NA
UMR	0.094657	92.46014	5.941553
INVESTASI	272.5658	38.14528	5.941553

Sumber:EvIEWS 10;Hasil uji Multikolinearitas

Untuk hasil uji asumsi klasik dapat dilihat pada tabel berikut:

Dependent Variable: TK
Method: Least Squares
Date: 11/10/23 Time: 22:03
Sample: 2011 2020
Included observations: 10

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4848550.	279473.1	17.34890	0.0000
UMR	0.753357	0.307664	2.448635	0.0442
INVESTASI	1.940303	16.50957	0.117526	0.9097

R-squared	0.847246	Mean dependent var	6201616.
Adjusted R-squared	0.803601	S.D. dependent var	411847.7
S.E. of regression	182518.0	Akaike info criterion	27.31041
Sum squared resid	2.33E+11	Schwarz criterion	27.40119
Log likelihood	-133.5521	Hannan-Quinn criter.	27.21083
F-statistic	19.41260	Durbin-Watson stat	1.090389
Prob(F-statistic)	0.001393		

Sumber:EvIEWS 10;Hasil Uji regresi

2. Uji Hipotesis

- Uji Simultan (Uji F)

Nilai probabilitas F-statistik sebesar $0,001393 < 0,05$ menunjukkan bahwa variabel Penanaman Modal dan Upah Minimum Daerah (UMR) berpengaruh signifikan terhadap ketenagakerjaan di Provinsi Sumatera Utara. Akibatnya, hipotesis alternatif (H_a) diterima, menunjukkan bahwa kedua faktor tersebut memiliki dampak besar terhadap penyerapan tenaga kerja di provinsi Sumatera Utara.

Uji Parsial (Uji t)

- a) Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Utara dipengaruhi secara positif dan signifikan oleh variabel Upah Minimum Daerah (UMR). Dengan nilai probabilitas $0,0442 < 0,05$, hipotesis alternatif (H_a) diterima dan hipotesis nol (H_0) ditolak.
- b) Hasil regresi menunjukkan bahwa faktor investasi berpengaruh positif namun tidak signifikan secara statistik terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Utara, dengan nilai probabilitas $0,9097$ lebih besar dari $0,05$. Akibatnya, hipotesis nol (H_0) diterima dan hipotesis alternatif (H_a) ditolak.

• Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel di atas menunjukkan nilai R-Squared $0,847246$, yang menunjukkan bahwa UMR dan investasi dapat bertanggung jawab atas $84,72$ persen kontribusi dari variabel penyerapan tenaga kerja. Variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model mungkin bertanggung jawab atas $15,28$ persen terakhir.

• Pembahasan Model Analisis

Dalam konteks ini, persamaan regresi yang dihasilkan oleh model penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{TENAGA KERJA} = 4848550 + 0.753357(\text{UMR}) + 1.940303(\text{INVESTASI}) + e$$

Berdasarkan koefisien di atas, dapat dijelaskan bahwa:

- a) Apabila variabel independen Upah Minimum Regional (UMR) dan Investasi dipertimbangkan sebagai tetap, nilai konstan 4848550 berarti bahwa Lapangan Kerja di Provinsi Sumatera Utara memiliki nilai konstan 4848550 unit.
 - b) Lapangan kerja di Provinsi Sumatera Utara akan tumbuh sebesar $0,753357$ unit jika variabel UMR meningkat sebesar 1% , sesuai dengan koefisien Upah Minimum Regional (UMR) sebesar $0,753357$. Ini menunjukkan pertumbuhan seperti itu, dengan asumsi unsur-unsur lain tetap tidak berubah (*ceteris paribus*).
- Koefisien Investasi sebesar 1.940303 menunjukkan bahwa, dengan asumsi faktor lainnya tetap (*ceteris paribus*), penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Utara akan meningkat sebesar 1.940303 satuan jika variabel investasi naik sebesar 1 persen.

Pembahasan

Variabel Upah Minimum Daerah Provinsi Sumatera Utara terhadap Pekerjaan

H_0 ditolak, Berdasarkan temuan uji t, tingkat pendidikan variabel memiliki tingkat signifikansi $0,0442$, yaitu kurang dari $0,05$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa upah minimum di daerah memiliki dampak yang menguntungkan dan cukup besar terhadap lapangan kerja di Provinsi Sumatera Utara. Koefisien regresi upah minimum regional $0,753357$ menunjukkan hubungan positif searah antara ketenagakerjaan dan upah minimum di Provinsi Sumatera Utara. Dinyatakan berbeda, pekerjaan umumnya meningkat seiring dengan kenaikan upah minimum lokal. Penyerapan tenaga kerja meningkat sebagai respons terhadap kenaikan upah minimum, sedangkan penurunan sebagai respons terhadap penurunan upah minimum, menurut studi sebelumnya oleh Taufan dan Mafruhah (2022). Namun, temuan ini tidak sejalan dengan hipotesis awal yang didasarkan pada teori Haryani (2002) dan Simanjuntak (2001) menunjukkan bahwa perusahaan cenderung mengurangi jumlah tenaga kerja mereka ketika upah meningkat.

Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja

Hasil uji hipotesis parsial penelitian menunjukkan bahwa, meskipun tidak signifikan secara statistik, variabel Investasi memiliki efek positif terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Utara. Penelitian yang dilakukan sebelumnya oleh Nofandillah dan Soelistyo (2018) mengungkapkan bahwa tingkat penyerapan tenaga kerja Kawasan Gerbangkertasusila diuntungkan oleh investasi. Ini menyiratkan bahwa perusahaan atau pekerjaan cenderung menggunakan lebih banyak tenaga kerja ketika menghabiskan untuk membantu dalam proses manufaktur atau mencapai tujuannya. Meskipun pengaruh investasi terhadap penyerapan tenaga kerja bersifat positif, dampaknya tidak signifikan secara statistik dalam penelitian ini.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Investasi dan Upah Minimum Regional (UMR) berpengaruh signifikan terhadap lapangan kerja di Provinsi Sumatera Utara.
2. Upah Minimum Regional (UMR) memberikan dampak parsial positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

• Buku

- [1] Arsyad, L. (2010). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- [2] Deliarnov. (1999). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta : Rajawali Pers
- [3]. Haryani, Sri. (2002). *Hubungan Industrial di Indonesia*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta
- [4] Mulyadi. (2003). *Ekonomi Sumber Daya Manusia Dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- [5] Rudiger, Dornbusch dkk. 2004. *Makroekonomi, edisi bahasa Indonesia*. Jakarta : PT Media Global Edukasi
- [6] Simanjuntak, P. J. (2001). *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- [7] Soemarso. 2009. *Akuntansi Suatu Pengantar*. Buku ke 2. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat
- [8] Sukirno, S. (2016). *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta : PT. Rajawali Pers
- [9] Sumarsono, S. (2009). *Ekonomi Manajemen Sumberdaya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu. Cetakan pertama

•Pustaka dalam bentuk Laporan Penelitian:

- [10] Nofandillah, A. P and Soelistyo, A. (2018). Analisis Pengaruh Upah, PDRB, dan Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Dikawasan Gerbangkertasusila Tahun 2012-2016. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, 2(3), 357-371. <https://doi.org/10.22219/jie.v2i3.7095>
- [11] Elprida, Sarah. (2020). Analisis Pengaruh Upah Minimum Regional dan Investasi terhadap Penyerapan tenaga kerja di Provinsi Riau. *Repository Universitas Islam Riau*. <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/10441>
- [11] Kuncoro, H. 2002. Upah Sistem Bagi Hasil dan Penyerapan Tenaga Kerja. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Kajian Ekonomi Negara Berkembang*. <https://eprints.undip.ac.id/>
- [12] Mankiw, N. G. (2006). *Pengantar Ekonomi Makro, Edisi Ketiga*. Salemba Empat Jakarta.
- [13] Mashuri, A. M. (2022) Analisis Pengaruh Angkatan Kerja, Investasi, Upah Minimum Kabupaten / Kota (UMK), dan Inflasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Tuban. *UPN "Veteran" Jawa Timur*. <https://repository.upnjatim.ac.id/8905/>
- [14] Meilawati, R., & Indira Hasmarini, M. (2023). Pendapatan Asli Daerah, Investasi, Produk Domestik Regional Bruto, Upah Minimum Kabupaten Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja. *SEIKO : Journal of Management & Business*, 6(1), 146–153. <https://doi.org/10.37531/sejaman.v6i1.3551>

- [15] Sandika, R.Sofia, Y. Maulida, D. Setiawan. 2014. Pengaruh Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kabupaten Pelalawan. JOM FEKON. 1(2),1-16
- [16] Rozaini, N., & Sulfina, Sri Dai. (2023). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Serta Tingkat Pendidikan Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Di Provinsi Sumatera Utara
- [17] Taufan, N. K., Mafruhah, A. Y. (2022). Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota, Produk Domestik Regional Bruto dan Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2021. *Bandung Conference Series: Economics Studies*, 2(2).
<https://doi.org/10.29313/bcses.v2i2.3974>
- [18] Badan Pusat Statistik [BPS]. 2020. Sumatera Utara dalam Angka. (online). Sumatera Utara. Indonesia
- [19] Undang-undang RI No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

